

DIALOG GLOBAL

10.3

3 edisi dalam berbagai bahasa

Membahas Sosiologi
dengan Robert Kuttner

Johanna Grubner

Iklm dan Perubahan

Md. Rezwani Siddiqui
Markus Wissen
Vishwas Satgar
Joan Fitzgerald

COVID-19:
Pandemi
dan Krisis

Mahmudul Hasan Laskar
Attila Melegh
Ilana Olivie dan Manuel Gracia
Brigitte Aulenbacher, Petra Ezzeddine,
Dóra Gábel, Michael Leibfinger,
Kinga Milankovics, dan Veronika Prieler
Dev Nath Pathak
Michele Grigolo dan Craig Lundy

Perspektif
Teoretis

Syed Farid Alatas

Dalam Kenangan:
Yogendra Singh

Mir Suheel Rasool

Membayangkan
Kembali Masyarakat

S.A. Hamed Hosseini
Barry Gills
Scott Timcke
Shelene Gomes

Sosiologi dari
Sri Lanka

Siri Hettige
Subhangi M.K. Herath
Kalinga Tudor Silva
Farzana Haniffa
Premakumara de Silva

Seksi Terbuka

› **Isu Sampah Plastik di Tiongkok**

MAJALAH



International
Sociological
Association
isa

VOLUME 10 / EDISI 3 / DESEMBER 2020
<https://globaldialogue.isa-sociology.org/>

DG



› Editorial

Bagian 'Membahas Sosiologi' menyajikan wawancara dengan jurnalis paling terkenal Robert Kuttner, yang menginterpretasikan karya Karl Polanyi untuk keadaan masa kini. Berawal dari situasi politik dan ekonomi pada awal abad ke-20, wawancara ini membahas tren globalisasi saat ini, perlunya ekonomi nasional yang tangguh untuk memperkuat pengambilan keputusan yang demokratis, serta masalah inklusi dan eksklusi di saat meningkatnya migrasi internasional.

Simposium pertama kami membahas salah satu masalah mendesak di zaman kita: perubahan iklim. Di satu sisi, artikel-artikel tersebut membahas dampak sosial dari perubahan iklim yang tidak selalu terkait dengan masalah ekologi, seperti masalah demokrasi dan migrasi. Di sisi lain, kontribusi yang ditampilkan di bagian ini menggambarkan kemungkinan alternatif bagi kerusakan lingkungan lebih jauh akibat kapitalisme.

Saat kami menulis, pandemi COVID-19 dan dampaknya masih mendominasi sebagian besar dunia, meskipun dengan cara yang berbeda-beda. Karena alasan inilah kami memuat kembali suatu bagian tentang COVID-19 untuk mengumpulkan analisis dari seluruh dunia. Dengan kontribusi artikel-artikel dari India dan Eropa tentang berbagai masalah mulai dari rawat-tinggal, kegiatan amal, dan migrasi hingga kemungkinan [praktik] sosiologi publik selama masa karantina wilayah (*lockdown*), bagian khusus ini menawarkan sekilas pembahasan terkini dalam kajian kami.

Krisis Covid-19 juga merupakan titik tolak bagi refleksi

mendalam Syed Farid Alatas tentang peran dan dampak teori dan pemikiran sosiologis dalam masyarakat yang lebih luas.

Edisi ini menyajikan sebuah penghormatan kepada Yogendra Singh, pelopor sosiologi India yang meninggal tahun ini. Penelitiannya tentang modernisasi dan tradisi di India pasca-kolonial merupakan terobosan baru.

Tiga artikel sumbangan berikutnya membidik isu mengenai upaya membayangkan kembali masyarakat dan merefleksikannya pada perkembangan-perkembangan saat ini serta tentang signifikansi dari sosiologi. S.A. Hamed Hosseini dan Barry Gills menggunakan perspektif transformatif, sedangkan Shelene Gomes dan Scott Timcke membahas bagaimana memahami masyarakat melalui suatu perspektif sosiologis.

Fokus regional kami dalam edisi ini menyoroti penelitian sosiologis dari Sri Lanka. Disusun oleh Siri Hettige, bagian ini menyoroti disiplin yang dinamis di negara ini, tentang berbagai masalah mulai dari pembahasan konflik kekerasan di Sri Lanka hingga masalah tentang persatuan serta memberikan wawasan-wawasan tentang sejarah sosiologi dan antropologi di negara ini.

'Seksi Terbuka' pada edisi ini kembali menyajikan isu tentang globalisasi dan bencana ekologis dengan membahas krisis sampah plastik di Tiongkok. ■

Brigitte Aulenbacher dan **Klaus Dörre**,
editor *Dialog Global*

› **Dialog Global** dapat dijumpai dalam berbagai bahasa di [ISA website](#).

› **Naskah** harap dikirim kepada globaldialogue.isa@gmail.com.

ISA International
Sociological
Association

**GLOBAL
DIALOGUE**



› Dewan Redaksi

Editor: Brigitte Aulenbacher, Klaus Dörre.

Asisten Editor: Johanna Grubner, Christine Schickert.

Rekan Editor: Aparna Sundar.

Editor Pelaksana: Lola Busuttill, August Bagà.

Konsultan: Michael Burawoy.

Konsultan Media: Juan Lejárraga.

Editor Konsultasi:

Sari Hanafi, Geoffrey Pleyers, Filomin Gutierrez, Eloísa Martín, Sawako Shirahase, Izabela Barlinska, Tova Benski, Chih-Jou Jay Chen, Jan Fritz, Koichi Hasegawa, Hiroshi Ishida, Grace Khunou, Allison Loconto, Susan McDaniel, Elina Oinas, Laura Oso Casas, Bandana Purkayastha, Rhoda Reddock, Mounir Saidani, Ayse Saktanber, Celi Scalón, Nazanin Shahrokni.

Editor Wilayah

Dunia Arab: (*Tunisia*) Mounir Saidani, Fatima Radhouani, Habib Haj Salem; (*Aljazair*) Souraya Mouloudji Garrouddji; (*Maroko*) Abdelhadi Al Halhouli, Saida Zine; (*Lebanon*) Sari Hanafi.

Argentina: Magdalena Lemus, Juan Parcio, Martín Urtasun.

Brasil: Gustavo Taniguti, Angelo Martins Junior, Andreza Galli, Dmitri Cerboncini Fernandes, Gustavo Dias, José Guirado Neto, Jéssica Mazzini Mendes.

Prancis/Spanyol: Lola Busuttill.

India: Rashmi Jain, Nidhi Bansal, Pragya Sharma, Manish Yadav.

Indonesia: Kamanto Sunarto, Hari Nugroho, Lucia Ratih Kusumadewi, Fina Itriayati, Indera Ratna Irawati Pattinasarany, Benedictus Hari Juliawan, Mohamad Shohibuddin, Dominggus Elcid Li, Antonius Ario Seto Hardjana, Diana Teresa Pakasi, Nurul Aini, Geger Riyanto, Aditya Pradana Setiadi.

Iran: Reyhaneh Javadi, Niayesh Dolati, Abbas Shahrabi, Sayyed Muhammad Mutallebi, Faezeh Khajehzade.

Kazakhstan: Aigul Zabirowa, Bayan Smagambet, Adil Rodionov, Almash Tlespayeva, Kuanysh Tel, Almagul Mussina, Aknur Imankul, Madiyar Aldiyarov.

Polandia: Beata Maluchnik, Justyna Kościńska, Jonathan Scovil, Sara Herczyńska, Weronika Peek, Kamil Lipiński, Aleksandra Wagner, Aleksandra Biernacka, Jakub Barszczewski, Adam Müller, Zofia Penza-Gabler, Iwona Bojadżijewa.

Romania: Raluca Popescu, Raisa-Gabriela Zamfirescu, Diana Alexandra Dumitrescu, Iulian Gabor, Bianca Mihăilă, Alexandra Mosor, Maria Stoicescu.

Rusia: Elena Zdravomyslova, Anastasia Daur, Valentina Isaeva.

Taiwan: Wan-Ju Lee, Hung Tsung Jen, Tao-Yung Lu, Po-Shung Hong, Yu-Chia Chen, Yu-Min Huang, Yu-wen Liao, Bun-Ki Lin.

Turki: Gül Çorbacıoğlu, Irmak Evren.



*Kontribusi-kontribusi yang ditampilkan dalam seksi ini mengangkat salah satu isu mendesak di zaman kita yaitu **perubahan iklim** dan membahas dampak sosialnya yang tidak berhubungan langsung dengan isu ekologis, seperti masalah demokrasi dan migrasi, serta menggambarkan pula kemungkinan alternatif untuk mendorong penghancuran lingkungan melalui kapitalisme.*



*Dialog Global melanjutkan serinya mengenai situasi yang berlangsung dan krisis yang dihadapi rakyat di negara-negara berbeda akibat **COVID-19**. Dengan kontribusi dari India dan Eropa mengenai isu-isu yang berkisar dari rawat tinggal, amal, dan migrasi sampai ke kemungkinan-kemungkinan sosiologi publik selama karantina wilayah, seksi khusus ini menawarkan suatu pandangan sekilas mengenai diskusi-diskusi masa kini di dalam bidang kita.*



*Dengan fokus pada **sosiologi dari Sri Lanka** seksi ini menyoroti disiplin ilmu yang dinamis di negara tersebut, yang berkisar dari isu-isu konflik dengan kekerasan sampai ke masalah persatuan di Sri Lanka. Seksi ini menyediakan pula wawasan ke dalam sejarah sosiologi dan antropologi di negara tersebut.*



Global Dialogue dapat terselenggara berkat dana hibah dari **SAGE Publications**.

› Dalam Edisi Ini

Editorial **2**

› MEMBAHAS SOSIOLOGI

Menyintas Kapitalisme Global bersama Karl Polanyi
Wawancara dengan Robert Kuttner
oleh Johanna Grubner, Austria **5**

› IKLIM DAN PERUBAHAN

Migrasi Iklim di Asia Selatan
oleh Md. Rezwan Siddiqui, Bangladesh **8**

Krisis Iklim dan Masalah Demokrasi
oleh Markus Wissen, Jerman **10**

Setelah Kapitalisme: Eko-Sosialisme Demokratis?
oleh Vishwas Satgar, Afrika Selatan **12**

Bagaimana Aksi Iklim Perkotaan Dapat Membangun
Kembali Komunitas
oleh Joan Fitzgerald, AS **15**

› COVID-19: PANDEMI DAN KRISIS

Amal sebagai Status dan Stigma: Karantina Wilayah
di India
oleh Mahmudul Hasan Laskar, India **17**

Kelangkaan Perawatan? Migrasi Perawatan dan
Demografi Politik
oleh Attila Meleg, Hungaria **19**

Bisakah COVID-19 Mengarah Pada Berakhirnya
Globalisasi?
oleh Iliana Olivie dan Manuel Gracia, Spanyol **21**

Menghadapi COVID-19: Rawat Tinggal di Eropa Tengah
oleh Brigitte Aulenbacher, Austria; Petra Ezzeddine, Republik Ceko; Dóra Gábrriel, Hungaria; Michael Leibfinger, Austria; Kinga Milankovics, Hungaria; Veronika Prieler, Austria **24**

Sosiologi Publik di Asia Selatan Selama Karantina Wilayah
oleh Dev Nath Pathak, India **26**

Sosiologi Publik: Menghadapi Pandemi
oleh Michele Grigolo dan Craig Lundy, Inggris Raya **28**

› PERSPEKTIF TEORETIS

Penjarakan Sosial: Relevansi Sosiologi
oleh Syed Farid Alatas, Singapura **30**

› DALAM KENANGAN: YOGENDRA SINGH (1932-2020)

Yogendra Singh: Perintis Sosiologi India Modern
oleh Mir Suheel Rasool, India **33**

› MEMBAYANGKAN KEMBALI MASYARAKAT

Tentang Urgensi Mengintegrasikan (Kembali)
dengan yang Radikal
oleh S.A. Hamed Hosseini, Australia **35**

Melampaui “Koyaanisqatsi”: Membayangkan
Kembali Peradaban
oleh Barry Gills, Finlandia **37**

Rastafari dan Penemuan Kembali Hindia Barat
oleh Scott Timcke dan Shelene Gomes, Trinidad dan Tobago **39**

› SOSIOLOGI DARI SRI LANKA

Sosiologi Sri Lanka dalam Konteks Global dan Lokal
oleh Siri Hettige, Sri Lanka **41**

Sosiologi Sri Lanka—Sejenak Melintasi Waktu
oleh Subhangi M.K. Herath, Sri Lanka **43**

Merefleksikan Perdamaian, Konflik, dan Kekerasan
oleh Kalinga Tudor Silva, Sri Lanka **45**

Menganalisis Kekerasan: Pembentukan Negara Sri Lanka
oleh Farzana Haniffa, Sri Lanka **47**

Batas yang Kabur: Antropologi dan Sosiologi di Sri Lanka
oleh Premakumara de Silva, Sri Lanka **49**

› SEKSI TERBUKA

Globalisasi dan Ketergantungan: Isu Sampah Plastik
di Tiongkok
oleh Pinar Temocin, Jepang **51**

“**Tahun 2020-an dapat dianggap sebagai dekade paling penting di abad paling kritis dalam sejarah manusia di mana ‘menuntut yang tidak mungkin’ menjadi satu-satunya pilihan ‘realistis’ untuk memunculkan kekuatan revolusioner**”

S.A. Hamed Hosseini

› Menyintas Kapitalisme Global bersama Karl Polanyi

Wawancara dengan Robert Kuttner



Robert Kuttner adalah salah seorang perintis dan editor majalah *The American Prospect* serta Profesor di Heller School, Universitas Brandeis. Ia merupakan kolumnis lawas untuk *Business Week*, dan sindikasi *Washington Post*. Ia adalah pendiri dari Economic Policy Institute dan menjadi anggota dewan serta komite eksekutifnya. Kuttner adalah penulis dari dua belas buku, yang terbaru yakni *Can Democracy Survive Global Capitalism?* dan buku terakhirnya tentang pemilihan umum 2020,

Robert Kuttner. Kredit: Robert Kuttner.

The Stakes. Buku-bukunya yang lain termasuk bestseller *New York Times* 2008, *Obama's Challenge: American's Economic Crisis and the Power of a Transformative Presidency*, dan karyanya tahun 2013 tentang krisis finansial, *Debtors' Prison: The Politics of Austerity Versus Possibility*. Bukunya terdahulu yang paling dikenal adalah *Everything for Sale: The Virtues and Limits of Markets* (1997). Tulisan-tulisannya di majalah yang mencakup kesalingterkaitan antara ekonomi dan politik pernah terbit di *The New York Times Magazine* dan *Book Review*, *The Atlantic*, *Harpers*, *The New Republic*, *New York Review of Books*, *The New Yorker*, *New York Magazine*, *Mother Jones*, *Village Voice*, *Commonweal*, *Dissent*, *Foreign Affairs*, *New Statesman*, *Political Science Quarterly*, *Columbia Journalism Review*, *Harvard Business Review*, dan *Challenge*. Posisi-posisinya sebelumnya mencakup antara lain staf penulis nasional dan kolumnis di *The Washington Post*, kepala penyidik dari Komite Perbankan Senat AS, direktur eksekutif dari Komisi Nasional untuk Komunitas Lokal Presiden Carter, dan editor ekonomi untuk *The New Republic*. Ia meraih sejumlah penghargaan, termasuk Penghargaan Paul Hoffman untuk Program Pembangunan Persekitaran Bangsa-bangsa untuk kerja-kerja sepanjang hidupnya terkait efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Di sini ia diwawancarai oleh **Johanna Grubner**, peneliti PhD di Universitas Johannes Kepler, Linz, Austria dan asisten editor *Dialog Global*.

JG: Dalam buku Anda *Can Democracy Survive Global Capitalism?* yang diterbitkan pada 2018, Anda berangkat dari analisis Karl Polanyi mengenai awal abad ke-20 dan berargumen bahwa kita kini tengah menghadapi situasi serupa, baik secara ekonomi maupun politik. Dapatkah Anda mengelaborasi pikiran ini untuk para pembaca kami dan menjelaskan bagaimana pendekatan Polanyi berfaedah untuk analisis Anda mengenai kapitalisme global?

RK: Pada awal abad ke-20, kaum elit finansial dan para sekutu politiknya membiarkan kapitalisme murni untuk menggilas berbagai mekanisme ketahanan sosial lainnya. Hal ini diperkeruh dengan tuntutan Perjanjian Versailles, yang menggabungkan asas *laissez faire* dengan mentalitas penagih hutang dan penghematan ekonomi. Hasilnya, kehidupan menjadi tak dapat ditanggung secara ekonomi oleh orang-orang kebanyakan, khususnya di Jerman dan Austria, dan banyak orang berpaling ke fasisme. Mereka melakukannya karena mereka telah kehilangan kepercayaan pada institusi-institusi parlementer, dan karena nasionalisme ekonomi dan politik yang ekstrem tampak menjanjikan jalan yang lebih baik.

Dalam pandangan Polanyi, tiga mekanisme dari sistem ekonomi abad ke-19 adalah standar emas, perdagangan berbasis *laissez faire*, dan gagasan bahwa kerja harus ditentukan harganya sebagai suatu komoditas di pasar. Persamaannya persis serupa dengan kondisi saat ini, dengan keseimbangan anggaran serta penghematan fiskal sebagai standar emas, World Trade Organization (WTO), dan ideologi neoliberalisme yang mempromosikan perdagangan global yang tidak diatur, dan perlindungan kerja dihapus atas nama perdagangan bebas. Sekali lagi, *laissez faire* telah menyebabkan bencana ekonomi bagi orang-orang kebanyakan dan sebagai reaksi politiknya mereka berpaling ke ultra-nasionalisme.

Yang lebih mencengangkan lagi adalah bahwa di era pasca-perang kita telah belajar bahwa secara ekonomi dimungkinkan untuk meredam kapitalisme murni dengan perlindungan sosial. Hal ini membuat sistem lebih produktif dan juga lebih adil. Namun kurun setelah 1973 menunjukkan bahwa hal ini sangat sulit untuk dipertahankan secara politik. Para kapitalis tidak menyukai pembatasan, dan menentangnya.

Konsekuensinya sama saja dengan apa yang telah terjadi pada 1920-an dan 1930-an. Ketika buruh menderita keterpurukan dan pusat kubu politik tidak membela mereka, mereka berpaling ke sisi ekstrem kanan. Di tahun 1990-an banyak yang berpaling ke haluan kiri moderat, namun pada 1990-an kelompok kiri moderat juga telah menerima sebagian besar formula neoliberal.

JG: Selain kesamaan yang menonjol ini, produksi kapitalis kini, misalnya, ditata mengikuti rantai nilai global yang sering menerapkan “just-in-time production” [Penyelarasan waktu proses produksi dengan jadwal pengiriman produk ke pasar sesuai kebutuhan konsumen]. Tidakkah hal ini memperlihatkan perbedaan berarti dengan ekonomi global pada 1930-an? Dan mengapa analisis Polanyi masih relevan?

RK: Adanya pergeseran ke rantai pasok global justru membu-

at Polanyi semakin relevan. Dengan korporasi besar mengalihdayakan pekerjaan-pekerjaan ke Asia, di mana terdapat buruh yang digaji sangat rendah dan dieksploitasi, kontrak sosial dalam demokrasi untuk melindungi pekerja dari ombang-ambing pasar menjadi semakin sulit dipertahankan. Rantai pasok global adalah perdagangan bebas yang diberikan obat kuat.

JG: Di AS sebagaimana juga di Amerika Latin dan Eropa, populisme sayap kanan tengah bangkit. Bagaimana Anda mempertautkan antara kebangkitan populisme sayap kanan di tempat-tempat seperti Eropa, Amerika Serikat dan Amerika Latin, maupun kebangkitan neofasisme yang telah Anda gambarkan, dengan globalisasi kapitalisme dan pengurangan regulasi negara?

RK: Masalahnya bukanlah globalisasi kapitalisme itu sendiri. Kita mempunyai satu bentuk globalisasi kapitalisme di bawah sistem Bretton Woods pada 1944 yang secara eksplisit dirancang untuk memberikan kepada bangsa-bangsa banyak ruang politik serta kebijakan untuk meluncurkan ekonomi tanpa pengangguran yang dilindungi dari tekanan deflasi kapital privat global. Namun versi dari globalisasi yang diterapkan sejak dirintisnya WTO serta Perjanjian Maastricht di Eropa secara sengaja didesain untuk memberlakukan doktrin pergerakan bebas dari barang, jasa, kapital (dan, pada kasus Eropa, orang) untuk mengabaikan kapasitas dari entitas politik yang demokratis untuk mengatur, membatasi, dan meredam kapital. Sekali lagi, reaksi dari orang-orang yang tersingkir ialah berpaling ke para ultra-nasionalis dan populis sayap kanan (dan sesekali, sebagaimana di Bolivia, ke populis sayap kiri).

JG: Di masa silam, pergerakan melawan kesenjangan yang diakibatkan kapitalisme mempunyai orientasi yang secara terbuka internasional. Apakah Anda melihat pergerakan yang semacam itu mempunyai relevansi dan tempat dalam upaya melampaui tingkatan nasional di masa kini, atau apakah posisi strategis negara-bangsa merupakan opsi terbaik pada saat ini?

RK: Sebagaimana yang saya katakan, negara-bangsa ialah lokus dari kekuasaan politik dan kewarganegaraan demokratis. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh perjanjian Bretton Woods dan konvensi ILO (Organisasi Perburuhan Internasional), warga internasional dan solidaritas buruh sangatlah penting untuk menyeimbangi kekuatan dari kapital internasional. Masalahnya adalah bahwa periode Bretton Woods bersifat pengecualian. Pada sebagian besar keadaan, internasionalisme yang dipraktikkan ialah internasionalisme kapital, bukan kewargaan.

JG: Dalam karya Anda, Anda menggambarkan bagaimana “ekonomi campuran” membawa kesejahteraan yang tidak ada presedennya di Eropa dan Amerika Serikat pasca-Perang Dunia II. Dapatkah Anda menggambarkan sistem “ekonomi campuran” dan hubungannya dengan demokrasi serta otonomi negara-negara?

RK: Ekonomi campuran merupakan frasa ekonom Paul Samuelson untuk merujuk pada ekonomi yang pada dasarnya kapitalis namun disertai dengan negara kesejahteraan dan, pada kasus-kasus tertentu, dengan perencanaan publik serta kepemilikan publik dan juga pengaturan yang ketat terhadap



sektor finansial dan berbagai industri utama lainnya. Ekonomi campuran juga melibatkan pengaturan pertanian, pemberdayaan negara terhadap serikat buruh sebagai mitra sosial yang diakui, dan penggunaan pemerintahan untuk membatasi kapitalisme murni. Karena kewarganegaraan diekspresikan pada tingkatan negara-bangsa, kebanyakan dari kebijakan ini diberlakukan secara nasional. Pengalaman Eropa dengan konfederasi pada umumnya memperlemah pengaturan kapitalisme dan memperkuat kapital. Ini sudah diantisipasi dan didukung oleh Hayek. Bagi Polanyi, suatu ekonomi campuran tidaklah cukup, sebagai sistem ekonomi maupun politik. Yang diperlukan adalah sosialisme demokratis.

JG: Sebuah pertanyaan lama untuk kaum kiri di banyak negara yang masih terus diajukan ialah: Bagaimana sosialisme demokratis di satu negara bertahan dan melawan tekanan dari kapitalisme global? Apakah Polanyi menawarkan pandangan terhadap dilema ini?

RK: Dibutuhkan pemerintahan sayap kiri di negara-negara besar atau rintangan eksplisit terhadap kekuatan institusi finansial global. Vienna Merah Polanyi yang dihormati bertahan selama kira-kira lima belas tahun. Kemudian ia dihancurkan oleh kekuatan yang lebih besar. Kita setidaknya pernah mempunyai semacam demokrasi sosial, kalau bukan sosialisme demokratis, selama dua atau tiga dekade setelah Perang Dunia II, dan lebih lama lagi di Swedia. Maka, jika warga dimobilisasi, sosialisme demokratis di suatu negara dapat bertahan untuk setidaknya satu atau dua generasi. Dan, sebagaimana pernyataan tersohor Keynes, dalam jangka panjang kita semua mati. Meski begitu, jika sistem global selalu memusuhi demokrasi sosial domestik, sistem konsensual seperti di Swedia atau Denmark pun akan menghadapi risiko. Secara global jaminan sosial dan upah yang layak dianggap tidak kompetitif. Globalisme menggerus regulasi dalam negeri. Pengadilan Eropa, yang mewakili neoliberalisme global dari satu benua, menganggap sejumlah aspek dari kontrak sosial Skandinavia tidak sepadan dengan hukum dasar dari Uni Eropa. Ketika kaum neoliberal berkuasa di Stockholm dan Kopenhagen, mereka dengan sengaja mulai melucuti logika kelembagaan dari solidaritas sosial. Jadi, kita perlu mengubah sistem global dan juga merebut kembali politik domestik negara demi negara. Dua hal ini berjalan berdampingan.

JG: Untuk mempertahankan demokrasi dalam kapitalisme global, Anda menekankan perlunya ekonomi nasional yang kokoh. Dalam pemahaman Anda, apa yang diperlukan untuk menjembatani penguatan negara dengan ketimpangan global yang dijaga lewat kewargaan?

RK: Saya kira, ekonomi yang adil perlu pertama-tama berwatak nasional karena kewarganegaraan yang demokratis berwatak nasional. Namun, warga dari negara-negara kaya yang mengkonsumsi jauh lebih banyak sumber daya dunia juga memiliki tanggung jawab untuk bekerja bagi keberlanjutan lingkungan serta kesetaraan ekonomi global. *Laissez faire* merupakan satu cara untuk menyetarakan pendapatan global, namun hal ini dilakukan dengan meningkatkan ketimpangan politik dan ekonomi dalam negara-negara, dan karenanya melemahkan demokrasi, dan juga gagal menyikapi bencana iklim. Sebagaimana pengamatan Nicholas Stern yang terkenal, perubahan iklim global merupakan contoh sejarah paling besar dari kegagalan pasar. Kita mencapai

keadilan iklim dan kesetaraan global yang lebih baik dengan membatasi *laissez faire*, bukan dengan membebaskannya.

JG: Di era yang secara signifikan dibentuk oleh migrasi dan pengungsian, konsep kewarganegaraan dengan ketimpangan inherennya tidaklah tanpa kontradiksinya. Bagaimana Anda melihat tuntutan seperti melepaskan hak demokratis dari status kewarganegaraan?

RK: Ya, ini rumit. Jika Anda hendak memiliki demokrasi, hal ini pasti membawa serta dengannya isu keanggotaan. Anggota dari sebuah demokrasi ialah warga negara. Kendati demikian, sebuah demokrasi yang memadai memperluas hak asasi manusia bagi insan yang bukan warga negaranya, kendati mereka tidak bisa menggunakan hak pilih. Dan meskipun insan non-warga negara dianggap sebagai orang asing, tidak boleh ada yang dianggap sebagai orang asing dalam hal hak asasi manusia. Itulah gunanya perjanjian mendasar dan konvensi hak asasi manusia. Secara umum, demokrasi yang lebih kokoh seperti di negara-negara Skandinavia cenderung lebih mendukung hak-hak dasar universal bahkan bagi orang-orang yang bukan warga negaranya..

Akan tetapi, perjanjian dan konvensi hanya baik sepanjang diterima dan ditegakkan oleh negara-negara yang menyepakatinya. Konvensi tahun 1951 tentang pengungsi, yang ditandatangani dan diratifikasi oleh 145 negara, menuntut negara-negara untuk menerima peminta suaka yang memiliki ketakutan yang sangat beralasan terhadap persekusi. Konvensi ini juga memberikan para pengungsi akses ke pengadilan. Namun, baik ketentuan eksplisit maupun niat yang lebih luas dari konvensi ini diabaikan atau ditolak secara luas, manakala negara-negara yang bermusuhan terhadap imigran dan pengungsi menciptakan perbedaan antara pengungsi ekonomi dan politik, dan menyengsarakan mereka yang mencari suaka. Sikap menghindar serupa banyak dilakukan untuk menampik hak asasi manusia buruh yang dielaborasi dalam konvensi-konvensi International Labor Organization, yang juga telah disepakati oleh setiap negara besar.

JG: Pandemi COVID-19 dan dampak ekonomi, sosial, serta politik yang mengikutinya tampaknya berkontribusi terhadap krisis mendalam yang terus berlangsung di banyak negara. Dalam pandangan Anda, apakah risiko yang dimunculkan terhadap hubungan antara kapitalisme dan demokrasi?

RK: Pandemi membuktikan dibutuhkannya pemerintahan yang efektif dan ketidakmampuan pasar swasta untuk mengatasi krisis kesehatan masyarakat. Rezim vaksin dan tes merupakan barang publik. Negara-negara dengan pemerintahan nasional yang efektif telah melakukan yang terbaik untuk mencegah penyebaran virus. Mereka melakukannya lewat kolaborasi dengan WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) dan organisasi-organisasi non-pemerintah, namun yang memimpinya tetap pemerintahan. Jika Donald Trump adalah seorang neofasis yang kompeten, ia mungkin sudah memperlihatkan kecakapan sebagai seseorang yang berkeinginan menjadi diktator. Namun, ia terbukti tidak kompeten dan juga korup, sehingga itu memperlihatkan dibutuhkannya pemerintahan yang efektif dan akuntabel secara demokratis dan tidak hanya kuat. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Robert Kuttner <kuttner@prospect.org>

› Migrasi Iklim di Asia Selatan

oleh **Md. Rezwan Siddiqui**, Universitas East West, Bangladesh



Suatu gejala iklim di Mongolia yang dinamakan 'dzud,' menggambarkan musim dingin yang ekstrem, semakin lama makin sering terjadi. Khususnya bila dikombinasikan dengan musim panas yang sangat kering hal tersebut mengakibatkan kematian sejumlah besar ternak yang merupakan sumber bahan makanan penduduk. Kredit: Asian Development Bank/ flickr.com. Hak tertentu dilindungi.

Asia Selatan (terdiri atas Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Pakistan, Nepal, Maladewa, India, dan Sri Lanka), dengan perkiraan jumlah penduduk 1,836 miliar (hampir seperempat dari populasi global) adalah salah satu kawasan terpadat di dunia. Dengan ekonomi yang berkembang pesat, indeks pembangunan manusia yang terus meningkat, dan urbanisasi yang cepat, Asia Selatan telah menjadi garis depan terbaru dari pergulatan dalam pembangunan global.

Migrasi selalu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Asia Selatan. Tidak diragukan lagi, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata merupakan pendorong utama mobilitas di Asia Selatan. Namun demikian, pengaruh faktor lingkungan juga selalu menonjol. Bukti kecenderungan masyarakat untuk berpindah (sementara/musiman/permanen) untuk mengurangi risiko berulangnya bencana alam dan krisis agraria sudah lazim sejak naratif masa prasejarah. Jenis perilaku mobilitas yang dominan di Asia Selatan adalah migrasi internal (terutama dari pedesaan ke perkotaan). Mobilitas internasional juga tidak jarang, terutama dalam beberapa dekade terakhir, dengan pertumbuhan yang substansial dalam arus keluar migran tahunan (kebanyakan migrasi ekonomi/tenaga kerja) dari wilayah ini. Mobilitas transnasional antar negara Asia Selatan juga menonjol karena kesamaan sejarah jangka panjang, kesamaan gaya hidup sosial-budaya dan ekonomi, serta kaburnya batasan antarnegara.

Pada hakekatnya, kerentanan perubahan iklim di Asia Selatan utamanya bukan disebabkan oleh kerentanan biofisik (perubahan parameter iklim dan rangkaian cuaca ekstrem yang diakibatkannya) melainkan lebih karena kerentanan sosial dan ekonomi (kondisi sosio-ekonomi yang buruk, tingkat kemiskinan yang tinggi, ketergantungan tinggi pada pertanian, infrastruktur yang tidak memadai, pemerintahan yang lemah, dsb.) pada masyarakatnya. Menurut *Global Report on Internal Displacement 2020*, pada tahun 2019 sekitar 9,5 juta orang di Asia Selatan mengungsi akibat bencana alam (banjir, hujan musiman, dan angin topan). Sudah ada cukup bukti bahwa intensitas, frekuensi, dan dampak dari semua bahaya ini diperkuat oleh perubahan iklim. Menurut Bank Dunia, dapat terjadi peningkatan sebesar 18-40 juta migran iklim pada tahun 2050, tergantung pada upaya untuk mengatasi masalah tersebut.

Ada beberapa karakteristik unik dari migrasi perubahan iklim di Asia Selatan. Pertama, perubahan iklim bukanlah alasan utama migrasi di Asia Selatan, namun berkelindan dengan kerentanan sosial-ekonomi lainnya yang secara substansial memperburuk risiko migrasi. Bukti-bukti bermunculan bahwa perubahan iklim telah menafikan kesejahteraan ekonomi melalui gangguan keamanan sosial dan mata pencaharian. Selain itu, perubahan iklim telah secara langsung mempengaruhi jasa ekosistem, ketahanan pangan, kesehatan manusia, serta berdampak pada kapasitas pertanian dan mata pencaharian subsisten di seluruh Asia Selatan.



Di Asia topan semakin sering terjadi, menghancurkan mata pencaharian rakyat. Kredit: Asian Development Bank/flickr.com. Hak tertentu dilindungi.

Kedua, kita perlu memahami bahwa sebagian besar migrasi internal di Asia Selatan disebabkan oleh alasan ekonomi, sedangkan sebagian besar migrasi transnasional dan internasional disebabkan oleh pengaruh faktor politik dan ekonomi yang beragam. Perubahan iklim memperburuk faktor-faktor ini secara langsung dan tidak langsung.

Ketiga, dalam banyak kasus, tidak mudah membedakan migran iklim dengan jenis migran yang lain. Upaya telah dilakukan, tetapi tidak berhasil! Terdapat beragam pola perilaku mobilitas di seluruh Asia Selatan, yang diadopsi oleh individu atau komunitas untuk meminimalkan dampak perubahan iklim (dan ancaman lainnya) pada kehidupan dan mata pencaharian mereka. Tidak mungkin menempatkan semuanya dalam satu kerangka. Oleh karena itu, mungkin lebih tepat membangun kerangka migrasi iklim dalam hubungannya dengan migrasi ekonomi-politik dan mempelajari peran dampak langsung dan tidak langsung dari perubahan iklim pada perilaku mobilitas (apapun).

Keempat, data tentang interaksi antara perubahan iklim dan pendorong migrasi di Asia Selatan sangat terbatas, sehingga pasti menghasilkan pembuatan kebijakan dan manajemen migrasi yang buruk. Selain itu, interaksi antara perubahan iklim dengan faktor-faktor migrasi lain (politik, ekonomi, atau sosial) masih belum sepenuhnya dipahami, terutama pada skala mikro.

Kelima, di Asia Selatan, perubahan iklim sebagian besar menyebabkan migrasi internal. Migrasi ini seringkali dimulai sebagai mobilitas sementara atau musiman, dan kemudian menghasilkan migrasi permanen. Mayoritas migran berangkat ke daerah perkotaan, dan seringkali mengikuti pola jaringan migrasi serta pola migrasi berjenjang tersebut.

Keenam, migrasi iklim transnasional telah menjadi masalah yang diperdebatkan secara regional. Tidak ada konsensus di antara negara-negara dan pemerintahnya mengenai sifat, pola, dan masa depannya. Yang semakin memperumit masalah ini, kita dapat melihat bahwa di kawasan ini hal tersebut telah menjadi isu yang sangat dipolitisasi serta suatu masalah keamanan (yang dilebih-lebihkan).

Ketujuh, negara-negara di kawasan ini merupakan salah

satu sumber utama tenaga kerja murah bagi banyak negara ekonomi maju, yang sebagian besar dikelola melalui perjanjian bilateral. Sayangnya, persaingan yang ketat di antara negara-negara tersebut terjadi di sektor ini. Terkadang migrasi tenaga kerja yang dihasilkan disebut-sebut sebagai salah satu proses adaptasi migran iklim—suatu hal yang sering diragukan kebenarannya.

Kedelapan, hasil keputusan mobilitas (dan imobilitas) sangat bergantung pada kapasitas migran dan masyarakat tempat mereka bermigrasi. Kapasitas masyarakat (terutama kota) dalam menampung migrasi iklim sejauh ini belum banyak meningkat. Migran lingkungan dan iklim masih dipaksa untuk hidup dan bertahan hidup di wilayah pinggiran masyarakat.

Kesembilan, rezim kebijakan migrasi di negara-negara Asia Selatan sebagian besar ditujukan untuk mencegah mobilitas yang disebabkan oleh perubahan iklim, untuk mengelola sumber daya dan sektor jasa di wilayah tujuan migrasi (perkotaan) yang sebelumnya telah terkendala. Sangat sedikit upaya yang ditujukan untuk pengembangan kapasitas para migran ini, dan untuk mengakomodasi proses migrasi dengan lebih baik. Baru-baru ini, India dan Bangladesh telah mengambil inisiatif untuk mengembangkan kota-kota sekunder sebagai kota yang ramah migran. Namun, kebijakan-kebijakan ini seringkali dianggap tidak efektif karena kegagalan untuk menangani keadilan sosial dan tidak adanya perencanaan pembangunan yang berpusat pada manusia. Pola pikir tradisional para elite dan merajalelanya korupsi tetap merupakan hambatan signifikan bagi keberhasilan upaya ini.

Sayangnya, hanya terdapat sedikit kerja sama yang berfaedah di antara negara-negara Asia Selatan terkait pengelolaan isu-isu ini. Upaya sebagian besar terbatas pada bidang akademik dan penelitian dan tidak tercermin dalam perencanaan pembangunan. Inisiatif untuk mengatasi masalah kelangkaan data melalui sensus nasional yang komprehensif juga tidak memadai. Tanpa upaya untuk mengidentifikasi migran iklim serta untuk mengatasi masalah ini melalui kebijakan negara dan regional, tidak banyak harapan yang tersisa bagi kita. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Md. Rezwan Siddiqui <rezsaid@ewubd.edu>

› Krisis Iklim dan Masalah Demokrasi

oleh **Markus Wissen**, Sekolah Ekonomi dan Hukum Berlin, Jerman

Jika kita berpikir tentang krisis iklim, kebijakan iklim, dan demokrasi liberal, pertama-tama, kita melihat ada ketegangan yang mencolok, yaitu: upaya memerangi krisis iklim melalui kebijakan iklim yang efektif tampaknya cukup sulit dalam kondisi demokrasi liberal. Hal ini dipertegas oleh dampak buruk dari perjanjian internasional, yang (kebanyakan) disepakati oleh negara-negara demokrasi liberal dalam beberapa dekade terakhir. Protokol Kyoto 1997 tidak membantu menghentikan peningkatan emisi karbon global, dan keraguan banyak pihak terhadap Perjanjian Paris (2015) untuk berkomitmen pada upaya yang lebih ambisius menjadi alasan untuk kurang meyakini kebijakan iklim masa depan yang lebih efektif. Selain itu, jika kita memperhitungkan negara-negara otoriter seperti Tiongkok, meskipun menghadapi masalah lingkungan yang besar dan model pembangunan yang intensif karbon, tampaknya justru mampu mendesak program-program lingkungan dan energi terbarukan yang besar. Oleh karenanya pertanyaannya adalah apakah demokrasi liberal memang memiliki kelengkapan yang memadai untuk mengatasi salah satu masalah paling mendesak umat manusia.

› Demokrasi liberal dan kapitalisme—suatu afinitas struktural

Akar dari ketegangan historis dan empiris antara krisis iklim, kebijakan iklim, dan demokrasi liberal merupakan masalah yang lebih sistematis. Esensi dari demokrasi adalah kesetaraan. Demokrasi liberal memberikan kesetaraan bagi semua warga negara di bidang politik: Suara yang diberikan seorang pekerja dalam pemilihan umum dihitung sebanyak suara dari seorang CEO, dan orang tersebut sebagai subyek hukum tidak memiliki hak istimewa apa pun dibandingkan dengan yang lain. Tak diragukan lagi, ini merupakan pencapaian bersejarah.

Tapi itu hanya satu sisi mata uang. Sisi lain adalah fakta bahwa demokrasi liberal secara sistematis mengisolasi pusat-pusat kekuasaan masyarakat dari partisipasi yang setara. Keputusan-keputusan kewirausahaan bersifat privat, hanya kondisi-kondisi kerangka kerja di mana keputusan tersebut diambil yang dapat dipengaruhi secara publik. Di luar ini, para pemangku kepentingan, yaitu semua yang

terkena dampak keputusan—pekerja, masyarakat di sekitar pabrik, masyarakat luas—, tidak memiliki peluang untuk berpartisipasi secara setara dalam proses pengambilan keputusan.

Di sinilah afinitas struktural antara demokrasi liberal dan kapitalisme menjadi terlihat. Negara kapitalis demokrasi liberal melindungi hak-hak sipil dan politik serta properti privat; negara menjamin kesetaraan dalam bidang politik dan pada saat yang sama bersikap netral berhadapan dengan ketidaksetaraan sosial-ekonomi mendasar yang berangkat dari fakta bahwa sebagian kecil orang berusaha melalui alat produksinya sedangkan mayoritas tidak memiliki apa-apa untuk dijual selain tenaga kerja mereka.

Pertentangan antara kesetaraan ekstra-ekonomi dan ketidaksetaraan ekonomi ditentukan oleh perjuangan-perjuangan yang ajek. Di masa lalu, perjuangan-perjuangan ini telah menghasilkan beberapa perluasan demokrasi liberal di Utara Global, seperti: Perempuan berhasil memperjuangkan hak pilih dan peran negara yang lebih kuat dalam reproduksi sosial; gerakan lingkungan [juga] telah berhasil memperjuangkan pembatasan pada produk-produk dan proses produksi yang berbahaya; para migran telah memperjuangkan perluasan hak kewarganegaraan; dan perjuangan gerakan buruh telah menghasilkan kompromi kelas yang pada dasarnya berupa penerimaan pekerja atas peran subaltern mereka dalam mode produksi kapitalis sebagai imbalan atas partisipasi dalam peningkatan kesejahteraan yang difasilitasi oleh kapitalis. Inilah yang dimaksud dengan demokrasi sosial, yaitu: perluasan demokrasi liberal ke arah negara kesejahteraan yang tidak menantang ketidaksetaraan konstitutif masyarakat kapitalis tetapi membantu mengatur kontradiksi-kontradiksinya.

› Demokrasi karbon

Dari perspektif lingkungan, masalahnya adalah bahwa demokrasi liberal yang secara sosial diperluas selalu menjadi *demokrasi karbon* (Timothy Mitchell), dalam arti ganda: Pertama, hak-hak sosial yang telah dilembagakan selama abad kedua puluh tidak sedikit diperoleh dari perjuangan kaum pekerja di pertambangan batubara dan infrastruktur transportasi yang terkait dengan pertambangan batubara,

“Kebijakan-kebijakan iklim yang efektif pasti akan gagal sepanjang batasan sistemik untuk mengatasi krisis iklim dalam kondisi demokrasi liberal dan kapitalis tidak diakui”

yaitu di sektor-sektor yang merusak lingkungan hidup yang bagaimanapun juga penting bagi semua jenis kegiatan ekonomi dan sosial, sehingga para pekerja dilepaskan dari kekuasaan struktural yang signifikan. Kedua, lembaga redistributif negara kesejahteraan dirancang sedemikian rupa sehingga mereka bergantung pada pertumbuhan ekonomi intensif karbon.

Ini merupakan kontradiksi lingkungan yang mendasar dari demokrasi liberal sebagai bentuk politik dari kapitalisme. Kendala-kendala dalam memaksimalkan keuntungan ekonomi dan mengatur kontradiksi-kontradiksi masyarakat yang mendasar pasti menghasilkan biaya-biaya sosio-ekologis yang sekarang akan menghasilkan krisis eksistensial. Kebijakan-kebijakan iklim yang efektif pasti akan gagal sepanjang batasan sistemik untuk mengatasi krisis iklim dalam kondisi demokrasi liberal dan kapitalis tidak diakui.

Mengakui hal-hal tersebut tidak berarti kembali ke solusi otoriter. Meskipun solusi itu mungkin menyiratkan kemampuan memaksakan dan mengakselerasi langkah-langkah pelestarian lingkungan tertentu dalam jangka pendek, hal-hal tersebut kurang memiliki reflektivitas yang diperlukan untuk meraih keberhasilan dalam jangka panjang.

› Demokrasi radikal

Reflektivitas mensyaratkan adanya musyawarah, dan musyawarah hanya mungkin dalam kondisi demokratis. Dengan demikian, melawan krisis iklim tidak hanya membutuhkan lebih sedikit tetapi lebih banyak demokrasi. *Demokrasi liberal* harus didorong melampaui batas-batas yang sudah menjadi wataknya. Pencapaian-pencapaiannya yang justru saat ini sedang diserang dengan keras oleh kaum kanan otoriter harus diselamatkan dengan mentransformasikan demokrasi liberal menjadi demokrasi

radikal. Ini menyiratkan bahwa semua orang yang dipengaruhi oleh suatu keputusan memiliki hak untuk berpartisipasi secara setara dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, kemungkinan keputusan reflektif lingkungan akan meningkat, karena mereka yang memutuskan adalah juga mereka yang menanggung konsekuensi keputusan tersebut. Lebih jauh lagi, demokrasi radikal berarti menciptakan institusi-institusi dan prosedur-prosedur yang secara positif akan mendukung bentuk-bentuk perilaku solidaristik dan dengan demikian mendukung pembelajaran demokratis dan proses subjektivasi yang dapat membantu mengatasi subjektivitas kapitalis yang [cenderung] memaksimalkan utilitas.

Titik masuk konkret untuk demokrasi radikal bisa jadi adalah apa yang disebut dengan *ekonomi dasar* atau *sosialisme infrastruktur*. Ini adalah tentang upaya memikirkan kembali dan mengarahkan kembali ekonomi dari sudut pandang produksi dan layanan yang bermanfaat secara sosial dan lingkungan, seperti pekerjaan perawatan yang menjadi sandaran kita semua dan infrastruktur pendukung kehidupan di berbagai bidang seperti kesehatan, makanan, mobilitas, budaya, komunikasi, air, dan listrik. Ada banyak pengalaman membawa infrastruktur dalam kendali publik—sebuah pengalaman yang dirugikan akibat serangan-serangan neoliberal dalam beberapa dekade terakhir tetapi di banyak tempat tampaknya bangkit kembali pada masa krisis korona. Hal itu harus berjalan seiring dengan upaya mengatasi pembagian kerja berdasarkan gender. Dan itu bisa diperluas ke wilayah-wilayah yang lebih jauh yang masih dijalankan oleh korporasi-korporasi besar, tetapi harus berada di bawah kendali demokratis untuk mencegah mereka lebih memperburuk krisis iklim. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Markus Wissen
<markus.wissen@hwr-berlin.de>

› Setelah Kapitalisme: Eko-Sosialisme Demokratis?

oleh **Vishwas Satgar**, Universitas Witwatersrand, Afrika Selatan dan anggota Komite Penelitian ISA mengenai Ekonomi dan Masyarakat (RC02) dan Gerakan Perburuhan (RC44)



Suatu demonstrasi #FridaysForFuture diadakan pada tanggal 29 November 2019 di luar Bursa Saham Johannesburg di Afrika Selatan. Kredit: Vishwas Satgar.

Di dunia kehidupan kapitalisme masa kini yang berpusat pada karbon, mobil yang boros bensin, pesawat terbang berteknologi tinggi, kapal kontainer masif, dan gedung pencakar langit yang memanfaatkan energi merupakan senjata-senjata pemusnah massal. Semakin menyebar hubungan sosial yang bersumber daya intensif dan berpusat pada karbon, semakin lebih cepat perubahan iklim terjadi. Setelah merusak sistem bumi, alam kapitalis yang baru ini—di bawah domestifikasi patriarkis, yang diamati dan dikelola secara ilmiah—sekarang harus menjalani rekayasa geoteknik, dan emisi karbon harus disimpan di celah-celah yang dalam di planet Bumi; meskipun membawa konsekuensi tidak terkendali bagi kehidupan di planet ini, saluran minyak hanya akan ditutup jika dolar terakhir telah diekstraksi dari sumber daya maut ini. Logika kapitalisme masa kini bukanlah sekadar masalah perampasan, melainkan menyangkut ekosida, yaitu pembinasaan kondisi-kondisi yang diperlukan untuk keberlanjutan kehidupan manusia dan non-manusia di planet Bumi. Inilah apa yang oleh Karl Marx dinamakan “keretakan metabolis dari kapitalisme” dan, oleh Rosa Luxemburg disebut dengan, “penaklukan ekonomi alamiah.”

› Akhir neoliberalisme

Cita-cita neoliberalisme telah menegaskan keberadaan-

nya pada ujung sejarahnya. Hak milik telah menebarkan benih-benih kedaulatan modal, para plutokrat yang rakus memegang kekuasaan negara dengan cara yang paling kasar, dan individualism berlebihan yang diagung-agungkan melalui Amerikanisasi konsumsi dan media populis menegaskan kepalsuan budaya selebritas. Penentuan diri sebagai subyek kapitalis yang berciri Amerikanisasi dan nihilistik merupakan satu-satunya ekspresi manusiawi dalam peradaban kapitalis neoliberal masa kini. Namun, ini pun masih belum cukup. Langkah berikutnya bersifat lintas manusiawi: visi teknotopia mengenai modal bio dan digital. Setelah merangkul ketidaksetaraan struktural selama berpuluh-puluh tahun, dunia utopia kapitalis neoliberal tidak lagi memiliki kebersamaan tujuan dengan kemanusiaan. Ini bahkan menjadi lebih jelas karena tiadanya musuh: Sosialisme Soviet telah mati, kelas pekerja telah mengalami prekariatisasi, alam telah ditundukkan, dan sejarah telah berakhir. Sudah tidak ada lagi momok apapun yang dapat dituding. Namun pewaris baru tatanan neoliberal ini yang berciri sayap kanan, neo-fasis—dari Washington, Brasilia, New Delhi, Budapest sampai Moskow—justu siap untuk menghancurkan secara bengis tiap tantangan terhadap utopia ini, sambil menyesatkan publik dengan berbagai kambing hitam—seperti para migran, orang Kulit Hitam, orang “Muslim,” warga masyarakat adat, atau tiap “ancaman terror” yang dibesar-besarkan.

Rezim-rezim ini cenderung menerapkan kekerasan otoriter dan militer manakala mereka berupaya mempertahankan kenormalan kapitalisme dengan cara apapun. Namun sejarah dan perjuangan telah memperlihatkan bahwa rezim-rezim otoriter tidak dapat berlanjut. Monopoli atas kekerasan tidak pernah menjadi jaminan bagi perdamaian. Bahkan militer AS menyadari bahwa mereka tidak dapat mengendalikan suatu dunia yang mengalami kekacauan iklim, sementara AS sendiri dilanda guncangan-guncangan iklim. Perang memerlukan sumber daya langka dan mahal, meskipun perubahan iklim akan membawa pilihan-pilihan sukar bagi masyarakat. Militerisme di era senjata nuklir juga mempunyai kendala-kendalanya. Tata kelola yang hegemonis berupa ketidakadilan yang brutal sudah berlebihan, sementara rakyat (*the demos*) gelisah dan putus asa. COVID-19 telah memperparah penderitaan. Pada waktu yang bersamaan, subyek demokratis memiliki suatu pandangan yang berspektrum penuh, dengan berbagai sumber informasi digital yang memungkinkan akses mudah ke informasi mengenai kondisi sosio-ekologis. Subyek semacam itu bahkan dapat dari kejauhan mengagumi kebodohan kekuasaan imperial, mengamati kecanggungan para otokrat, dan memperoleh pandangan sekilas mengenai tuntutan kekuatan jalanan subaltern yang menginspirasi. Dengan kata lain, sementara kapitalisme akan memanfaatkan pilihan neo-fasis, dan bahkan menggunakan ranah digital sebagai senjata, tirai besi penindasan absolut bukannya tidak rawan. Pada persimpangan inilah demokrasi dan sosialisme akan berkembang.

› Ekosida sebagai tahap akhir kapitalisme

Teror yang sesungguhnya terdapat pada momen kini dalam sejarah sebenarnya bukanlah neo-fasisme kapitalis melainkan kekuasaan besar (*juggernaut*) berupa ekosida kapitalis yang mengancam bukan saja kondisi kehidupan di planet melainkan kapitalisme itu sendiri. Ini menjadikan kedatangan fasisme kedua suatu hal yang anakronistik. Adalah hal yang mengerikan memperhatikan kapital karbon melanggengkan kehadirannya dalam perpaduan energi global, walaupun ilmu tentang iklim telah membunyikan lonceng tanda bahaya, permintaan selama COVID-19 mengalami penurunan, dan sekurang-kurangnya satu guncangan besar pada iklim terjadi tiap minggu di planet Bumi. Trump telah mengizinkan lebih banyak ekstraksi karbon di AS, menempatkannya di tempat teratas dalam daftar suplai, dan Bolsonaro mendukung kepentingan-kepentingan komersial yang melanjutkan kekerasan bersifat genosida terhadap masyarakat adat, menghancurkan keanekaragaman hayati, dan mempercepat dilepaskannya sekitar 140 milyar ton karbon dari Amazon melalui perampasan tebang-bakar. Di Afrika Selatan, kelas penguasa karbon sedang membangun pembangkit listrik tenaga batu bara

terbesar di dunia, *fracking*, dan tergiur dengan prospek ekstraksi gas dan minyak lepas pantai. Contoh-contoh mengenai kejahatan karbon ini menegaskan bahwa kapitalisme dan kelas-kelas penguasa karbonnya mengancam semua termasuk diri mereka sendiri, laksana [berjalannya] jam kiamat.

Logika kapitalisme ekosida yang menghancurkan diri sendiri sekarang sudah jelas. Afrika, yang merupakan subyek imperial di Utara Global sejak konperensi Berlin, telah terperangkap oleh kepentingan para lumpenborjuis, dan sudah mulai rusak sebagian-sebagiannya akibat guncangan-guncangan iklim. Menurut estimasi sekurang-kurangnya 200 juta orang Afrika akan tergusur oleh guncangan dan kekacauan iklim. “Benteng Eropa” dan “Kompleks Penjara AS” tidak akan mampu mencegah masuknya “orang-orang barbar” karena, meskipun kaya, masyarakat-masyarakat tersebut juga akan menghadapi keretakan internal serius akibat guncangan-guncangan iklim. Gerakan The Sunrise, Extinction Rebellion, dan #FridaysForFuture hanyalah merupakan gerakan-gerakan 1 derajat Celcius. Pada 1,5 derajat akan bangkit lebih banyak lagi di masyarakat-masyarakat ini di kala rakyat menolak diperlakukan sebagai korban salah sasaran (*collateral damage*) oleh kelas-kelas berkuasa eko-fasis yang tidak rasional.

› Ke arah eko-sosialisme demokratis

Tiga bentuk disrupsi keadilan iklim yang mengekspresikan harapan hidup banyak orang sedang mendapat perhatian. Ekspresi harapan hidup seperti itu menghasilkan konvergensi bagi kekuatan-kekuatan keadilan iklim, bersama anak-anak dan para warga negara. [Tiga bentuk disrupsi itu adalah sebagai berikut:] Pertama adalah disrupsi simbolis terhadap kenormalan. Contoh terbaik mengenai hal ini ialah Greta Thunberg dan tindakan protes #FridaysForFuture oleh anak-anak. Lonceng alarm yang didentangkan oleh anak-anak tersebut memperkuat urgensi dalam ilmu iklim dan timbal-balik. Kedua ialah disrupsi taktis dengan cara memacetkan karbon, termasuk sirkuit ekstraksi bahan bakar fosil. Seruan untuk memboikot MacDonald, Walmart, dan Subway karena mereka memiliki saham dalam pertanian tebang-bakar (*slash-and-burn*) di Amazon, atau upaya Ende Gelände untuk memblokir batu bara di Jerman merupakan contoh. Ketiga ialah disrupsi strategis terhadap kapitalisme ekosida melalui alternatif-alternatif sistemik seperti Green New Deals (GND) [rancangan undang-undang AS untuk mengatasi perubahan iklim dan ketidaksetaraan ekonomi] yang mendorong dekarbonisasi cepat, demiliterisasi, reformasi sistem demokrasi dari bawah yang memberdayakan kekuatan rakyat untuk mendorong transisi yang adil,

dan geopolitik keadilan iklim. GND yang digagas Bernie Sanders dan Climate Justice Charter di Afrika Selatan dengan konsepsinya mengenai suatu proyek politik merupakan contoh. Pada akhirnya, kekuatan-kekuatan ini juga akan bertugas untuk mengkonfrontasi logika ekosida dari kekuasaan imperial untuk menjamin agar Selatan Global dapat membuat pilihan keadilan iklimnya sendiri, termasuk perubahan sistemis mendalam yang memajukan eko-sosialisme demokratis.

Suatu reformasi demokratis yang sistemik yang harus lebih diglobalisasikan dari posisinya di pinggiran ialah “re-agrarisasi” dunia melalui kedaulatan pangan dan agro-ekologi. Dengan gagasan yang prakarsai oleh La Via Campesina sekitar dua dekade yang lalu itu, tiap komunitas, desa, kota, kotamadya di seluruh planet ini harus menyambut alternatif eko-sosialis yang demokratis seperti itu. Hal ini telah digarisbawahi oleh laporan keanekaragaman hayati baru-baru ini oleh International Panel on Biodiversity and Ecosystem Services dan laporan peruntukan lahan oleh International Panel on Climate Change. Intinya adalah bahwa sistem-sistem pangan yang mono-industri, karbon-centris, dan terglobalisasi terlibat dalam kepunahan kita.

Pada akhirnya, cakrawala ekologis dari sosialisme masa kini akan ditentukan oleh bencana biologis (seperti COVID-19), pemanasan global, guncangan iklim, ketidaksetaraan yang semakin buruk, dan dorongan-dorongan manusia untuk hidup. Air, tanah, keanekaragaman hayati, dan biosfer—*global commons* (kekayaan alam di luar yuridiksi nasional yang dapat diakses semua negara)—kesemuanya akan terlibat dalam pembalasan alam terhadap ekosida kapitalis. Ketidakterbatasan alam dan keterbatasan kemauan manusia akan menentukan periode berikut dari sejarah sosio-ekologi. Pada pertemuan inilah eko-sosialisme demokratis akan belajar secara lebih mendalam dari tradisi bumi asli untuk memajukan kehidupan, menolak produktivisme, dan menegaskan suatu hubungan tanpa alienasi dengan alam. Inilah apa yang dinamakan Marx suatu “humanisme positif.” Suatu dunia yang lambat, yang beroperasi dalam siklus metabolis dari alam, adalah satu-satunya harapan kita. Dunia semacam itu belum pernah mati melainkan hanya didorong ke bayangan oleh kekerasan kolonial, neoliberal, dan imperial. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Vishwas Satgar
<Vishwas.Satgar@wits.ac.za>

› Bagaimana Aksi Iklim Perkotaan Dapat Membangun Kembali Komunitas

oleh **Joan Fitzgerald**, Universitas Northeastern, AS



Ny. Margaret Gordon, pada suatu rapat umum the West Oakland Environmental Indicators Project pada bulan Juni 2016. Foto: Brooke Anderson. Kredit: West Oakland Environmental Indicators Project.

Pandemi COVID-19 telah mengungkapkan dua visi kota. Salah satunya adalah kota-kota yang tidak adil secara ras dan etnis yang merupakan kenyataan saat ini. Di kota-kota AS dan Eropa, angka kematian akibat COVID-19 lebih tinggi di daerah berpenghasilan rendah dan komunitas kulit berwarna. Karena mereka tinggal di lingkungan warga yang cenderung sangat tercemar. Orang Kulit Hitam dan Latin di AS lebih rentan terhadap asma dan kondisi terkait yang membuat mereka lebih rentan terhadap virus tersebut. Mereka lebih cenderung memiliki pekerjaan berpenghasilan rendah yang membuat mereka tidak terlindungi dari virus. Pemukiman yang berpenghuni padat tidak memungkinkan adanya penjarakan (*distancing*) di rumah. Dan lingkungan warga mereka sering tidak memiliki fasilitas dasar seperti taman dan toko sayuran.

Namun krisis tersebut juga telah mengungkapkan suatu peluang: pemulihan hijau dan adil yang menggabungkan aksi iklim dengan keadilan ras dan ekonomi. Mempromosikan visi tersebut untuk komunitas garis depan kami—lingkungan warga yang mengalami efek pertama dan terburuk dari perubahan iklim—adalah suatu prioritas yang mendesak. Sebagian besar rencana aksi iklim kota tidak menyebutkan keadilan, atau hanya bersifat berbasu-basi. Tetapi kelompok-kelompok aktivis

di seluruh Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa semakin sering menekan pemerintah kota untuk fokus pada keadilan iklim terlebih dahulu.

› Perencanaan Demokratis

Perencanaan merupakan inti dari kegiatan ini. Di begitu banyak kota, terutama di AS, perencanaan didorong oleh pengembang swasta dan pemain komersial. Capaian yang lebih demokratis membutuhkan perencanaan yang lebih demokratis.

Austin, Madrid, Seattle, Oakland, Portland, Providence, dan Wina termasuk di antara kota-kota yang baru-baru ini memperbarui aksi iklim mereka atau rencana komprehensif dengan proses yang dipikirkan dengan baik bagi partisipasi warga komunitas garis depan. Dalam kasus-kasus yang terbaik, kelompok warga ikut menciptakan tujuan bersama para pejabat kota, menganalisis tujuan melalui suatu lensa keadilan, dan terlibat dalam implementasi.

Rencana-rencana ini membantu pembangunan keberlanjutan sosial, lingkungan, dan ekonomi di lingkungan warga garis depan. Salah satu elemen pertama dari Providence Climate

Justice Plan yang akan dilaksanakan adalah penciptaan dua zona keadilan hijau untuk tindakan prioritas, Olneyville dan South Providence. Di antara proyek-proyek potensial di zona tersebut adalah membangun *microgrid* [perangkat sumber energi terbarukan] di fasilitas-fasilitas utama untuk menjaga daya ketika pemadaman terjadi, *weatherization* [perlindungan bangunan terhadap alam], pengembangan energi terbarukan, pelatihan kerja, dan reformasi zonasi untuk mencegah pencemaran peruntukan lahan.

› Keadilan Hijau

Zona keadilan hijau menggabungkan tujuan iklim dengan tujuan keadilan sosial. Idenya adalah untuk menggabungkan dan mengintegrasikan semua aspek agenda iklim dan keadilan sosial dengan cara yang melibatkan warga dalam pengembangan komunitas. Hal tersebut mungkin mencakup energi terbarukan, *retrofitting* [penambahan perangkat baru] mendalam, menciptakan ruang komunitas, menciptakan peluang kerja, sekolah baru dengan *zero net energy* [energi yang dikonsumsi setara dengan energi terbarukan yang dihasilkan], taman yang baru atau dikembangkan kembali, jalan-jalan lengkap, atap hijau, dan lebih banyak pohon untuk mengatasi *urban heat island effect* [kawasan dengan suhu lebih tinggi daripada sekitarnya] dan mengelola air badai.

Oakland, California juga memfokuskan aksi di lingkungan warga termiskin dan telah mengintensifkan fokus tersebut dalam Rencana Aksi Iklim Berkeadilan 2030 yang diluncurkan pada Juli 2020. Panduan Penilaian & Implementasi Dampak Keadilan Rasial dari rencana ini menawarkan strategi-strategi untuk mengidentifikasi komunitas garis depan, bekerja dengan warga dan organisasi komunitas dalam implementasi, dan memantau hasil capaian keadilan.

Sebelum rencana ini, Oakland Barat sudah ditetapkan sebagai salah satu komunitas garis depan Oakland. Komunitas ini merupakan tuan rumah bagi tiga jalan bebas hambatan, pelabuhan, pabrik pengolahan air limbah, dan *peaker plant* [pusat energi yang hanya dioperasikan jika permintaan meningkat] bertenaga bahan bakar jet yang kesemuanya berkontribusi pada tingkat polusi tinggi, yang mengakibatkan tingginya tingkat asma, stroke, dan gagal jantung kongestif dan rentang hidup yang diperpendek. Ini sedang diprioritaskan untuk pengurangan karbon dalam dalam bangunan bersama dengan peralihan bahan bakar—mengganti kompor gas alam dan ruang dan pemanasan air dengan unit listrik.

Peralihan bahan bakar meningkatkan kualitas udara dalam ruangan dan mengurangi emisi dan dapat, dengan implementasi penuh, mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 18%. Peningkatan efisiensi energi bangunan akan menghasilkan pengurangan 12% lagi dan membantu mengurangi beban energi—disparitas yang didokumentasikan di mana keluarga berpenghasilan rendah menghabiskan proporsi pendapatan

rumah tangga yang lebih tinggi pada tagihan utilitas listrik dan gas alam.

› Ilmu Warga Negara

Bagian dari alasan mengapa kota ini efektif di Oakland Barat adalah karena kemitraan dengan kelompok keadilan lingkungan lama yang telah memberikan udara yang lebih bersih dan memiliki kepercayaan dari komunitas. Proyek Indikator Lingkungan West Oakland telah berfokus pada peningkatan kualitas udara di lingkungan tersebut sejak 2002. Mitra-pendiri [proyek], Ms. Margaret Gordon, mengingatkan bahwa perjuangan pertamanya adalah untuk mengalihkan truk-truk yang menyemburkan asap diesel ke lingkungan warga dalam perjalanan ke dan dari pelabuhan.

Sejak itu, Proyek Indikator telah bermitra dengan Environmental Defense Fund, Google, dan University of California, Berkeley dalam ilmu warga untuk memantau kualitas udara di lokasi yang sangat spesifik. Mereka tahu bahwa pemantauan udara negara bagian tidak menangkap *hot spots* [lokasi polusi tinggi]. Satu proyek meminta warga berdiri di sudut jalan untuk menghitung truk. Yang lain memberikan kepada penghuni panti usia lanjut monitor udara dan meminta kepada mereka untuk membuat catatan di buku harian pada waktu-waktu yang berbeda dalam sehari, dengan jendela terbuka atau tertutup untuk mengetahui kapan tingkat polusi tertinggi. Di proyek lain warga menerima pelatihan dari Intel untuk mengunduh data dari monitor udara yang disimpan di ransel mereka. Setelah sumber-sumber spesifik polusi diidentifikasi, mereka dapat kembali ke negara bagian dengan bukti bahwa upaya pencegahan dan pembersihan polusi harus ditingkatkan.

Dengan semua upaya ini, apakah kualitas udara telah meningkat? Ms. Margaret Gordon mengatakan bahwa pinggir-an jendelanya biasanya menjadi hitam jelaga, tapi sekarang menjadi abu-abu gelap. Jelas bahwa harus dilakukan lebih banyak pengurangan polusi dan dengan adanya aksi iklim pemerataan yang baru. Hal tersebut harus menjadi prioritas.

Tapi rencana kota saja tidak cukup. Yang telah memungkinkan pemantauan berskala rinci adalah perundang-undangan dan pendanaan negara bagian. Assembly Bill (AB) 617 California, yang disahkan pada tahun 2017, menyediakan berbagai lapisan pendanaan untuk mendukung pendekatan yang berfokus pada komunitas untuk memantau kualitas udara. Dengan adanya pandemi yang mengakibatkan pemerintah negara bagian dan lokal menghadapi masalah keterbatasan dana, banyak perencanaan yang baik tidak akan dapat dilaksanakan. Dengan demikian kita harus menunggu pemerintahan nasional berikutnya untuk mendanai suatu versi baru dari *green new deal* [kebijakan iklim dan keadilan sosial]. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Joan Fitzgerald <jo.fitzgerald@neu.edu>

› Amal sebagai Status dan Stigma: Karantina Wilayah di India

oleh **Mahmudul Hasan Laskar**, Universitas Sains dan Teknologi, Meghalaya, India



Pembagian makanan di Barpeta Assam, India, April 2020. Kredit: Sayantan Roy Choudhury

Untuk mencegah penyebaran COVID-19, karantina wilayah (*lockdown*) secara nasional diberlakukan oleh pemerintah India. Realitas yang menusuk seperti segregasi hierarkis penduduk dan dampak karantina wilayah yang tidak merata telah mendapat perhatian. Hilangnya pekerjaan dan upah karena karantina wilayah telah membuat kemiskinan dan ketidaksetaraan yang ekstrim semakin terlihat. Yang paling menusuk adalah perlakuan buruk terhadap orang miskin oleh kelas kaya dan menengah atas. Tren populer yang terjadi sejak dimulainya karantina wilayah adalah [perilaku] orang-orang kaya yang berbagi foto mereka sendiri di media sosial saat membagikan bahan bantuan kepada orang miskin. Tujuan apa yang hendak dicapai dengan ini, dan apa implikasi tindakan-tindakan yang sangat dipublikasikan ini bagi redistribusi sejati?

› Respon yang tidak memadai

Kelas-kelas menengah mapan dan kaya mendistribusikan

sejumlah materi, yang dapat memberi makan orang-orang miskin ini untuk satu atau dua hari. Mengapa para elite tidak paham bahwa menyediakan bahan untuk satu atau dua kali makan bukanlah solusinya? Para kapitalis besar dapat memitigasi masalah dengan memanfaatkan dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) mereka, tetapi para petinggi perusahaan ini malah menginvestasikan dananya untuk menghasilkan keuntungan lebih lanjut. Pemerintah sendiri tidak dapat memperbaiki kemiskinan kecuali para kapitalis memberikan bantuan dengan proses memastikan adanya “pekerjaan-pekerjaan yang baik”, tidak hanya mempekerjakan orang-orang di pabrik sebagai alat produksi.

Foto-foto di media sosial yang menggambarkan pemandangan seorang kaya dari sebuah bangunan besar atau bungalow nya membagikan sebuah paket kecil bahan bantuan kepada orang-orang miskin yang berdiri mengantri di halaman mengingatkan kita pada pola feodalistik dari hierarki sosial. Terlihat bahwa bungkusan tersebut utamanya terdiri dari mi-

nyak goreng (setengah liter sampai satu liter), beras (2 hingga 3 kilogram), biskuit (2 hingga 3 bungkus), sup (1 hingga 2 bungkus), bawang (1 hingga 2 kilogram) dan kentang (1 hingga 2 kilogram). Ini adalah masalah introspeksi apakah barang-barang ini cukup bagi siapa pun untuk bertahan selama periode karantina wilayah selama dua bulan. Bagaimana dengan kesehatan dan pendidikan anak-anak mereka? Sementara orang-orang kaya dilengkapi dengan perangkat teknologi untuk e-learning atau pendidikan daring, pertanyaan tentang bagaimana akses pendidikan bagi anak-anak miskin yang tidak memiliki perangkat tersebut pun tidak terpikir oleh mereka.

› Promosi diri melalui amal

Karantina wilayah telah menjadi kesempatan bagi mereka yang menginginkan menjadi pekerja sosial untuk memperlihatkan kepemimpinan semu mereka dan mendapatkan jam terbang politiknya. Memberikan bahan-bahan bantuan kepada fakir miskin telah menjadi simbol status yang sengaja ditampilkan di media sosial. Para pekerja sosial semu ini mengelola impresi mereka demi keuntungan diri sendiri. Gambar-gambar aneh telah bermunculan di Facebook yang memperlihatkan orang-orang membagikan paket-paket makanan di pinggir jalan atau di pasar. Menunjukkan rasa lapar bukanlah soal kebanggaan, melainkan rasa malu bagi siapa pun, tetapi orang-orang yang sangat kaya memperlihatkan pembagian makanan seperti upacara penghargaan. Pembagian paket-paket makanan diagung-agungkan melalui media sosial seolah-olah orang-orang miskin yang kelaparan akan menjalani seluruh hidupnya dengan paket-paket makanan tersebut. Satu contoh nya, tiga orang, termasuk seorang juru kamera, terlihat membagikan masker-masker kepada tukang-tukang sayur di pinggir jalan di kota Guwahati, Assam; seluruh adegan itu dikoreograferi dan difilmkan oleh juru kamera dengan sebuah kamera yang canggih. Para pekerja migran yang terdampar tiba-tiba menjadi perhatian kelas-kelas menengah perkotaan dan kategori-kategori orang tertentu. Sebelum karantina wilayah, orang-orang yang dijuluki para aktivis sosial ini hampir tidak peduli dengan para pekerja migran miskin karena mereka sibuk dengan tren media sosial lainnya.

› Rasa malu dan penghinaan

Kelas menengah kaya yang egois ini memamerkan citra amal mereka sendiri dengan mengorbankan martabat orang miskin. Orang miskin benar-benar merasa jengkel dengan kesalehan yang ditunjukkan oleh “pelayanan sosial” yang dilakukan oleh orang kaya. Mereka mengkhawatirkan martabat mereka, kehidupan mereka dan anak-anak mereka karena

kerentanan mereka ditampilkan oleh pekerja sosial di media sosial. Kemiskinan mereka menjadi stigma bagi mereka karena kondisi mereka difilmkan dengan cara yang konyol. Orang-orang kaya di suatu lingkungan tetangga menyerahkan bahan-bahan dengan cara seremonial dan orang-orang yang kurang kaya lainnya menerima dengan perasaan tidak berdaya dan bersalah. Sekarang orang-orang yang lebih miskin ini harus hidup dengan tekanan kasih sayang semu yang telah ditunjukkan oleh tetangga mereka yang kaya. Anak-anak kaum miskin mungkin mengalami kesulitan mengelola rasa percaya diri di sekolah karena “penampilan” kegiatan sosial yang mengekspos kemiskinan mereka secara tidak peka. Mengekspresikan kemiskinan seseorang bukanlah tindakan yang memalukan, tetapi memperlakukan orang miskin seperti pengemis oleh para pelaku kegiatan sosial ini memalukan. Itulah salah satu alasan mengapa bagian masyarakat yang miskin atau lebih lemah menderita xenosentrisme atau identifikasi dengan budaya dan kebiasaan orang lain, bukan budaya mereka sendiri. Degradasi harga diri telah terjadi karena menurunnya pertanian, yang pernah menjadi sektor ekonomi India yang mandiri dan tumbuh pesat. Industrialisasi telah menciptakan pasar tenaga kerja bagi pekerja upahan manual, sehingga mereka yang dulunya adalah orang pedesaan yang mandiri sekarang menjadi pendatang di kota dan merupakan bagian utama dari masyarakat miskin perkotaan.

› Solusi Nyata

Persoalan migran telah menjadi subyek intelektualisme dan aktivisme sosial semu di media sosial. Tetapi solusi nyata untuk masalah mereka berbeda, dan mencakup pendekatan-pendekatan seperti kembali ke pertanian mandiri, lingkungan hidup untuk melindungi mata pencaharian dan sumber daya alam dan mendorong industri-industri rumahan dan berskala kecil. Ini dapat menginisiasi solusi nyata untuk masalah migran dan kemiskinan di India, tetapi sayangnya seminar (sekarang webinar), simposium dan posting media sosial hanya menciptakan debat dan diskusi yang dangkal tanpa wacana yang efektif.

Pemberian bantuan atau pembagian makanan telah berubah menjadi kompetisi fotografi di media sosial yang pada akhirnya mempengaruhi harkat hidup masyarakat miskin. Ini tidak menawarkan solusi jangka panjang. Jika orang kaya serius ingin membantu orang miskin, mereka harus melakukannya dalam hal redistribusi kekayaan tanpa memamerkannya semata-mata untuk mengejar status atau harga diri. ■

Korespondensi langsung kepada:
Mahmudul Hasan Laskar <hasanlaskaramu@gmail.com>

› Kelangkaan Perawatan? Migrasi Perawatan dan Demografi Politik

oleh **Attila Melegh**, Corvinus University of Budapest, Hungaria

Umat manusia telah mencapai situasi sosial global tertentu pada tahun 2010-an. Sejak tahun 1980-an telah terjadi interaksi yang agak unik antara penuaan, marketisasi yang berkelanjutan tanpa peningkatan redistribusi, dan kematian petani. Faktor-faktor ini dan dinamika historisnya telah menyebabkan kelangkaan perawatan dan peningkatan dramatis yang terkait dalam industri migrasi perawatan. Perkembangan ini menempatkan migran perawat pada posisi yang sangat sulit, terutama dengan pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung yang membuat akses kepada perawatan kesehatan menjadi semakin penting secara global. Sebagian besar populasi global—dan bukan hanya negara-negara miskin—berada di bawah kendali berbagai sistem perawatan yang semakin berbasis pada tenaga kerja migran. Sementara itu pekerja migran terjebak dalam tarik-menarik antara meningkatnya permintaan akan pekerjaan mereka, meningkatnya ketidakstabilan dalam pekerjaan, meningkatnya permusuhan terhadap para migran, dan peningkatan sekuritisasi yang juga disebabkan oleh pandemi. Kita telah mencapai titik di mana perawatan orang sakit dan usia lanjut menjadi lebih kompetitif dan sangat rapuh.

› Peningkatan migrasi pekerja rumah tangga dan tenaga kesehatan

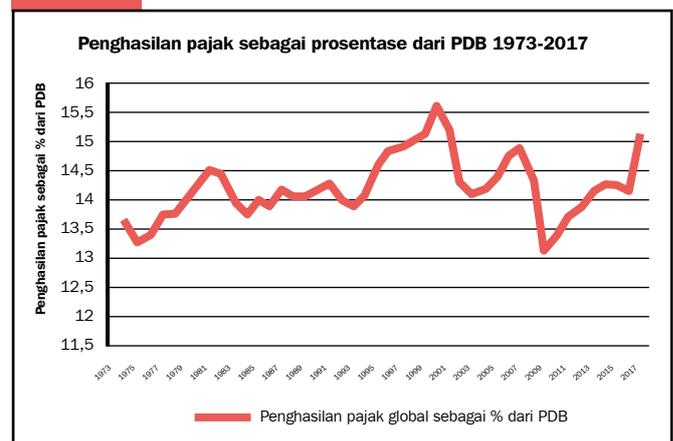
Kita kekurangan data global yang sistematis mengenai pekerja rumah tangga dan tenaga kesehatan. Untuk tahun 2015, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) memperkirakan ada sekitar 67,1 juta pekerja rumah tangga; 11,5 juta di antaranya adalah migran dan hampir tiga perempatnya adalah perempuan. Sementara itu, migrasi tenaga kesehatan juga meningkat. Perkiraan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk 2013 menunjukkan adanya kekurangan jumlah tenaga kesehatan sebesar 17,4 juta dan memproyeksikan peningkatan permintaan yang dramatis yang hanya dapat dipenuhi dengan meningkatnya migrasi. Negara-negara OECD yang relatif kaya (tidak termasuk Amerika Serikat) telah meningkatkan persediaan perawat berpendidikan luar negeri setidaknya 80% dan jumlah dokter berpendidikan luar negeri sekitar 45% dalam kurun waktu antara 2007 dan 2016. Pada tahun 2016, jumlah dokter berpendidikan luar negeri di negara-negara di atas mencapai hampir setengah juta, sedangkan jumlah perawat berpendidikan luar negeri jauh di atas 300.000. Tingkat dokter kelahiran luar negeri telah naik setidaknya

10 persen di beberapa negara, mencapai 40% atau 50% dari seluruh jumlah dokter (banyak di antaranya ruang geraknya terbatas selama pandemi COVID-19, antara lain karena karantina wilayah lokal dan nasional).

› Penuaan, kenaikan biaya kesehatan, dan redistribusi yang tidak berubah

Tingginya kenaikan populasi usia lanjut dan perawatan orang tua dalam tanggungan memberikan beban yang signifikan pada generasi muda baik dalam hal produktivitas tenaga kerja maupun kebutuhan perawatan yang sebenarnya. Hal ini terutama terjadi mengingat stagnasi global yang berkepanjangan dari redistribusi negara, seperti yang dicatat oleh József Böröcz (2016) dalam studinya tentang kontribusi sosial terkait pekerjaan. Selain itu, pangsa penerimaan pajak (tarif redistribusi) dalam Produk Domestik Bruto (PDB) juga mengalami stagnasi secara global, rata-rata berkisar sekitar 14% sebagaimana yang dicatat Bank Dunia (lihat Grafik 1). Pada saat yang sama, pengeluaran kesehatan per kapita telah meningkat setidaknya sejak tahun 2000-an pada tingkat yang lebih tinggi dari pada pertumbuhan PDB per kapita (lihat Grafik 2). Secara global, jumlah orang tua dengan tanggungan telah meningkat dari 9,5% menjadi 13,2% selama periode yang sama (lihat Grafik 3). Ini mencakup negara-negara dengan populasi sangat muda yang signifikan dibandingkan dengan populasi usia sangat lanjut di Eropa.

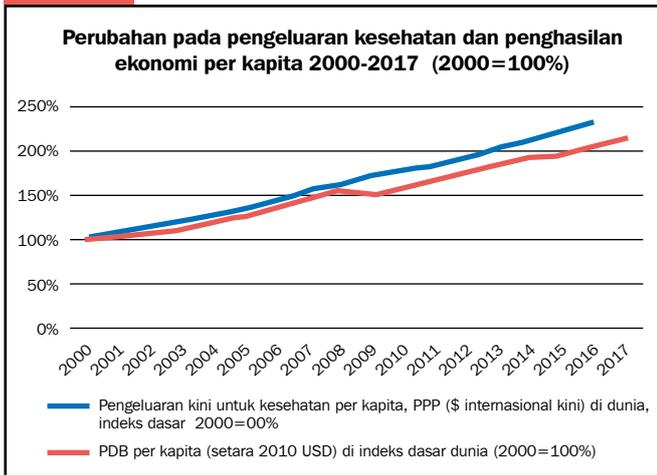
Grafik 1



Sumber: <http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/>.



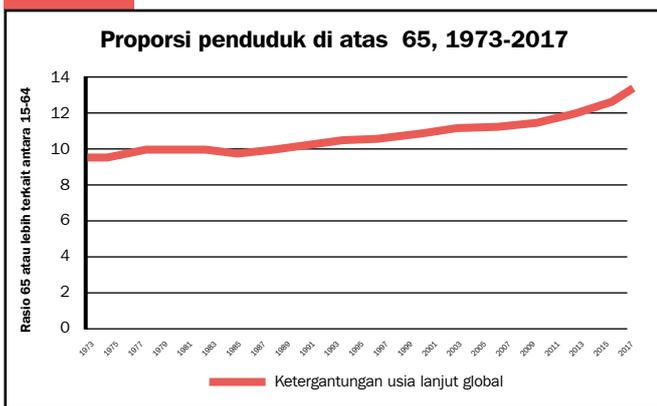
Grafik 2



Sumber: <http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/>

Hingga tahun 2010, populasi dunia kian menua dengan kecepatan yang lebih lambat daripada pertumbuhan PDB per kapita. Ini berarti bahwa, meskipun tingkat redistribusi stabil, ada sumber daya yang semakin luas yang tersedia bagi biaya publik dan pasar untuk perawatan usia lanjut. Namun, sejak tahun 2010 dan seterusnya, pertumbuhan rasio ketergantungan hari tua berlangsung lebih cepat dari pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan yang dibutuhkan untuk pengeluaran kesehatan per kapita dapat bersumber dari pendapatan mandiri tambahan (seperti pembelian saham yang meningkat dari layanan tersebut dengan menggunakan pendapatan kita sendiri) dan/atau proporsi pengeluaran publik yang terkait kesehatan mengalami peningkatan dengan mengorbankan tujuan publik lainnya. Reorganisasi ini, pada gilirannya, akan mengarah pada peningkatan persaingan pasar dan kesejahteraan untuk barang-barang sosial dan kesehatan sehingga semakin mempersulit para migran perawatan untuk mencari perlindungan sosial untuk diri mereka sendiri.

Grafik 3



Sumber: <http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/>

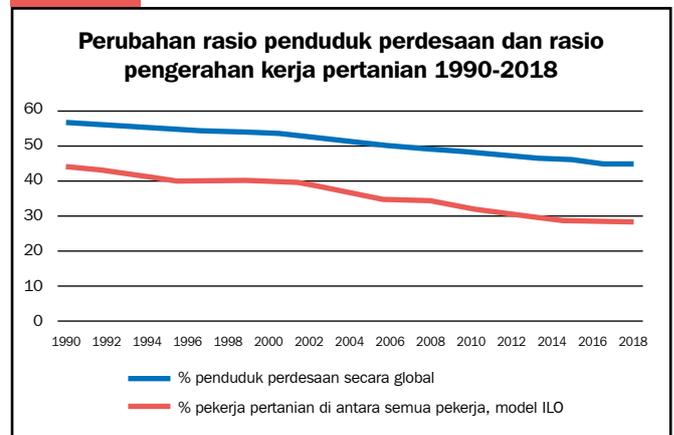
Serangkaian masalah ini selanjutnya dapat semakin memperumit migrasi dalam beberapa hal. Para migran dapat berusaha untuk membeli layanan kesejahteraan dari gaji dan remitensi mereka atau untuk mengikuti sistem kesejahteraan di negara tujuan migrasi. Jika tidak, negara-negara yang tidak bersahabat dengan sistem kesejahteraan yang mapan dapat secara bersamaan menghukum para migran dan meminta kontribusi sosial mereka untuk meningkatkan keseimbangan perpajakan antara penuaan, kebutuhan sosial dan kesehatan, dan pengeluaran publik. Lebih lanjut, dalam lingkungan sosial ini terdapat tanda-tanda yang jelas mengenai persaingan, tidak hanya di antara kelompok lokal

dengan para migran, tetapi juga di antara kelompok-kelompok migran itu sendiri sebagaimana dibuktikan dengan wawancara dengan para pekerja perawatan Eropa Timur yang menolak perlindungan “mahal” bagi pengungsi yang masuk. Pandemi COVID-19 hanya meningkatkan ketegangan ini dan kita belum melihat akhir dari krisis ekonomi saat ini.

› Persaingan perawatan global dan perlindungan negara

Secara khusus kontradiksi seperti itu dapat menjadi akut akibat perubahan pada tingkat redistribusi negara dan tingkat penuaan setelah terjadi apa yang oleh Hobsbawm dalam *The Age of Extremes* namakan sebagai “kematian petani” (*death of the peasantry*). Penurunan di lapangan kerja pertanian pada pertengahan abad kedua puluh berlanjut dengan cepat dan turun di bawah 30% secara global pada 2018; penduduk pedesaan telah menjadi minoritas dibandingkan dengan penduduk perkotaan untuk pertama kalinya dalam sejarah. Ini berarti bahwa beban perawatan yang terkait dengan penuaan harus semakin disalurkan ke mekanisme pasar dan sistem redistributif negara bertentangan dengan sistem pedesaan berbasis keluarga yang secara historis penting. Hal ini berarti penurunan beban untuk perawatan usia lanjut yang berbasis perawatan kekerabatan. Bahkan di negara-negara yang lebih miskin, penyediaan langsung makanan dan barang-barang materi untuk para usia lanjut dalam keluarga telah menurun dibandingkan dengan kebutuhan untuk membeli layanan kesehatan dan sosial yang disediakan negara dan pasar, termasuk yang ditawarkan oleh pengasuh usia lanjut lokal atau imigran. Pergeseran ini merupakan salah satu transformasi paling signifikan dalam sejarah umat manusia dan menjadi momen yang menentukan dalam era globalisasi.

Grafik 4



Sumber: <http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/>

Ini berarti bahwa marketisasi akan mengarah pada marketisasi yang lebih jauh dan peningkatan permintaan yang berlawanan dengan perlindungan negara, yang merupakan gabungan ideal bagi kebangkitan nasionalisme otoriter. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kontradiksi seputar kelangkaan perawatan dalam tatanan ekonomi kapitalistik saat ini dapat menjadi sumber transformasi. Dengan demikian, selama dan pasca-COVID, perdebatan demografis politik akan meningkat di mana perlindungan sosial universal dan perubahan radikal pada sistem ekonomi akan dilihat sebagai alternatif dari marketisasi yang kontradiktif. Demikianlah keadaan sebenarnya. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Attila Melegh
<attila.melegh@uni-corvinus.hu>

› Bisakah COVID-19 Mengarah Pada Berakhirnya Globalisasi?

oleh **Iliana Olivié** dan **Manuel Gracia**, Elcano Royal Institute dan Universidad Complutense de Madrid, Spanyol

Proses globalisasi saat ini, yang dimulai pada tahun 1970-an, meliputi fase pertumbuhan, kontraksi, dan mutasi. Banyak di antaranya sesuai dengan perubahan struktural dalam tatanan ekonomi global dan geopolitik, termasuk kebangkitan kekuatan baru di Asia dan pergeseran terkait dari episentrum aktivitas global dari Atlantik ke Pasifik..

Resesi Besar (*The Great Recession*) di akhir tahun 2000-an dan awal tahun 2010-an sebagian besar telah mengakibatkan percepatan dan konsolidasi perubahan-perubahan tersebut. Tren tersebut tercermin dalam The Elcano Global Presence Index. Krisis kesehatan, ekonomi, politik, dan sosial saat ini juga akan meninggalkan jejaknya pada hubungan internasional dan proses globalisasi itu sendiri.

Meskipun masih terlalu dini untuk memprediksi keseluruhan dampaknya, kita sudah melihat beberapa konsekuensi dari krisis tersebut, seperti gangguan dalam produksi dan konsumsi (dengan demikian juga perdagangan). Pun dapat juga diantisipasi beberapa dampak dari pengurangan dramatis arus internasional manusia.

› Dunia sudah mengalami deglobalisasi sebelum pandemi COVID

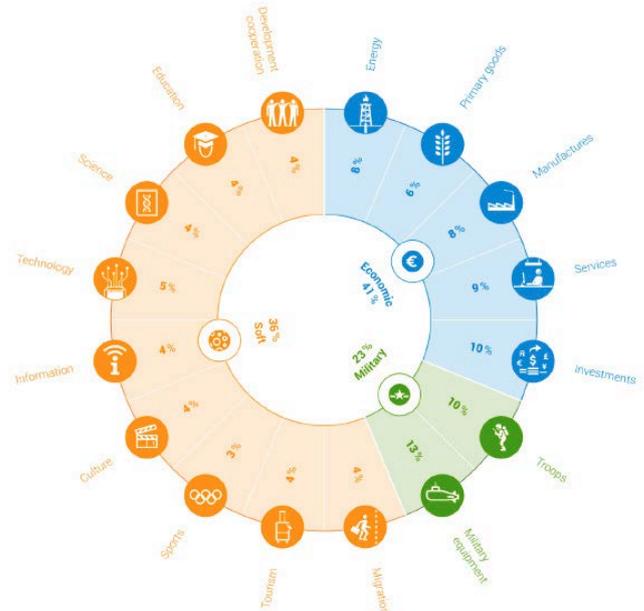
Kebijakan liberalisasi ekonomi yang diterapkan di sebagian besar dunia dalam tiga dekade terakhir abad kedua puluh menghasilkan peningkatan cepat dalam pertukaran ekonomi internasional. Berbagai gelombang globalisasi ekonomi selalu diiringi dengan berbagai bentuk internasionalisasi (secara militer atau secara lunak) yang melibatkan pergerakan lintas batas orang (penempatan pasukan, migran, wisatawan, pelajar, olahragawan dalam kompetisi internasional, dan pekerja pembangunan internasional) dan gagasan (pertukaran informasi, budaya, sains, teknologi, dan pendidikan). Sementara konseptualisasi akademik mengenai globalisasi selalu mengakui aspek non-ekonomi lainnya, analisis proses internasionalisasi cenderung difokuskan pada dimensi ekonomi.

Fokus pada dimensi ekonomi ini sebagian digunakan untuk memprediksi bahwa globalisasi akan melambat, berakhir, atau bahkan memasuki periode “stagnasi seku-ler” selama krisis keuangan 2008 dan Resesi Besar yang mengikutinya.

Namun sementara ada perlambatan—dan bahkan pem-balikan dalam variabel tertentu dan pada tahun-tahun tertentu—dalam internasionalisasi ekonomi untuk arus perdagangan tertentu dan investasi langsung asing, the Elcano Global Presence Index menunjukkan bahwa, mes-kipun globalisasi melambat secara signifikan dan bermu-tasi ke bentuk-bentuk internasionalisasi yang lebih lunak, globalisasi tidak berjalan mundur.

Memang, nilai tambah kehadiran global (termasuk se-luruh 130 negara, variabel, dan dimensi) mencerminkan volume pertukaran dunia dan, oleh karena itu, dapat digu-nakan sebagai proksi dari globalisasi (Gambar 1).

Gambar 1. Indeks Kehadiran Global Elcano

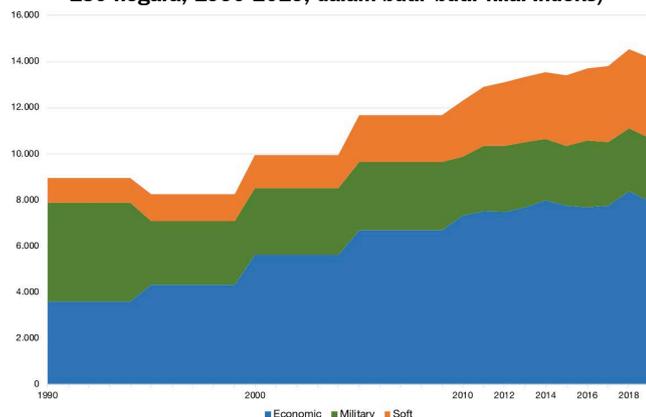


Sumber: Elcano Royal Institute, Elcano Global Presence Index

Berdasarkan Indeks ini, kita dapat mengamati fase-fase dalam globalisasi: (a) Antara tahun 1990 dan 1995, ber-tepatan dengan rekonfigurasi geopolitik Eropa, kehadiran agregat global turun dengan rata-rata tahunan sebesar -1,6%. (b) Ini kemudian diikuti oleh periode kedua globa-lisasi berkelanjutan antara 1995 dan 2011, dengan pe-ningkatan kumulatif sebesar 57%. (c) Fase pasca-Resesi Besar, dengan kenaikan dan penurunan moderat, meng-hasilkan peningkatan tahunan rata-rata sekitar 1%. (d) Ke-mudian diikuti peningkatan tajam, lebih dari 5% (kembali ke angka sebelum krisis). (e) Baru-baru ini ada penurun-

an sebesar -2,6%, yang merupakan penurunan tahunan terbesar yang tercatat dalam serial waktu 30 tahun kami (Gambar 2).

Gambar 2. Pertambahan nilai kehadiran Global (untuk seluruh 130 negara, 1990-2019, dalam butir-butir nilai indeks)



Sumber: Elcano Royal Institute, Elcano Global Presence Index

Variabel dan dimensi yang berbeda (ekonomi, militer, dan lunak) juga berkontribusi dalam berbagai segi terhadap kecepatan globalisasi, tergantung pada tahapannya. Antara tahun 1990 dan 2005, vektor utama globalisasi adalah dimensi ekonomi. Dimensi lunak memberikan kontribusi positif meskipun tidak terlalu besar selama periode ini, sementara militer menunjukkan pengurangan tertentu. Namun, tren ini berubah secara signifikan di tahun 2000-an, ketika dimensi lunak mulai memimpin globalisasi. Dalam beberapa tahun terakhir, naik turunnya kehadiran agregat global terutama disebabkan oleh kinerja dimensi ekonomi.

› **Efek COVID-19 terhadap bursa global**

Penting untuk ditekankan bahwa the Elcano Global Presence Index menangkap tren struktural, yang berarti turbulensi keuangan sementara atau perubahan politik jarang tercermin dalam hasilnya. Ada jeda sekitar dua tahun sebelum perubahan dimensi dan variabel tercermin dalam Indeks. Dampak krisis 2008-09 tidak terlihat dalam Indeks hingga 2011 dan efek pandemi COVID-19 diperkirakan tidak akan tercatat dalam nilai Indeks hingga tahun 2021 atau 2022.

Meskipun dampak jangka pendek, menengah, dan panjang dari pandemi di berbagai bidang telah diperkirakan dan diramalkan oleh berbagai penulis dan lembaga yang berbeda, gambarannya tentang globalisasi masih belum lengkap. Salah satu cara untuk mengeksplorasi dampak masa depan dari krisis kesehatan (dan respon politik yang diadopsi oleh negara-negara dan secara global) adalah dengan mengamati skenario yang berbeda, berdasarkan efek Resesi Besar terhadap nilai tambah dari the Elcano Global Presence Index.

› **Skenario A: Krisis seperti 2008**

Jika keadaan darurat kesehatan saat ini dan konsekuensi ekonomi, politik, dan sosialnya berada pada skala yang sama dengan krisis sebelumnya, kami memperkirakan perubahan agregat the Elcano Global Presence Index akan sama dengan periode 2010-15, untuk semua variabel dan dimensi.

› **Skenario B: Krisis lebih buruk dari 2008**

Beberapa analis berpendapat bahwa konsekuensi ekonomi, politik, dan sosial akan lebih menghancurkan dan lebih dalam daripada krisis 2008. Dalam skenario seperti itu, angka-angka untuk berbagai komponen Indeks, yang mungkin dimulai tahun 2022, akan mencatat kemungkinan penurunan terburuk untuk masing-masing indikator yang sudah terlihat selama periode 2010-18.

› **Skenario C: Krisis berbeda dengan 2008**

Akhirnya, ciri-ciri khusus dari krisis ini dan perbedaannya dengan tahun 2008 dapat berarti bahwa variabel-variabel bereaksi berbeda. Perkiraan dan estimasi memprediksi dampaknya terhadap variabel ekonomi akan mirip dengan Resesi Besar dan dampaknya lebih kuat pada variabel lunak, sebagai akibat dari pengurangan dramatis pergerakan lintas batas orang (yang mempengaruhi variabel seperti penempatan pasukan, pendidikan, migrasi atau pariwisata).

Dalam skenario ini, kinerja yang diharapkan dari masing-masing 16 variabel (alasan dirinci di sini) akan mengarah ke skenario ketiga, di mana dampak krisis saat ini terhadap globalisasi berbeda dengan krisis 2008 (Gambar 3).

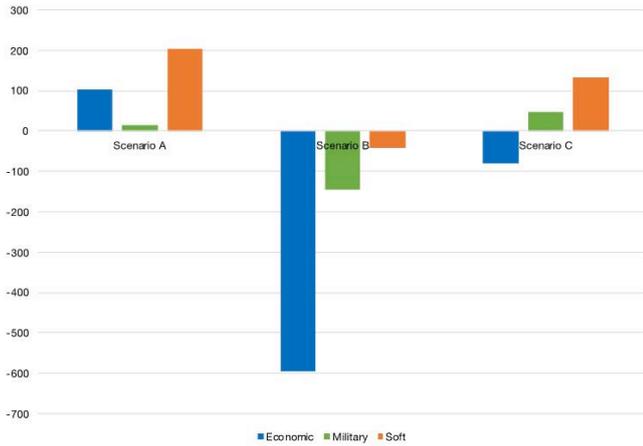
Gambar 3. Tiga skenario untuk globalisasi setelah COVID-19 (%)

	Skenario A Krisis mirip dengan 2008 Tingkat rata-rata (2010-15)	Skenario B Krisis lebih buruk dari 2008 Pengurangan member (2010-18)	Skenario C Krisis yang berbeda dengan 2008
Energi	6,8	-36,2	-11,1
Kebutuhan pokok	4,3	-7,5	-1,1
Manufaktur	2,6	-3,4	-0,7
Jasa	1,7	-0,7	-0,7
Investasi	-0,3	-8,9	-0,3
Pasukan	-4,0	-10,2	5,7
Peralatan Militer	3,7	-2,0	-1,0
Migrasi	1,4	-1,0	-1,0
Pariwisata	3,7	2,0	2,0
Olahraga	-0,8	-1,7	-1,7
Budaya	7,3	-8,9	-1,8
Informasi	16,9	-1,4	16,9
Teknologi	4,2	1,7	4,2
Ilmu Pengetahuan	5,0	3,4	5,0
Edukasi	5,2	0,1	0,1
Kerja sama pembangunan	2,6	-4,8	4,1

Sumber: Para penulis, atas dasar the Elcano Global Presence Index



Gambar 4. Kehadiran global agregat, proyeksi menurut skenario A, B, and C (perubahan pada nilai indeks berkaitan dengan 2019)

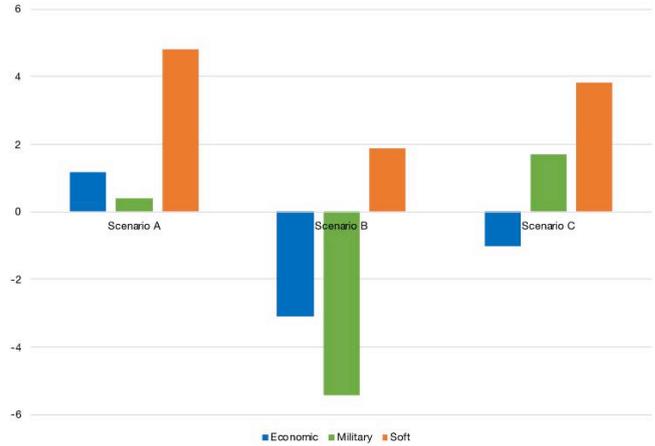


Sumber: Para penulis, atas dasar the Elcano Global Presence Index.

Hanya satu dari tiga skenario (yaitu skenario B) yang akan menghasilkan de-globalisasi yang efektif dengan kehadiran global agregat dari seluruh 130 negara yang turun sebesar 1% dengan nilai 2019. Ini akan mempengaruhi semua dimensi, terutama ekonomi (secara absolut) dan militer (secara relatif).

Namun, jika efek transformasional mirip dengan krisis sebelumnya (skenario A), kita dapat mengharapkan kesinambungan dalam proses globalisasi (+ 1,7% total kehadiran global) dengan adanya peningkatan kumulatif dalam dimensi lunak dan, pada tingkat yang lebih rendah, dalam dimensi ekonomi.

Gambar 5. Proyeksi kehadiran global agregat menurut skenario A, B, dan C (prosentase perubahan pada indeks berkaitan dengan 2019)



Sumber: Para penulis, atas dasar the Elcano Global Presence Index.

Akhirnya, skenario yang didasarkan pada efek transformasional yang berbeda dari krisis sebelumnya akan melihat globalisasi yang hampir terhenti, dengan kehadiran global agregat meningkat sebesar 0,7%. Ini akan berujung pada dimensi lunak yang lebih dinamis, yang diimbangi dengan sedikit penurunan dalam dimensi ekonomi (Gambar 4 dan 5).

Singkatnya, mirip dengan krisis di akhir tahun 2000-an, krisis yang terjadi saat ini akan berdampak pada hubungan internasional. Kita bisa berharap melihat percepatan perubahan struktural yang telah kita lihat selama ini dalam proses globalisasi. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada:
 Iliana Olivie <iolivie@rielcano.org>
 Manuel Gracia <mgracia@rielcano.org>

› Menghadapi COVID-19: Rawat Tinggal di Eropa Tengah

oleh **Brigitte Aulenbacher**, Universitas Johannes Kepler, Austria dan anggota Komite Penelitian ISA mengenai Ekonomi dan Masyarakat (RC02), Kemiskinan, Kesejahteraan Sosial dan Kebijakan Sosial (RC19), Sosiologi Pekerjaan (RC30), dan Perempuan, Gender, dan Masyarakat (RC32); **Petra Ezzeddine**, Universitas Charles, Republik Ceko; **Dóra Gábel**, Hungarian Demographic Research Institute, Hungaria; **Michael Leiblfinger**, Universitas Johannes Kepler, Austria dan anggota Komite Penelitian ISA RC19 dan RC30; **Kinga Milankovics**, HEKATE Conscious Ageing Foundation, Hungaria; dan **Veronika Prieler**, Universitas Johannes Kepler, Austria dan anggota RC19 dan RC32 ISA



Masker yang diiklankan bagi para komuter, agar di perbatasan Hungaria-Austria mereka dapat segera diidentifikasi sebagai pekerja.

Di Eropa Tengah, rawat tinggal (*live-in care*) semakin dianggap penting sebagai bagian dari perawatan bagi para lanjut usia. Para pekerja rawat (*care workers*), kebanyakan migran perempuan, tinggal dan bekerja di rumah tangga orang-orang yang mereka rawat (*care receivers*). Tanggung jawab mereka berkisar dari kebersihan rumah hingga tugas medis. Aturan mengenai rawat tinggal berbeda-beda antarnegara, dengan satu kemiripan yaitu kondisi kerja yang rentan. Rawat tinggal di Eropa Tengah ditopang oleh migrasi sirkuler dan seringkali calo merekrut pekerja rawat dari negara-negara miskin yang terpaksa menerima pekerjaan (apapun) di luar negeri. Satu syarat bagi model kerja ini adalah kebebasan untuk bepergian bagi para pekerja di lingkungan anggota Uni Eropa dan negara-negara lain, yang tidak bisa lagi dianggap berlaku di masa pandemi COVID-19 ini kare-

na penutupan perbatasan. Artikel ini menganalisis situasi rawat tinggal di Austria, Republik Ceko, dan Hungaria dengan memperlihatkan model-model kerja perawatan di negara-negara tersebut dan bagaimana kerja ini dipengaruhi oleh pandemi.

› Rawat tinggal di Austria, Republik Ceko, dan Hungaria

Di Austria, rawat tinggal dilegalkan sebagai profesi. Biasanya, dua perawat bergantian bekerja di satu rumah tangga setiap dua atau empat minggu. Para pekerja rawat adalah pekerja wirausaha, yang berarti fleksibel sesuai keinginan orang yang dirawat, tetapi mereka tidak berhak mendapat upah minimum, liburan dengan tanggungan, atau cuti sakit. Tidak seperti Austria, Republik Ceko dan Hungaria merupakan negara-negara pengirim sekaligus penerima pekerja rawat. Para pekerja dari Ceko dan Hungaria biasanya pergi ke negara-negara berbahasa Jerman—Austria dan Jerman. Bagi Republik Ceko, di mana kerja rawat oleh migran untuk rumah tangga pribadi merupakan fenomena baru, Ukraina sekarang merupakan negara pengirim pekerja rawat yang penting. Sektor rawat tinggal di Republik Ceko masih kecil dan untuk mendapatkan izin tinggal bagi pekerja migran (non-UE) sangat tergantung pada kontrak kerja yang sah. Hungaria umumnya menerima pekerja rawat beretnis Hungaria yang berasal dari Ukraina dan Rumania, yang karena kemiripan bahasa dan budaya belum tentu pergi ke Eropa Barat untuk memperoleh gaji yang lebih tinggi. Mayoritas pekerja migran rawat tinggal di Hungaria bekerja secara informal tetapi ada juga beberapa peluang pekerjaan formal.

› Tantangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19

Meluasnya pandemi COVID-19 mendorong penutupan perbatasan secara langsung, termasuk juga di Eropa Tengah, dan untuk sementara menghentikan migrasi sirkuler lintas perbatasan. Di Austria, pandemi membuat rawat tinggal kembali disorot media yang selalu hadir dan masuk ke dalam agenda berbagai pihak yang, alih-alih mencari

alternatif, bertekad untuk tidak mengubah apapun. Pemerintah Jerman, Austria, dan Ceko berhasil merundingkan “koridor perawatan” sementara pekerja rawat Hungaria pun bebas masuk Austria. Para pekerja rawat itu mulai menimbang apakah mereka sebaiknya tetap di kampung halaman saja, yang mungkin berarti kehilangan pendapatan, atau berangkat ke/tinggal di negara penerima. Di Austria, banyak pekerja rawat memperpanjang jam kerja mereka, dengan insentif dari pemerintah federal yaitu satu kali bonus bebas pajak sebesar 500 euro. Antara akhir Maret dan Mei, para pekerja rawat dibawa ke Austria dengan tiga penerbangan sewaan dari Bulgaria, Kroasia, dan Rumania serta enam kereta khusus dari Rumania saja. Sementara pada awalnya semua pekerja rawat dikarantina selama 14 hari di sebuah hotel tanpa dibayar, kemudian hanya pekerja yang setelah menjalani tes terbukti positif—dan mereka yang menumpang gerbong kereta yang sama—harus dikarantina, lagi-lagi tanpa bayaran. Ketika perbatasan Eropa Tengah dibuka lagi di pertengahan Juni, jalur-jalur perjalanan reguler tersedia lagi bagi para migran sirkuler.

Sebagai akibat dari aturan lintas perbatasan yang ketat selama beberapa bulan pertama masa pandemi, para pekerja rawat yang kembali melintasi perbatasan ke Republik Ceko berhadapan dengan aturan wajib isolasi diri di rumah selama 14 hari. Selain itu, mereka wajib menunjukkan hasil tes COVID-19 negatif, dan harus melakukan tes lagi setiap 14 hari dengan biaya sendiri. Diskursus yang dominan di media menggambarkan para pekerja migran sirkuler Ceko sebagai ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Sebagaimana diceritakan para pekerja rawat secara daring, keluarga mereka menghadapi stigma sosial sebagai calon pembawa virus di komunitas mereka. Di masa awal pandemi, pekerja rawat asal Ukraina secara khusus sering mengungkapkan perasaan tidak aman, takut, dan khawatir bahwa mereka akan menganggur dan “terjebak” di dalam Republik Ceko tanpa kemungkinan pulang ke rumah. Barulah pada tanggal 4 Mei Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan peraturan baru yang membatalkan ketentuan waktu 60 hari untuk mendapatkan izin tinggal baru bila migran kehilangan pekerjaannya selama masa darurat. Berbeda dengan liputan besar-besaran di media tentang situasi pekerja lintas batas Ceko, situasi pekerja rawat migran di Republik Ceko tetap tidak terdengar bahkan dalam pembicaraan tentang relevansi sosial dari pekerja infrastruktur yang penting dan tentang kebutuhan mendesak untuk memberi mereka perlengkapan pelindung yang memadai.

Di Hungaria, yang tidak memiliki liputan media seperti di Austria dan Republik Ceko, reaksi pemerintah terhadap pandemi memperburuk situasi perawatan kaum lanjut usia: Ribuan pasien dipulangkan dari rumah sakit agar rumah sakit dapat menyediakan tempat tidur untuk calon pasien COVID-19. Ini memunculkan permintaan terhadap adanya bantuan perawatan tambahan, sementara pada saat yang sama para pekerja rawat asal Rumania dan Ukraina pulang ke negara mereka atau tidak bisa melintasi batas ke Hungaria. Pasar bagi kebutuhan rawat tinggal makin tidak keruan karena banyak orang kehilangan pekerjaan dan ka-

renanya enggan membayar biaya jasa perawatan. Meskipun banyak pekerja rawat Hungaria senang tinggal lebih lama di Austria karena adanya bonus yang diperkenalkan, yang lain tidak bisa atau tidak mau kembali bekerja karena karena menghadapi peningkatan kewajiban perawatan di rumah. Di media sosial, pekerja rawat asal Hungaria yang bekerja di Austria menunjukkan ketidaksukaannya terhadap langkah negara penerima untuk mengangkut pekerja rawat asal Rumania. Banyak dari mereka sepakat bahwa memberi hak istimewa bagi satu kelompok migran dapat mengancam pekerjaan mereka di masa depan.

› **Kesimpulan**

Selama masa pandemi, kondisi kerja di negara-negara penerima dan pengirim makin diabaikan. Menghadapi kondisi yang lebih buruk di negara asalnya, para pekerja migran telah didorong untuk menerima pekerjaan yang ditawarkan di luar negeri meskipun ada potensi risiko kesehatan dan risiko-risiko lainnya serta pembatasan yang berlaku selama pandemi. Pasar tenaga kerja rawat lintas batas sering digambarkan sebagai pasar yang saling menguntungkan (*win-win*), di mana kaum lanjut usia mendapatkan perawatan dengan harga terjangkau dan pekerja migran mendapat pekerjaan dengan bayaran yang lebih baik dari pada di negaranya. Nyatanya, pasar tenaga kerja rawat di Eropa Tengah ini menciptakan skema struktural yang timpang atas dasar kebangsaan seseorang, eksploitasi transnasional terhadap tenaga kerja, dan eksklusivitas di balik mitos Eropa yang egaliter dan terintegrasi. Meskipun kerentanan rawat tinggal diperhatikan lagi karena pandemi, namun kebutuhan dan keinginan para pekerja rawat dan orang yang mereka rawat tidak ditanggapi, atau kurang ditanggapi atau ditanggapi secara tidak berimbang. Orang-orang yang membutuhkan perawatan dan keluarga mereka berhadapan dengan kurangnya dukungan publik dan merasa gelisah karena penutupan perbatasan. Meskipun banyak peraturan dibuat untuk memastikan kelangsungan perawatan tinggal, kondisi hidup dan kerja para pekerjanya yang sudah rentan bahkan sebelum pandemi tetap diabaikan. Karena penjarakan sosial—juga antara orang yang dirawat dan keluarga mereka—para pekerja rawat menghadapi peningkatan beban kerja dan isolasi. Perjalanan lintas negara membawa risiko penularan dan/atau karantina (tanpa dibayar). Pekerja rawat yang tertahan di negara asalnya menghadapi deprivasi finansial. Dan kendati ada wacana mengenai relevansi sistemis mereka, namun para pekerja rawat digambarkan sebagai ancaman terhadap kesehatan masyarakat dan pasar tenaga kerja setempat. Beban sosial dan finansial pandemi ini pada akhirnya jatuh ke pundak para migran sirkuler. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada:
 Brigitte Aulenbacher <brigitte.aulenbacher@jku.at>
 Petra Ezzeddine <petra.ezzeddine@fhs.cuni.cz>
 Dóra Gábor <gabriel@demografia.hu>
 Michael Leiblfinger <michael.leiblfinger@jku.at>
 Kinga Milankovics <kinga@hekatofoundation.org>
 Veronika Prieler <veronika.prieler@jku.at>

› Sosiologi Publik di Asia Selatan Selama Karantina Wilayah

oleh **Dev Nath Pathak**, South Asian University, India



Ilustrasi oleh Arbu.

Kesempatan untuk memikirkan ulang Asia Selatan dalam hal emosi manusia, penderitaan, dan krisis sosial politik sekali lagi telah hilang selama karantina wilayah ditegakkan untuk menghentikan penyebaran virus korona yang diberlakukan di segenap wilayah. Perhitungan cepat atas kepingan drama dapat membantu memahami ini. Retorika lama tentang negara geopolitik baru-baru ini kembali menggema saat terbukanya sengketa lama antara Nepal dan India tentang Kalapani, sebuah daratan di Himalaya. Ini terjadi di tengah-tengah krisis pekerja migran yang dengan putus asa berupaya kembali ke daerah asal mereka selama karantina wilayah. Di samping itu, harus ditambahkan kegagalan pertemuan SAARC (*South Asian Association for Regional Cooperation/Asosiasi Asia Selatan untuk Kerjasama Regional*) mengenai COVID-19 yang diselenggarakan selama karantina wilayah, yang sekali lagi membuktikan bahwa Asia Selatan tidaklah lebih dari sebuah permainan bagi sebagian negara anggotanya. Hal ini selalu berakhir dengan partisipasi negara anggotanya dalam acara

pertemuan yang tidak lebih dari acara bincang-bincang (*talk show*) yang membahas sumbangan dan dana bersama mereka, berbagi kepentingan strategis dan ikatan bilateral, keamanan dan keselamatan bersama. Hampir tidak ada ruang bagi emosi, dinamika sosio-kultural, koneksi dan arus manusia. Jarang ada yang menyadari bahwa Asia Selatan, sebagai suatu entitas sosial yang kurang tereksplorasi, juga memerlukan belas kasih, empati, dan kolaborasi lintas batas yang sejalan dengan emosi bersama di dalam wilayah ini. Ide dehumanis yang mengganggu mengenai Asia Selatan mendominasi dan mengaburkan perasaan manusia, kesedihan, dan kecemasan di wilayah ini. Pendeknya, sosiologi publik mengenai penderitaan, kecemasan, dan emosi di Asia Selatan hampir tidak berpeluang untuk muncul karena dominasi tujuan yang “berdarah-dingin”—atau yang disebut “diplomasi COVID”. Dan karena itu, sosiologi Asia Selatan yang jujur secara emosional, di mana manusia dan perjuangannya menjadi sentral, menjadi suatu proyek yang tidak pernah selesai.

› **Krisis Pekerja Migran**

Barangkali COVID-19 secara universal membawa berkah tersembunyi: hal tersebut merupakan pukulan terhadap topeng kepandaian banyak kelompok termasuk kelas menengah terpelajar, kelas intelektual yang mengklaim bahwa mereka telah memahami para pekerja migran. Pekerja migran menjadi hal menarik baru di sepanjang wilayah, dengan keberadaan sosial ganda, yang biasanya dideskripsikan sebagai “satu kaki di kota–satu kaki di desa”. Semua orang yang mengklaim paham akan padatnya massa pekerja baik sektor ekonomi formal maupun informal kedapatan sedang meraba-raba mencari jawabannya. Serangkaian kepingan pendapat di surat kabar dan portal web hanya menunjukkan jargon kebijakan yang sulit dipahami dan gagasan usang mengenai pemisahan desa-kota di berbagai bagian di wilayah ini. Dalam situasi seperti ini, celah-celah pada kekuasaan negara menjadi nyata. Kami menyaksikan nyaris hilangnya mesin pemerintahan dan krisis manajemen selama pandemi di sepanjang wilayah tersebut. Sebaliknya, ada tontonan-tontonan yang nyata, seperti alat-alat yang ditabuh, lampu-lampu yang menyala, dan helikopter angkatan udara yang menebarkan bunga untuk para pekerja kesehatan di India. Pandemi ini bahkan lebih menjadi sumber kepanikan di kalangan masyarakat karena buruknya kebijakan dan tindakan yang dirancang di seluruh Asia Selatan. Mungkin ada pengecualian di sana sini, namun tetap ada kegagalan yang sama dalam cara negara-negara di Asia Selatan memandang manusia yang menghadapi suatu pandemi.

Dalam konteks ini, migrasi kembalinya para pekerja migran menjadi krisis baru dalam wilayahnya, yang menggarisbawahi absennya pendekatan empatik. Sebagian besar diskusi di seluruh Asia Selatan dalam konteks COVID-19 berkisar di seputar kerumitan migrasi. Semua orang tiba-tiba diingatkan pada hal yang telah lama diketahui: pekerja migran adalah tulang punggung yang substansial dalam perekonomian. Setiap rumah tangga kelas menengah di kota-kota Asia Selatan diuntungkan karena bantuan pada pekerja migran. Tetapi, sayangnya, pekerja ini hanya dianggap sebagai suku cadang penggerak mesin, dari pada sebagai manusia yang signifikan, dengan emosi, keinginan, dan kepekaan. Ini bisa secara umum dilihat di seluruh wilayah. Bangladesh tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap kekacauan dalam industri garmen, yang merupakan penyedia sejumlah besar lapangan kerja di negeri ini, dan oleh karena itu banyak pekerja pulang-pergi antara Dhaka dan kota serta desa mereka dengan harapan dapat mendapatkan pekerjaan. Bangladesh juga gagal dalam merumuskan rencana bagi para pekerja yang

baru datang dari jauh, seperti dari India dan Nepal. Pekerja yang dulunya berkontribusi bagi ekonomi remitansi juga menjadi migran tanpa kebangsaan di India. Mereka kembali ke negara asal yang tidak mensyukuri keberadaan mereka. Pekerja Nepal yang kembali dari India ke Nepal harus berjalan bermil-mil dalam perjalanan yang sulit, tanpa memperoleh perhatian selama perjalanan mereka. Di India, pengaturan antrian dilakukan berdasarkan perbedaan kelas: penerbangan disiapkan untuk migran yang hendak kembali dari luar negeri, tetapi tidak ada fasilitas bagi pekerja migran dalam negeri. Meskipun seringkali tidak dilaporkan, situasi pekerja Pakistan juga tidak lebih baik. Para pekerja ini, baik yang bekerja pada sektor formal dan informal, hanya dilihat sebagai tenaga kerja yang bisa dijual. Mereka tidak dipandang sebagai manusia dengan seperangkat sentimen, mitologi, folklore, kebudayaan, dan kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjuk pada pentingnya rekonfigurasi Asia Selatan sebagai suatu kategori sosial yang terdiri atas para pekerja.

› **Untuk sosiologi Asia Selatan yang secara emosional jujur**

Seseorang seharusnya menghindari logika dominan mengenai negara dan geopolitik di Asia Selatan sehingga bisa mendalami suatu sosiologi Asia Selatan yang bernuansa dan secara emosional jujur. Dengan sosiologi seperti ini, seseorang dapat bekerja membangun utopia-utopia terkini untuk suatu masyarakat Asia Selatan, di mana perasaan dan nalar dapat digabungkan untuk suatu pemahaman yang lebih baik mengenai realitas sosial. Sosiologi yang semacam ini seyogyanya lebih peka terhadap masyarakat dengan emosi yang cepat berubah. Karena, dalam kerangka sentimen yang relatif lebih cair, kita mungkin bisa bergeser lebih dekat satu sama lain, menjadi setara dan mampu berempati, serta berbelas-kasih. Sayangnya, kebijakan “tetangga lebih dulu” yang banyak dipuji sekadar menjadi siasat diplomatik dari pada sebagai bentuk dari kebersamaan sosial-kultural. Kebijakan seperti itu mengandung konotasi bahwa India lebih superior dibanding negara tetangga yang lain dan karena itu harus mengurus mereka. Kompleks superioritas ini runtuh ketika menghadapi pandemi dan konsekuensinya berupa melemahnya negara, meningkatnya kesengsaraan rakyat, dan sirnanya harapan. Ketimbang kebijakan yang sekedar pencitraan, akan lebih baik apabila kita semua, di dalam dan di luar perbatasan, bisa bersama-sama meninggalkan tantangan ini. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Dev Nath Pathak <dev@soc.sau.ac.in>

› Sosiologi Publik: Menghadapi Pandemi

oleh **Michele Grigolo** dan **Craig Lundy**, Universitas Nottingham Trent, Inggris Raya

Saat ini adalah masa-masa sulit yang menantang sosiologi publik dalam banyak hal. Penyebaran COVID-19 telah memperlebar disparitas dan ketimpangan dalam masyarakat. Pandemi ini telah membangkitkan kembali peran kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, akan tetapi logika laba yang telah merasuki berbagai wilayah kehidupan bersama, termasuk pendidikan, sedang kembali menancapkan taringnya ketika pandemi, katanya, mulai berhasil dikendalikan. Di sini kami hendak melaporkan pengalaman sosiologi publik di Universitas Nottingham Trent (NTU), di Inggris Raya, dan secara khusus program MA kami yang berintikan sosiologi publik. Dengan ini kami berharap bisa memicu refleksi bersama tentang sosiologi publik dalam situasi pandemi, dan membuka kesempatan bagi mereka yang tertarik dengan sosiologi publik untuk berkumpul dan mengembangkan jejaring dan kolaborasi lebih lanjut.

Sebagai permulaan, kami ingin mengklarifikasi apa yang kami maksud dengan “sosiologi publik.” Dalam Pidato Presidensial ASA tahun 2005 yang sangat menarik, Michael Burawoy memahami “sosiologi publik” sebagai dialog antara para sosiolog dengan publik mereka untuk menghasilkan suatu agenda bersama. Kami sepakat. Meski demikian, dalam pandangan kami para mahasiswa di program sosiologi kami bukan sekedar “publik pertama” kami – mereka sendiri adalah sosiolog publik. Dengan demikian mereka bukan hanya penerima pedagogi, melainkan mitra pencipta ilmu pengetahuan sekaligus praktisi komunitas yang aktif sejak awal. Ini menunjukkan bahwa pendekatan kami terhadap sosiologi publik di NTU berpusat pada apa yang kami sebut dengan relasi berulang (*recursive*) antara pedagogi, riset dan praktik. Seperti bintang-bintang dalam konstelasi Zodiak, tiap unsur bergantung pada unsur-unsur lain dalam hal makna, dukungan dan pengayaan. Meskipun tidak setiap aktivitas sosiologi publik perlu secara eksplisit melibatkan semua bagian dari segi tiga tersebut, banyak yang melakukannya, dan semua

berkontribusi dalam menguatkan ikatan antara ketiganya dengan cara berbeda-beda.

Pendekatan ini menentukan isi dan pengelolaan program MA Sosiologi kami. Modul-modul kami membicarakan sisi-sisi yang berbeda dari sosiologi publik, dari teori, metodologi hingga pendekatan-pendekatan praktis. Dalam modul pembelajaran berbasis layanan (*Service Learning*) kami, para mahasiswa bekerjasama dengan organisasi-organisasi nirlaba lokal, membuat suatu proyek khusus yang membutuhkan kemampuan mahasiswa dalam menanggapi suatu kebutuhan atau keinginan organisasi-organisasi tersebut. Kesemua ini menyangkut “belajar bersama” dan bukan “belajar dari,” dan juga tentang menjadi bagian dari suatu proses dengan pemahaman bahwa proses sangat menentukan dalam hal pengetahuan dan perubahan. Berpijak pada kerjasama tersebut, mahasiswa dapat menghasilkan suatu laporan bagi organisasi mitra mereka, atau, jika mereka kehendaki, menulis artikel untuk suatu jurnal akademik – dua alternatif terhadap penulisan tesis disertai konvensional yang bertujuan, dengan cara berbeda-beda, untuk mendorong kontribusi mahasiswa bagi sosiologi publik sejak dini.

Meskipun para anggota tim kami punya banyak kemiripan – misalnya komitmen terhadap keadilan sosial dan penghargaan terhadap pendekatan “berulang” dalam sosiologi publik seperti diterangkan tadi – haruslah ditekankan bahwa ada banyak variasi dan perbedaan di antara kami dalam usaha mengembangkan sosiologi publik. Lagi pula, realitas sesungguhnya dari sosiologi publik di NTU terus berubah, di kala kami belajar dari yang lain dan tumbuh sebagai manusia dan sebagai suatu kolektif. Bagi kami dua hal itu adalah keutamaan. Dua hal itu juga menjelaskan mengapa sosiologi publik bagi kami lebih mirip “sosiologi publik kritis,” sejauh istilah tambahan ini menunjukkan kehendak untuk mendorong refleksi dan praktik kritis di antara para peserta.

“Ini bukan soal kembali ke normal karena kenormalan tersebut adalah juga bagian dari persoalan”

Selain melalui program MA kami, kerja sosiologi publik kritis ini juga dilakukan melalui beberapa cara lain. Pada tahun 2017 kami mengadakan suatu simposium dengan eponim tentang sosiologi publik kritis di NTU, didanai oleh The British Sociological Association, dan pada tahun 2019 kami menerbitkan riset tentang pedagogi kami di *Journal of Higher Education Outreach and Engagement* (“Evaluating the Complexity of Service-Learning Practices: Lessons From and For Complex Systems Theory” oleh Burton, Hutchings, Lundy dan Lyons-Lewis). Beberapa anggota tim kami telah menggunakan riset aksi partisipatif untuk meneliti pertanyaan-pertanyaan empiris tentang kerja dan pekerjaan bersama organisasi-organisasi di sektor kerelawanan, dan beberapa jalur baru saat ini sedang dikembangkan, misalnya tentang hak asasi manusia di Nottingham. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, staf akademik, mahasiswa dan mitra-mitra komunitas telah terlibat, bekerjasama demi manfaat bersama.

Pandemi yang terjadi saat ini telah memaksa kami untuk menilai ulang keterlibatan kami dalam sosiologi publik kritis. Kami mulai dengan pertanyaan-pertanyaan seperti: Bagaimana pandemi ini melebarkan ketimpangan yang ada? Tindakan untuk mengendalikan pandemi macam apa yang diperlukan dan bisa dipertanggungjawabkan? Bagaimana kita bisa tetap bekerja dalam situasi seperti ini? Apakah kerja kita perlu mengubah arah dan isinya? Bagi kami, jawaban apapun terhadap pertanyaan-pertanyaan itu harus tetap melibatkan pedagogi, riset, dan praktik. Saat membuat tulisan ini (Mei 2020), pemerintah Inggris Raya telah mulai melonggarkan “lockdown” (karantina wilayah). Kami mulai mengajak bicara para mitra komunitas kami tentang bagaimana COVID-19 berdampak pada mereka dan komunitas-komunitas rentan di Nottingham. Memandang ke depan, pikiran kami disibukkan dengan bagaimana

sosiologi publik bisa menanggapi pandemi ini dengan sebaik mungkin, dengan cara yang melindungi mereka yang rentan dan memberdayakan tindakan komunitas. Saat sektor pendidikan tinggi menghadapi pemotongan anggaran besar-besaran, menambahi pemotongan yang sudah terjadi sebelumnya, kami bertanya-tanya bagaimana momentum ketidakpastian dan ketidakstabilan yang mendalam ini bisa membuka peluang untuk melawan logika laba yang mendominasi sistem pendidikan di Inggris Raya dan untuk membingkai ulang makna dan fungsi pendidikan dalam masyarakat.

Pada akhirnya, kami ingin keluar dari pandemi dengan perasaan yang lebih kuat sebagai bagian dari komunitas yang lebih besar. Melawan rasa takut dan pengasingan yang dihasilkan oleh karantina wilayah saat ini, penting bagi kami, sebagai sosiolog publik kritis, untuk menegaskan kembali pentingnya masyarakat dan yang sosial dalam membangun kembali relasi antarmanusia. Ini bukan soal kembali ke normal karena, sebagaimana ditunjukkan banyak orang dengan tepat, kenormalan adalah juga bagian dari persoalan. Melainkan, ini adalah tentang bergerak maju menuju tempat yang lebih baik. Sosiologi dan sosiologi publik, menurut kami, harus membantu hal ini dengan cara yang kritis. Karena kesemua alasan tersebut, kami ingin mendengar tanggapan dari para ilmuwan dan mahasiswa sosiologi publik tentang kerja-kerja dan pemikiran mereka, dengan harapan untuk menggalang kerjasama di antara kita yang menghargai dan mempromosikan peran sosiologi publik. Silakan menghubungi kami bila Anda tertarik berpartisipasi dalam diskusi ini. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada:
Michele Grigolo <michele.grigolo@ntu.ac.uk>
Craig Lundy <craig.lundy@ntu.ac.uk>

› Penjarakan Sosial: Relevansi Sosiologi

oleh **Syed Farid Alatas**, National University of Singapore, Singapura



Menjaga jarak (fisik) selama pandemi Covid-19. Kredit: Mick Baker/flickr.com. Hak tertentu dilindungi.

Topik ini merupakan suatu alasan untuk memperkenalkan pembaca dengan sosiologi. Namun, sebagai imbalan karena telah mengikuti saya, saya pada akhirnya akan membahas topik penjarakan sosial (*social distancing*), namun dengan klaim bahwa istilah tersebut merupakan penamaan yang keliru (*misnomer*). Namun kita perlu mengetahui sosiologi itu apa untuk dapat memahami poin tersebut.

› Apakah sosiologi itu?

Kita dapat mulai dengan pendiri disiplin ilmu ini, Abdul al-Rahman Ibnu Khaldun (th. 1332-1406 sesudah Masehi), salah seorang ilmuwan Muslim yang paling menakjubkan dari zaman pra-modern. Ia mendirikan suatu ilmu yang baru samasekali yang dinamakannya ilmu masyarakat manusia (*'ilm al-ijtima' al-insani*). Sekarang ilmu ini dinamakan sosiologi: kajian terhadap masyarakat. Menurut sosiolog besar Jerman kelahiran Hungaria, Karl Mannheim (1893-1947), masyarakat itu sendiri merujuk pada beragam bentuk kehidupan bersama manusia. Bentuk-bentuk tersebut, yang mencakup kontak sosial, jarak sosial, isolasi, individualisasi, kerjasama, persaingan, pembagian kerja, dan integrasi sosial, memungkinkan manusia untuk berkumpul, hidup, dan berinteraksi dengan berbagai tipe perkumpulan dan kelompok yang membentuk komunitas dan masyarakat. Merupakan hal yang penting untuk memahami sifat kehidupan masyarakat dan

kelompok apabila kita ingin memahami perilaku dan peristiwa sosial. Ibnu Khaldun membantu kita untuk memahaminya.

Untuk menunjukkan pentingnya pengetahuan mengenai sifat masyarakat agar dapat membedakan antara fakta dan fiksi dalam sejarah, Ibnu Khaldun memberikan contoh perihal diskusi dalam karya sejarahnya mengenai turunnya penguasa Maroko Idris bin Idris (803-828 sesudah Masehi) dari dinasti Idrisid. Para penebar desas-desus telah mengemukakan bahwa Idris yang lebih muda merupakan produk dari suatu hubungan perzinahan antara ibunya dan Rashid, seorang mitra dari kaum Idrisid. Namun faktanya ialah bahwa ayah Idris menikah dengan warga suku Berber dan hidup bersama mereka di padang pasir. Poin sosiologis Ibnu Khaldun ialah bahwa sifat kehidupan di padang pasir adalah sedemikian rupa sehingga tidak mungkin terjadi sesuatu seperti hubungan luar nikah tanpa diketahui seluruh komunitas yang mengenal mereka. Jika kita memiliki pengetahuan mengenai masyarakat padang pasir, cara hidup para nomad padang pasir, cara mereka berinteraksi, artinya, kondisi sosial mereka, kita akan menyimpulkan bahwa kecil kemungkinan bahwa Idris dapat dilahirkan dari suatu hubungan yang tidak sah.

Sosiologi, dengan demikian, membahas pemahaman terhadap hal yang bersifat sosial dan bagaimana faktor-faktor sosial memainkan peran dalam perkembangan komunitas, masyarakat dan peradaban. Dengan tujuan menjelaskan interaksi, kerjasama dan pergaulan manusia, ide-ide sosiologi

dengan demikian sering keluar dari bidang akademik. Ide-ide sosiologi tersebut diambil dan diperluas oleh para politisi dan mempengaruhi perumusan kebijakan di negara-negara di seluruh dunia.

› Rajaratnam dan Ronald Reagan mengenai Ibnu Khaldun

Mendiang S. Rajaratnam (1915-2006), menteri luar negeri (1965-1980) dan wakil perdana menteri (1980-1985) Singapura menggunakan ide-ide Ibnu Khaldun untuk merefleksikan masa depan Singapura di abad kedua puluh satu.

Dalam suatu ceramahnya pada bulan Desember 1979¹ ia membahas persoalan bagaimana suatu masyarakat dapat memperoleh dan memanfaatkan keutamaan (*virtu*), dalam artian ciri-ciri utama (*virtuous*) menurut Machiavelli seperti kebanggaan, keberanian, keterampilan, ketangguhan, dan kebangsaan yang memungkinkan seseorang untuk menguasai suatu situasi. Keutamaan diperlukan suatu masyarakat untuk menghadapi kekuatan-kekuatan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan teknologi yang mendorongnya ke masa depan, dalam mana kegagalan untuk bertindak akan mengakibatkan kemundurannya. Rajaratnam sedang merumuskan pandangannya di masa Revolusi Iran, yang juga mendorongnya untuk merefleksikan kebangkitan dan kemunduran peradaban Islam. Hal ini mendorongnya, atas saran temannya, sosiolog Syed Hussein Alatas, untuk membaca Al-Muqaddimah, buku tiga jilid oleh Ibnu Khaldun yang merupakan suatu pengantar ke sejarah orang Arab, Berber dan bangsa-bangsa lain.

Rajaratnam mencatat bahwa konsep utama Ibnu Khaldun, ‘*asabiyya*, yaitu perasaan solidaritas kelompok, terutama suku-suku, desa, dan pemukiman perintis merupakan hal yang menjadikan masyarakat nomad lebih tangguh, ulet, berani, dan percaya diri dibandingkan dengan orang-orang yang hidup di perkotaan. Tali-tali pengikat ‘*asabiyya* memungkinkan para nomad ini untuk menduduki kota-kota dan membentuk dinasti-dinasti baru. Wawasan yang diperoleh Rajaratnam mendorongnya untuk berpandangan bahwa ‘*asabiyya* menurut Ibnu Khaldun adalah keutamaan (*virtu*) menurut Machiavelli.

Sekitar dua tahun setelah ceramah Rajaratnam, suatu kutipan terkenal dari Ibnu Khaldun dirujuk oleh Presiden AS Ronald Reagan: “Perlu diketahui bahwa pada awal suatu dinasti, pajak meraih pendapatan besar dari asesmen kecil. Pada akhir dinasti pajak meraih pendapatan kecil dari asesmen besar. Penyebabnya ialah karena di kala dinasti mengikuti cara-cara agama (*sunan*), dinasti tersebut hanya mengenakan pajak sesuai dengan ketentuan hukum agama, seperti pajak amal, pajak bumi, dan pajak untuk orang dewasa (*poll tax*).”

Presiden Reagan merujuk pada Ibnu Khaldun sebagai suatu eksponen awal dari teori ekonomi sisi penawaran (*supply-side*), doktrin yang melandasi berbagai kebijakan pemerintahannya, yang berpandangan bahwa suatu pemotongan pajak akan menstimulasi ekonomi, yang akan menghasilkan pendapatan lebih besar dari pajak. Sambil merujuk pada Ibnu Khaldun, Reagan berkata: “kita sedang berusaha untuk menerapkan asesmen kecil dan pendapatan besar.”²

Bagi Ibnu Khaldun, penurunan ‘*asabiyya* yang disertai perburuan kemewahan di kalangan kelas yang berkuasa akan menghasilkan peningkatan pemungutan pajak. Masalah lintas generasi timbul manakala elite yang berkuasa mengembangkan gaya hidup yang lebih canggih dan mewah, yang menuntut kenaikan pajak dan asesmen. Hal ini pada akhirnya mencapai tingkatan yang berakhir dengan pengurangan atau penghentian kegiatan produktif, yang pada gilirannya menurunkan pendapatan dari pajak, yang pada mulanya menyebabkan penurunan dalam produksi dan siklus fiskal dari dinasti, dan pada akhirnya kematiannya. Masalah ini juga memprihatinkan Rajaratnam. Ia percaya bahwa di kala Singapura memasuki abad kedua puluh satu dan harus “mengemudi secara aman melalui *fortuna*-permainan keluatan-kekuatan dunia yang berubah-ubah,” yang diperlukan adalah *virtu* Machiavelli atau ‘*asabiyya* Ibnu Khaldun.

› Durkheim dan kajian terhadap bunuh diri

Sementara psikologi merupakan ilmu mengenai pikiran dan kesadaran manusia, sosiologi mempelajari kesadaran kolektif (*collective conscience*) sebagai suatu fakta sosial (*social fact*). Kesadaran kolektif mencakup keyakinan dan sentimen moral, keagamaan dan kognitif yang dijumpai pada orang dan mempersatukan masyarakat. Penjelasan psikologis ditujukan pada individu-individu tertentu, sedangkan penjelasan sosiologis bertujuan untuk memahami sebab-sebab bagi suatu kelompok secara menyeluruh atas dasar ciri-ciri kelompok. Émile Durkheim (1858-1917), salah seorang pendiri disiplin ilmu sosiologi modern, dan seseorang yang berminat mendirikan untuk mendirikan sosiologi sebagai suatu disiplin yang berbeda, menggunakan kajian bunuh diri untuk memperlihatkan bagaimana sosiologi berbeda dengan psikologi.

Durkheim mengkaji sosiologi bukan hanya dengan tujuan mengkaji suatu fenomena sosial yang penting melainkan untuk menunjukkan pula kepada komunitas ilmiah bahwa sosiologi dapat berperan dalam menjelaskan suatu tindakan yang nampaknya merupakan tindakan individu yang cukup dijelaskan dengan penjelasan psikologis saja.

Durkheim ingin menjelaskan perbedaan angka bunuh diri pada kelompok-kelompok berbeda. Andaiakta diasumsikan bahwa faktor-faktor biologis dan psikologis pada kelompok berbeda tetap konstan, perbedaan angka bunuh diri antara kelompok berbeda kemungkinan disebabkan oleh variasi dalam faktor-faktor sosiologis, ketimbang oleh faktor-faktor biologis dan psikologis. Ia secara empiris menguji teorinya dengan, pertama-tama, mengesampingkan faktor-faktor lain. Misalnya, ia mengesampingkan ras sebagai suatu faktor karena di antara kelompok-kelompok dari ras sama terdapat angka bunuh diri yang berbeda.

Fakta-fakta sosial yang digunakan Durkheim untuk menjelaskan perbedaan angka bunuh diri di antara kelompok-kelompok yang berbeda adalah tingkatan integrasi dan tingkatan regulasi dalam suatu masyarakat atau kelompok. Perbedaan dalam tingkatan integrasi dan regulasi dapat mengakibatkan salah satu dari tipe bunuh diri: bunuh diri egoistis, bunuh diri altruistis, bunuh diri anomis, dan bunuh diri fatalistis.



Marilah kita lihat dua contoh dari tipe-tipe bunuh diri tersebut. Bunuh diri egoistis terjadi karena integrasi seorang individu dengan kelompoknya kurang baik. Jika kesadaran kolektif lemah dan orang dibiarkan mengejar kepentingan pribadinya dengan cara apapun yang mereka inginkan, maka egoism yang tak terkendali ini dapat mengakibatkan ketidakpuasan pribadi. Tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi, dan bahkan kebutuhan yang terpuaskan akan mengarahkan ke lebih banyak kebutuhan lagi dan, akhirnya, ke ketidakpuasan dan, pada orang-orang tertentu, ke bunuh diri. Namun, jika individu hidup dalam kelompok yang integrasinya kuat seperti kelompok keluarga atau keagamaan, hal ini dapat menyediakan suatu kesadaran kolektif yang kuat dan mencegah dorongan untuk bunuh diri.

Bunuh diri altruistis terjadi manakala integrasi sosial terlalu kuat. Suatu contoh terkenal adalah bunuh diri massal para pengikut Pendeta Jim Jones di Jonestown, Guyana, pada tahun 1978. Para pengikut sang Pendeta dengan sukarela minum racun demi diri Pendeta tersebut dan memberikannya kepada anak-anak mereka pula. Mereka dibujuk atau dipaksa untuk melakukan bunuh diri karena menjadi bagian dari masyarakat pengikut yang terintegrasi secara ketat dan percaya bahwa mereka wajib melakukannya.

Sebagaimana telah kita lihat, sosiologi membahas hal yang bersifat sosial: interaksi, kerjasama, dan pergaulan di antara manusia, dan bagaimana faktor-faktor sosial memainkan peran dalam perkembangannya. Pesan apa yang disampaikan hal ini kepada kita mengenai penjarakan sosial?

› **Apakah hal itu benar-benar penjarakan sosial?**

Kita mulai mendengar istilah “penjarakan sosial” di masa pandemi corona. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, praktik penjarakan berarti “menjaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter (3 kaki) antara anda sendiri dengan orang lain.” Banyak yang merujuk pada hal ini sebagai penjarakan sosial, yaitu praktik penjarakan fisik antara orang-orang yang berada di luar rumah, tidak berkumpul dalam kerumunan, dan menghindari kumpulan massa.

Yang dimaksudkan dengan penjarakan sosial sebenarnya penjarakan fisik. Sesungguhnya, banyak definisi mengenai penjarakan sosial menyatakan bahwa hal itu dikenal pula sebagai penjarakan fisik. Ini memberikan kesan yang keliru bahwa yang sosial dan fisik merujuk pada hal yang sama.

Jarak sosial merupakan suatu konsep yang penting dalam sosiologi. Di bidang kesehatan masyarakat istilah tersebut relatif baru, tetapi di bidang sosiologi dapat dilacak kembali ke periode sebelum Perang Dunia II. Konsep tersebut tidak bermakna sama dengan jarak fisik atau spasial, meskipun ini tidak berarti bahwa jarak sosial dan fisik tidak dapat berhimpitan.

Jarak sosial merujuk pada ketiadaan kontak sosial, terlepas dari masalah jarak fisik atau kedekatan. Kontak sosial itu sendiri dapat bersifat primer, ditandai dengan pergaulan yang sering dan lebih intim, yang dapat melibatkan ataupun tidak melibatkan hubungan tatap muka visual dan pendengaran tanpa perantara dengan orang-orang dalam kelompok primer kita seperti anggota keluarga, rekan, dan teman. Atau kontak sosial dapat bersifat sekunder, melibatkan pergaulan yang kurang sering dan kurang intim dengan orang-orang yang bukan dari kelompok kita. Bagaimanapun juga, kontak sosial menyangkut kedekatan sosial dan hubungan sosial antarindividu, terlepas dari tingkatan kedekatan fisik.

Dua orang dapat secara fisik berjarak tetapi secara sosial dekat atau inti, artinya, memiliki kontak sosial. Jika suatu pasangan, yang dipisahkan oleh perbatasan nasional karena pembatasan terhadap perjalanan yang diterapkan untuk menghentikan penyebaran virus corona, saling berjumpa melalui media sosial mereka tidak melaksanakan praktik penjarakan sosial. Mereka mempunyai kontak sosial yang intim, walaupun terdapat jarak fisik.

Di lain pihak, kedekatan fisik tanpa kontak sosial dimungkinkan. Dalam hal ini, kedekatan fisik berlangsung bersamaan dengan jarak sosial. Ambillah, misalnya, dua orang yang menyeberang jalan di tempat penyeberangan. Mereka asing satu sama lain walaupun secara fisik mereka mungkin dekat. Tindakan atau perilaku mereka tidak berorientasi terhadap satu sama lain dan tidak ada kontak sosial di antara mereka. Suatu contoh lain adalah pembelian sesuatu di toko bahan makanan. Ada kedekatan fisik, tetapi kontak sosial terbatas pada suatu transaksi keuangan yang singkat.

Di masa pandemi ini kita perlu mendorong dan menegakkan penjagaan jarak fisik, bukan penjarakan sosial. Penjarakan fisiklah yang diperlukan untuk membatasi penyebaran virus corona. Justru karena penjarakan fisik dan ketiadaan kemungkinan bagi peluang bersosialisasi dengan kedekatan fisiklah maka kita perlu mendorong bentuk-bentuk kontak sosial yang berbeda, bukan penjarakan sosial.

Sudah tiba saatnya untuk berpikir dan berbicara secara jelas mengenai apa yang kita maksudkan. Kita harus berpikir mengenai penjarakan fisik dan kontak sosial dan bagaimana kita dapat meningkatkan kedekatan sosial walaupun kita harus menjaga pemisahan fisik satu sama lain. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Syed Farid Alatas <alatas@nus.edu.sg>

1. “Raja takes a look at the past and the future,” *The Straits Times*, 21 Desember 1979.
2. Robert D. McFadden, “Reagan cites Islamic scholar,” *The New York Times*, 2 Oktober 1981.

Perintis

Sosiologi India Modern

oleh **Mir Suheel Rasool**, University of Kashmir, India



Yogendra Singh di 2018.

Yogendra Singh (1932-2020) adalah salah satu sosiolog India pascakolonial yang terkemuka. Singh adalah tokoh yang namanya menjulang di kalangan intelektual dan akademisi karena telah menghasilkan karya-karya rintisan dalam sosiologi India seputar konsep-konsep seperti stratifikasi sosial, perubahan/kontinuitas sosial, sosiologi India, modernisasi dan perubahan budaya. Karya-karyanya mencakup puspa ragam tema dan pendekatan karena dia berselancar dari satu topik ke topik lain dengan ketertarikan dan kesenangan yang sama.

Profesor Singh memelopori kajian dan telaah mengenai modernitas dan tradisi pada masyarakat India. Sebagian

besar karyanya berkenaan dengan modernitas, tradisi dan stratifikasi sosial. Pendekatan yang terintegrasi ia gunakan untuk memahami dan menganalisis masyarakat India. Magnum opusnya di tahun 1973, [Modernization of Indian Tradition](#), yang luar biasa dan banyak dipuji itu membuka cakrawala baru bagi sosiologi India. Dia juga banyak mendapatkan pujian atas sepuluh monograf dan buku yang ditulisnya, termasuk *The Image of Man* (1983), [Ideology and Theory in Indian Sociology](#) (2004), dan seri suntingan *Social Sciences: Communication, Anthropology, and Sociology* (2010) di mana dia membahas pemaknaan dari tanda-tanda dan komunikasi, bekerja pada persinggungan antara teori informasi dan sosiologi.

Profesor Singh memiliki keyakinan yang kokoh, mendorong perbedaan pendapat dan menggunakan dialog terbuka sebagai metode diskursus sosiologis. Bahkan selama pandemi ini, perhatian utamanya adalah menemukan kembali paradigma-paradigma sosiologis untuk mendekonstruksi skenario krisis dari masyarakat post-industrial. Singh adalah seorang realis tulus dan meyakini basis empiris dari teori yang karena itu ia sering dijuluki “ilmuwan sosial”; sosok yang jauh melampaui regimentasi dari klasifikasi disiplin ilmu yang parokial. [Dalam salah satu artikelnya di Sociological Bulletin](#), dia menekankan pentingnya sosiologi pengetahuan, menyerukan objektivitas dan realisme. Dia menganjurkan pemutusan dari “model referensi” internasional dan membuat suatu [katalog yang cermat dan jitu berdasarkan berbagai tantangan terhadap sosiologi yang terus berkembang](#). Dia menekankan pentingnya studi lapangan yang memungkinkan ciri-ciri eksistensial dan historis yang objektif dari “ruang sosial” dapat direkam dan didokumentasikan. Dia adalah orang yang berkeyakinan teguh pada demokratisasi pengetahuan dan ilmu. Dia mengembangkan sebuah model yang terintegrasi untuk mengkaji aspek-aspek struktural dan kultural dari masyarakat India. Dia adalah orang yang berpandangan bahwa mengembangkan pendekatan khusus sangatlah diperlukan untuk mengkaji konteks spasial tertentu. Dalam salah satu wawancaranya, ia menggambarkan kebangkitan nasionalisme sayap kanan sebagai sesuatu yang [sejalan](#)

[dengan peningkatan kecemasan kelas menengah](#) dan menyarankan kemajuan pendidikan sebagai penawar terhadap “aksentuasi ancaman” pada jenis politik hyper-nasionalistik ini.

Yogendra Singh telah memetakan bagaimana sosiologi India mengembangkan dikursus tematiknya sendiri di seputar “studi-studi pedesaan” dan berjuang keras mewujudkan pribumisasi konsep-konsep sepanjang 1950 hingga 1980. Sosiologi arus utama masih tetap berjangkar pada fungsionalisme Amerika disertai kemunculan pemahaman dialektis-materialis yang mencirikan tahun-tahun tersebut; dua perkembangan yang sama-sama penting dalam membentuk sosiologi India. Singh merasa yakin atas kapasitas inheren sosiologi India untuk melakukan adaptasi dan perubahan lebih lanjut yang melibatkan kontestasi antara pendefinisian dan pengerjaan ulang atas diskursus universal pada sosiologi global dengan pribumisasi yang esensial atas konsepsi-konsepsi yang sejalan dengan historisitas, kekhasan kultural, dan tujuan-tujuan pembangunan sosial dan ekonomi India. Pandangan-pandangannya telah mengilhami kita mengenai bagaimana sosiologi India menentukan diskursusnya sendiri yang khas, lebih dari sekedar mengimpor konsep-konsep sosiologi Barat.

Selama masa hidupnya, Profesor Singh adalah anggota dari beberapa organisasi dan lembaga prestisius. Dia adalah arsitek utama dan salah satu pendiri dari Centre for the Study of Social Systems pada School of Social Sciences di Jawaharlal Nehru University (JNU). Karena sifat rendah hati dan kejujuran intelektualnya, dia tidak pernah terlalu ambisius ketika tiba pada kesempatan menaiki eselon-eselon puncak pada hirarki akademik. Kepedulianannya lebih pada akademik ketimbang politik, sebagaimana tercermin pada tulisan-tulisan yang dihasilkannya sepanjang karir akade-

miknya. Selain mengajar dan merancang berbagai mata-kuliah sosiologi di lembaga pendidikan tinggi di India, dia juga mempersembahkan kepada para murid dan sesama peneliti nilai dari cara-cara memahami masyarakat yang tercerahkan dan radikal. Selama masa tuanya, dia tanpa kenal henti terus melakukan kegiatan penelitian dan pengajaran dengan penuh semangat dan energi.

Cara berpikir dan menulis Profesor Singh memiliki pengaruh yang tak lekang pada sosiologi kontemporer dan masyarakat India. Dia sangat fasih dalam pendekatannya dan tidak percaya cara-cara berpikir yang penuh keaburan. Dia penuh kepercayaan dalam mengkaji fakta-fakta dan kehidupan sosial aktual yang menentukan tindakan dan sikap individu, sementara itu juga mengharapkan dapat menyaksikan masyarakat yang bertransformasi secara konstruktif pada saat ia masih hidup. Dia melakukan kajian-kajian yang tajam dan mendalam mengenai isu-isu paling mewakili yang berpengaruh pada masyarakat India. Banyak karyanya yang relevan dan bermanfaat bagi dunia kontemporer sebagaimana halnya saat ditulis untuk pertama kali.

Dengan kepergiannya, India kehilangan sosiolog visioner yang kontribusi dan kiprahnya dalam mengarahkan dan memodernisir sosiologi India tidak akan pernah dapat disepelekan. Warisannya yang tak terhapuskan meninggalkan jejak yang dalam di hati dan pikiran murid-muridnya dalam menumbuhkan semangat untuk melakukan penelitian dan kajian analitis yang penuh rasa penasaran atas berbagai tema yang dihadapi masyarakat. Kita akan terus mengenangnya sebagai sosiolog, guru, filsuf, dan sosok dengan integritas intelektual yang tak bercela. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Mir Suheel Rasool <mirsuhailscholar@gmail.com>

› Tentang Urgensi Mengintegrasikan (Kembali) dengan yang Radikal

oleh **S.A. Hamed Hosseini**, Universitas Newcastle, Australia



Untuk mengembangkan perlawanan transformatif, kita harus mencari integrasi antara aktivisme dan keilmiawanan transformatif. Karya seni Hamed Hosseini.

CCOVID-19 telah menunjukkan bahwa transformasi radikal tidak hanya mungkin terjadi tetapi tidak lagi dapat dihindari untuk mencegah ledakan yang lebih besar. Hidup melalui status yang lambat atau tidak berkembang – di mana “hidup sejahtera” secara kolektif lebih diutamakan di atas kesejahteraan hedonistik – telah menyadarkan kita pada ketidakmungkinan untuk kembali ke situasi normal lama. Sekaranglah waktunya untuk mengartikulasi pikiran kita dari virus kognitif fatal dari mitos kapitalistik “Tidak ada alternatif.” Meskipun menyakitkan, karantina wilayah telah memberikan momen refleksi tentang di mana kita berada, bagaimana kita sampai di sini, dan apa yang dapat kita lakukan untuk menyatukan imaji-imaji kreatif dan tindakan-tindakan politik kita untuk membentuk dunia pasca pandemi.

› Di mana kita berada?

Singkatnya, dengan ketiadaan aksi-aksi radikal yang komprehensif di seluruh dunia, kita manusia berada di jalan menuju keruntuhan peradaban yang menyeluruh. Keruntuhan tersebut kemungkinan besar akan seperti spiral dari peristiwa-peristiwa bencana secara berjenjang: bencana iklim regional, pandemi-pandemi global, resesi-resesi ekonomi, krisis pangan, air, dan energi yang parah yang menyebabkan perpindahan-perpindahan penduduk dan kerusakan-kerusakan massal, konflik global dan perang saudara, bencana iklim yang lebih parah, dan percepatan penurunan keanekaragaman hayati saat ini.

› Bagaimana kita bisa sampai di sini?

Untuk mempersingkat cerita yang panjang, bentuk spesifik dari “peradaban” yang berakar dari kolonialisme Eropa yang terjerat kapitalisme modern, telah mencapai peningkatan penuh secara global dalam beberapa dekade terakhir. Sistem peradaban dunia ini dicirikan oleh ketergantungan mendasar pada: (1) *Modal (Capital)* yang menggantikan tenaga kerja sebagai sumber nilai tertinggi; (2) *Karbon (Carbon)*—bahan bakar fosil atau secara lebih umum dikatakan, *ekstraktivisme*; (3) Pertumbuhan ekonomi *kompulsif (Compulsive)* melalui komodifikasi tanpa henti dari hubungan-hubungan politik) sosio-ekologis dan perampasan massal multi-abad atas kepemilikan bersama, yang dipertahankan melalui promosi konstan budaya konsumeris di seluruh dunia; (4) *Kolonialitas (Coloniality)*, yaitu relasi kekuasaan yang terstratifikasi dan seperangkat pengetahuan yang diperlukan untuk menjaga integritas hierarki interseksional; dan akhirnya (5) *Politik koruptif*

(*Corruptive politics*), yang didorong oleh kebangkitan modal monopoli keuangan, kemajuan-kemajuan dalam pengawasan yang didorong oleh kepentingan korporasi-negara, datafikasi, bio dan neuro-teknologi, dan peperangan. Sebut saja *lima karakteristik intrinsik di atas*, 5C.

Sistem ini pada dasarnya rawan krisis karena 5C membutuhkan perluasan kapasitas planet yang tak ada habisnya. Sejak kita telah melewati batas bio-kapasitas bumi, dan tanpa adanya solusi teknologi nyata yang dapat mempertahankan kapasitas ini, karakteristik yang sama di balik naiknya peradaban modern saat ini telah menjadi penyumbang bagi kehancurannya.

› De-karbonisasi tidaklah cukup

Mengakhiri salah satu dependensi di atas tanpa menantang yang lainnya akan menghasilkan malapetaka. Ambil contoh de-karbonisasi sebagai solusi paling populer yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga progresif. Teknologi baru yang memanfaatkan sumber terbarukan menghadapi kendala sosio-politik dan ekonomi yang serius. Laju perkembangan mereka terlalu lambat untuk menyelamatkan planet ini. Lebih penting lagi, mereka dianggap oleh sebagian kelas penguasa sebagai sarana potensial untuk memperluas hegemoni kapital.

Apa yang disebut kebijakan pasca-karbon hanya memerlukan ketergantungan sistem pada 5C lainnya, alih-alih mengakhirinya. Struktur sosio-ekonomi dan biopolitik yang mendasari revolusi-revolusi teknologi dan yang telah berkontribusi padanya, harus dipertanyakan dengan mendalam sehingga transisi yang bermakna dapat dimiliki dan dipandu oleh banyak orang. Ini membutuhkan tidak hanya (1) *De-karbonisasi*, tetapi juga (2) *De-kapitalisasi*, (3) *De-growth* (pelambatan pertumbuhan), (4) *Dekolonisasi*, dan (5) *Demokratisasi yang mendalam* dari institusi sosial; yaitu 5D dari perjuangan global untuk menyelamatkan kehidupan yang terorganisir. Jadi, de-karbonisasi, jika dianggap sebagai solusi yang memadai, akan berfungsi sebagai pengalih perhatian dari 4D lain yang sama pentingnya.

› Apa yang bisa kita lakukan, sebagai pegiat akademisi?

Bentuk paling mencolok dari pendekatan reduksionis untuk mengatasi krisis global adalah kebangkitan teknokrasi politik baru-baru ini. Semakin itu gagal, semakin itu akan menjadi otoriter. Universitas-universitas, sebagai sarang inovasi dan pengetahuan mutakhir, telah kehilangan otonominya terhadap industri korporat dan mitra bisnis mereka yang saat ini sering menjadi sumber dukungan utama mereka di era penghematan. Ilmu humaniora dan ilmu-ilmu sosial (HASS) sedang menghadapi krisis identitas. Ia perlu menemukan wacana non-reduksionis di mana HASS dapat memulihkan tujuan historisnya yang hilang. Sebuah “keilmuan radikal transformatif” perlu diciptakan kembali untuk fokus pada praksis pembebasan untuk alternatif-alternatif progresif (seperti yang dipamerkan oleh penulis *The Routledge Handbook of Transformative Global Studies*).

Menanggapi solusi teknokratik yang tidak efektif, baru-baru ini kita menyaksikan ledakan kreativitas komunal yang termotivasi sendiri dan proyek akar rumput yang mendorong untuk transisi sistematis yang lebih bermakna dalam beragam ben-

tuk. Kebutuhan historis dari pergeseran peradaban yang mendalam dipahami dengan sangat baik oleh gerakan 5D yang semakin bertumbuh.

Tahun 2020-an dapat dianggap sebagai dekade paling penting di abad paling kritis dalam sejarah manusia di mana “menuntut yang tidak mungkin” menjadi satu-satunya pilihan “realistis” untuk memunculkan kekuatan revolusioner. Konjungtur saat ini yang dicirikan dengan meningkatnya krisis ekonomi dan ekobiologis kemungkinan besar akan menghantarkan pada ketidakpuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di zaman kita saat ini, kita telah mencapai status di mana anomali antara teori dan realitas tidak dapat lagi diselesaikan tanpa memperoleh pendapat dari kekuatan radikal di lapangan.

Walau demikian, kekuatan-kekuatan ini beragam, tidak terstruktur, dan berkembang dengan cepat, membuat mereka sulit untuk dipahami. Baru-baru ini, berkat karantina wilayah dan pelambatan yang disebabkan oleh pandemi, peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya telah muncul sebagai kekuatan transformatif melalui keterlibatan daring dari populasi yang lebih luas. Terlepas dari pembebasan potensi-potensi lanskap 5D, sayangnya, hal ini masih menjadi topik yang marginal dalam HASS.

› Perlunya menciptakan secara bersama pengetahuan bersama

Pertanyaan paling mencolok yang kita hadapi dalam keterlibatan kita dengan 5D adalah bagaimana untuk “membangun bersama” sebuah pengetahuan yang inklusif namun dinamis tentang kemunculan lanskap alternatif; sebuah pengetahuan yang pada akhirnya memberdayakan para aktor dan praktik-praktik transformasional ini dan membantu kita menemukan kembali keilmuan kita sebagai keilmuan yang transformatif. Tidak ada alasan untuk percaya bahwa intensifikasi krisis akan secara otomatis mengakibatkan runtuhnya perpecahan yang tidak produktif dalam gerakan kiri global. Harapan bahwa di luar pasar interaksi-interaksi kontingen antara bentuk 5D yang tak terhitung, entah bagaimana, secara ajaib akan muncul paradigma baru yang akan mengakhiri kapitalisme sebelum ia mengakhiri kehidupan di planet ini yang ironisnya menyerupai mitos neoklasik tentang “*the invisible hand*” dan dongeng tentang “*trickle-down*”.

Dalam konteks saat ini di mana kepentingan-kepentingan, hak-hak, dan kebutuhan-kebutuhan komunitas-komunitas dirongrong oleh preferensi Modal, adalah tetap penting dilakukan upaya-upaya sosio-politik yang progresif, yang memiliki perhatian pada masa depan dengan pembangunan yang berkelanjutan, mandiri, adil, dan demokratis, untuk melawan dan membalikkan pagar-pagar pengetahuan kapitalis. Tanpa menyerahkan diri kita pada mentalitas teknokratik di HASS, kemajuan metodologis terkini dalam informatika sosial dapat digunakan secara cermat untuk memberdayakan praksis pembebasan di lapangan. Kekuatan data besar (*big data*) dapat dimanfaatkan untuk bersama-sama menciptakan “pengetahuan bersama” dengan gerakan akar rumput, untuk memandu dan memberi energi pada transisi inklusif menuju peradaban ekologis pasca-5C. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Hamed Hosseini
<hamed.hosseini@newcastle.edu.au>

› Melampaui “Koyaanisqatsi”: Membayangkan Kembali Peradaban

Oleh **Barry Gills**, Universitas Helsinki, Finlandia



Bentuk-bentuk dominan kekuasaan dan organisasi sosial dalam peradaban kita harus dibayangkan kembali secara mendalam dan diubah secara radikal di masa depan kita.

Ada pandangan yang muncul dalam krisis saat ini, diilustrasikan dalam komentar yang berkembang baru-baru ini di seluruh dunia, yang mengungkapkan kesadaran bahwa bentuk tatanan dunia dan peradaban kita saat ini telah membawa kemanusiaan dan “alam” ke dalam krisis besar, dan bahwa kita harus bertindak secara radikal untuk mentransformasi fondasi-fondasinya. Kombinasi, atau “krisis tiga kali lipat” berupa tiga hal—Iklim, Kapitalisme, dan COVID-19—telah mendorong momentum untuk membahas penyebab fundamental dari krisis ini.

› Hidup di masa Koyaanisqatsi

Orang-orang Hopi di Amerika Utara memiliki mitos penting yang sangat relevan dengan situasi kita saat ini: mitos “Koyaanisqatsi”, yang sering diterjemahkan sebagai “kehidupan yang tidak seimbang”, “bentuk kehidupan yang seharusnya tidak ada,” atau “kehidupan yang gila.” Dalam mitos ini, manusia adalah penjaga semua kehidupan, dan tujuan kita adalah menjaga keseimbangan di antara semua bentuk kehidupan, selamanya. Untuk melakukannya, kita sendiri harus memelihara cara hidup yang memas-

tikan keselarasan dengan semua bentuk kehidupan lainnya. Namun di Koyaanisqatsi, manusia telah “kehilangan akal,” dan berlari tanpa tujuan menuju jurang kehancuran yang disebabkan oleh tindakan mereka sendiri. Budaya seperti itu mengabaikan kesatuan yang fundamental dan kesalingterkaitan hidup. Ia melupakan kesucian semua kehidupan. Ia melupakan tujuan sejatinya, dan melupakan saling ketergantungan yang mendalam antara manusia dengan bentuk kehidupan lainnya. Tindakannya “tanpa berpikir” dan merusak. Hanya kebangkitan spiritual yang benar-benar mendalam serta pembaruan budaya dan material yang dapat mengubah arah budaya seperti itu, dan menyelamatkannya dan banyak bentuk kehidupan lainnya dari bahaya dan kehancuran besar yang tak terelakkan yang akan dibawa Koyaanisqatsi.

Kita hidup di masa Koyaanisqatsi. Kita telah terpesona dengan konsep total, seperti “kemajuan”, “modernitas”, “pembangunan”, dan “globalisasi”. Konsep-konsep tersebut telah menjanjikan kita masa depan yang lebih baik. Mereka telah menjanjikan kita kemakmuran materi, masa depan dengan kesehatan, keamanan, kebebasan. Namun kenyataannya, mereka telah menyelubungi proses sejarah yang menyebabkan krisis global saat ini.

Studi tentang “jatuhnya peradaban” dan “ancaman atau tantangan eksistensial” terhadap kemanusiaan kini semakin dilegitimasi secara akademis dan bahkan menjadi “populer”. Fenomena tersebut merupakan gejala dari situasi yang sekarang kita hadapi: yaitu, bahwa kita hidup melalui “keruntuhan besar”, “krisis sistem dunia”, “krisis umum” dari bentuk peradaban dominan kita. Banyak penyebab yang dapat diidentifikasi untuk “krisis umum” ini, “kemerosotan hebat” ini, yang bahkan mengancam kita dengan “keruntuhan” peradaban. Perubahan iklim tentu saja merupakan vektor penyebab utama dari krisis besar ini, tetapi itu bukan satu-satunya, dan dalam banyak hal, perubahan iklim itu sendiri adalah konsekuensi dari proses sejarah yang jauh lebih fundamental, mendasari, dan berjangka panjang. Proses historis yang telah menyebabkan krisis besar ini mencakup konsentrasi kekayaan yang berlebihan (oligarkisasi); eksploitasi berlebihan atas tenaga kerja dan “alam” (yaitu, ekstraksi nilai yang berlebihan dari kerja manusia dan dari dunia alam, sehingga meningkatkan entropi sistemik); akumulasi yang parasitik dan bersifat predator dari surplus modal dan kekayaan dan “investasi kurang memadai” dalam infrastruktur yang bermanfaat dan produktif secara sosial; dan logika sistemik/obsesi dengan komodifikasi, marketisasi, dan “pertumbuhan ekonomi”.

Ilmu ekonomi dominan kita, baik sebagai disiplin akademis maupun praktik nyata, telah melanggengkan khayalan bahwa entah bagaimana perekonomian tidak memiliki fondasi atau batas akhir biofisik. Lingkungan atau ekonomi lingkungan hanyalah sub-bidang kecil dalam ekonomi arus utama, dan semua masalah lingkungan yang diciptakan saat ini oleh sistem ekonomi dominan diyakini dapat diselesaikan di masa depan, terutama melalui inovasi teknologi dan melalui prinsip dan mekanisme yang sesuai dengan pasar. Pandangan dunia yang kabur dan Panglossian [terlalu optimistis] ini telah selama beberapa dekade menyebabkan rasa kepuasan, penundaan, dan penangguhan yang tampaknya tak ada habisnya oleh para aktor ekonomi dan politik paling kuat di dunia sehubungan dengan secara radikal menangani perubahan yang diperlukan untuk mencegah bencana iklim yang akan datang dan bencana ekologi. Pandangan dunia Panglossian ini dan pemujaan terhadap “pasar” telah menjadi keyakinan yang dominan pada zaman ini, dan telah menjadi inti dari gagasan hegemoni global tentang “neoliberalisme”, “globalisasi”, dan bahkan “pembangunan” sebagaimana dipahami dan dipraktikkan di seluruh dunia.

Krisis berarti kehancuran. Krisis berarti kegagalan sistem. Krisis di dunia saat ini berarti ancaman eksistensial bagi umat manusia: “kejatuhan” atau bahkan keruntuhan peradaban kita, sebuah peradaban yang konon meraih sukses tanpa preseden berkat globalisasi.

› Koyaanisqatsi juga memiliki solusinya

Apa solusinya? Koyaanisqatsi memiliki jawaban atas teka-teki kami. Kita membutuhkan “pemulihan mendalam” atas peradaban kita, seluruh budaya kita, baik spiritual maupun material—sebuah gagasan yang saya uraikan dalam artikel saya yang diterbitkan di *Globalizations* pada tahun 2020. Kita perlu “memikirkan kembali peradaban.” Bentuk fundamental yang merupakan pola dominan dari kekuasaan dan organisasi sosial dalam peradaban kita: yaitu, negara, ibu kota, , dan kota harus dipikirkan ulang secara mendalam dan diubah secara radikal di masa depan kita. Umat manusia harus menerima keterlekatannya dengan jejaring kehidupan dan sepenuhnya mengenali realitas keterbatasan planet, dinamika sistem bumi, fondasi biofisik dan batas biofisik, ambang batas ekologi dan perubahan iklim serta titik kritis, yang pada kenyataannya adalah sistem kehidupan global yang terpadu. Jalan masa depan kita harus terdiri dari “pemulihan besar” kehidupan di bumi, dengan segala keragamannya yang sangat besar dan indah. Jadi, ia juga harus terdiri dari “pembalikan besar” dari obsesi komodifikasi universal, marketisasi, dan pertumbuhan ekonomi yang sampai sekarang mendominasi kehidupan material kolektif kita. “Membiasakan kembali” dunia, baik material maupun sosial, akan menjadi pusat dari transformasi besar peradaban ini. Perdamaian, baik domestik maupun global, juga akan menjadi elemen penting dalam peradaban yang diperbarui dan dipikirkan ulang. Zaman kegelapan beberapa abad yang lalu, yang penuh dengan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, rasisme, dan kekuasaan patriarkis, sekarang harus ditutup

Sejarah ditulis belakangan, tapi masa depan ditulis sekarang. Pandangan dunia baru yang muncul dalam konteks krisis sistemik global saat ini sebenarnya bergema dengan pandangan dunia yang sangat kuno. Gagasan untuk mengabadikan pra-COVID-19 yang “normal” yang hilang hanyalah ilusi besar. Gagasan untuk kembali ke “*business as usual*” [tetap normal walaupun ada kendala] adalah ide ke arah bencana yang tak terelakkan. Hanya transformasi radikal dari bentuk dasar peradaban kita yang akan cukup untuk mencegah bencana di masa depan. Praksis transformatif dari banyak orang, oleh banyak orang, dan untuk banyak orang, memegang satu-satunya janji yang realistis dan sumber harapan bagi kelangsungan hidup kolektif kita. Sekarang tidak ada lagi alasan, dan tidak ada jalan untuk kembali. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Barry Gills <bkeithgills@gmail.com>

› Rastafari

dan Penemuan Kembali Hindia Barat

oleh **Scott Timcke**, University of the West Indies, St. Augustine, Trinidad dan Tobago, dan **Shelene Gomes**, University of the West Indies, St. Augustine, Trinidad dan Tobago, dan anggota Komite Penelitian ISA tentang Sosiologi Migrasi (RC31)



Papan petunjuk yang menandakan kehadiran Rastafari di Shashamane, Ethiopia pada tahun 2009. Kredit: Shelene Gomes.

Penobatan Ras Tafari Mekonnen pada tahun 1930 sebagai Paduka Yang Mulia Kaisar Haile Selassie I, untuk sebagian merupakan tampilan sinematik dari kebanggaan merayakan era baru dalam kehidupan Ethiopia. 12.500 kilometer jauhnya dari Karibia, orang-orang Jamaika Kulit Hitam yang miskin yang diperintah oleh Kerajaan Inggris menonton cuplikan film berita dari tontonan tersebut. Untuk pertama kalinya mereka melihat seorang raja Kulit Hitam.

Catatan arsip menunjukkan bahwa setelah itu orang Jamaika segera bertukar informasi, membaca surat kabar dan majalah, berusaha mencari tahu sebanyak mungkin tentang Ethiopia. Simbolisme kuat Afrika ini ditangkap oleh Marcus Garvey dalam dramanya *The Coronation of the King and Queen of Africa*. Pandangan dengan harapan ini tidak diragukan lagi merupakan tanggapan organik terhadap kengerian kapitalisme rasial.

› Sebuah “budaya tandingan terhadap modernitas”

Sejarah kapitalisme terlihat sangat berbeda jika ditulis dari pengalaman orang Kulit Hitam. Meskipun tidak lengkap dan tidak bebas dari kritik, umat Rastafari [gerakan keagamaan orang kulit Hitam di Jamaika yang memuja Kaisar Haile Selassie I] adalah simbol dari apa yang disebut oleh Paul Gilroy sebagai “budaya tandingan terhadap modernitas”. Ahli Trinidad C.L.R. James dan Claudia Jones membalikkan analisis ortodoks modernitas untuk menggambarkan dengan baik sentralitas Hindia Barat bagi pertumbuhan kapitalisme Eropa; Rastafari juga merupakan simbol dari kecenderungan proyek emansipatoris yang selalu dibungkus dalam konsep bahasa asli. Ini merupakan kebalikan dari gagasan bahwa perubahan sosial dan pembangunan yang paling baik didorong oleh lembaga atau proyek yang diarahkan oleh negara.

Memang, kosmologi Rastafari adalah contoh yang baik tentang bagaimana subjek-subjek subordinat membayangkan cara hidup yang baru, kemudian berjuang sesuai cara tersebut. Penemuan kembali imajinatif berlandaskan Karibia dan Rastafari seperti ini, yang telah lama mempengaruhi evolusi etnografi dan teori sosial Karibia, dapat membantu menginspirasi sosiologi dekolonial untuk abad ini.

› Elemen sosiologi dekolonial

Untuk menunjukkan bahwa suatu disiplin dapat digambarkan, mari kita mulai dengan pergerakan orang. Melalui penggabungan data yang dikumpulkan selama sejumlah kerja lapangan antara tahun 2008 dan 2015 bersama ahli teori sosial poskolonial Hindia Barat, kami berhasil memahami praktik spiritual Rastafari sebagai produk dari intelektual organik setempat yang berusaha memberikan penjelasan sosiologis mengenai kondisi dan kehidupan sehari-hari mereka. Memang, dalam formasi inti mereka, “kosmopolitik” Rastafari memberikan deskripsi yang kaya tentang dunia sosial, sebagaimana yang dilihat Walter Rodney pada Rastafari yang “membumi” bersamanya dalam Jamaika poskolonial.

Selama paruh kedua abad kedua puluh, gelombang Rastafari yang terorganisir bermigrasi dari Karibia ke Shashamane, Ethiopia. Menetap di tanah yang diberikan oleh Haile Selassie I yang diperuntukkan bagi orang Afrika di diaspora, komunitas perkotaan ini mewakili pernyataan politik yang kuat tentang bagaimana imajinasi sosial pan-Afrika dapat diwujudkan. Ethiopia juga merupakan tempat yang bagi Rastafari menandakan asal mula umat manusia, termasuk tempat suci dan keramat Sion. Oleh karena itu, permukiman itu disebut “repatriasi,” yang bagi kami menandakan penemuan kembali diri dan secara bersamaan merupakan agenda untuk perubahan sosial sesuai konsep mereka.

Mengingat situs suci ini, Rastafari terus berziarah ke Shashamane atau secara finansial mendukung komunitas setempat. Dukungan ini sangat penting untuk kelangsungan hidup, perbaikan sosial, dan reproduksi nilai-nilai Rastafari di Ethiopia, dan dengan demikian identitas komunitas religius itu sendiri. Pemulihan martabat dan hubungannya dengan ketuhanan dilakukan setelah kengerian pengalaman panjang penjajahan selama kolonialisme. Hubungan “kapitalisme dan kolonialisme” ini tidak ditulis dari perspektif metropolis London, melainkan dari orang-orang yang pindah dari Kingston ke Shashamane.

› “Kosmopolitik” Rastafari

Rastafari tidak hanya menganggap Ethiopia sebagai benteng lama Kristiani, melainkan menghargainya sebagai satu-satunya wilayah Afrika yang tidak pernah secara resmi dijajah oleh kekuasaan Eropa. Dibangun di atas idealisasi Afrika yang sudah ada sebagai bentuk perlawanan

budaya, Rastafari percaya bahwa Kaisar Haile Selassie I adalah suci. Latar belakang kepercayaan ini berasal dari orang-orang Karibia yang cukup menguasai Alkitab. Rastafarianisme pasti merupakan juga hasil dari praktik keagamaan yang diturunkan oleh Afrika Barat yang selamat dari *Middle Passage* [pengangkutan budak belian dari Afrika Barat ke Hindia Barat]. Tetapi benar pula bahwa ketika organisasi keagamaan membuka sekolah pada awal abad kedua puluh di seluruh Jamaika, gambaran Alkitab menjadi terkenal di kalangan orang awam.

Alih-alih melalui pengorganisasian sekuler, melalui penafsiran ulang doktrin inilah perlawanan kolektif terhadap supremasi Kulit Putih terbentuk. Dalam penafsiran ulang ini kami menemukan upaya organik awal untuk mendekolonisasi praktik Kristen yang mendukung penindasan kolonial di Karibia.

Dalam kerangka ini, Rastafari merangkul suatu kemanusiaan bersama, mencakup mereka yang “beriman,” seperti yang mereka katakan, dan mereka yang belum menjadi Rastafari. Tanggapan ini dapat diartikan sebagai munculnya kosmopolitanisme Selatan yang menganut sikap keterbukaan terhadap keanekaragaman budaya. “Keterbukaan” Rastafari, menurut kami, didasarkan pada kesadaran historis tentang sosialitas Karibia yang dibuat dari ekonomi perkebunan lintas benua, hierarki, lingkungan multikultural, dan tindakan imajinatif pembentukan diri. Cara ini merupakan tantangan langsung terhadap supremasi Kulit Putih.

Rastafari sama sekali bukan ekspresi populer pertama mengenai pan-Afrikanisme – Paul Gilroy, Hilary Beckles, dan Robert A. Hill, antara lain, menggambarkan banyak upaya sebelumnya. Meskipun demikian, praktik sehari-hari mereka dapat membantu memperkaya penyelidikan empiris dan konseptual mengenai apa yang kita sebut “solidaritas biasa”. Solidaritas biasa menimbulkan pertanyaan seputar seperti apa imajinasi sosiologis dari kerangka kosmopolitanisme Selatan yang dibangun berdasarkan pengalaman Kulit Hitam.

Sebagai contoh solidaritas biasa, “kosmopolitik” Rastafari dapat membantu sosiolog untuk menyoroti cara-cara skenario lokal dalam berhubungan dengan proses global. Dengan mengikuti deskripsi kaya yang ditawarkan oleh jalur-jalur tersebut, kami pikir ada potensi untuk memanfaatkan pengalaman Kulit Hitam tersebut untuk menemukan kembali sosiologi dengan berkontribusi pada disiplin dekolonial yang tidak terpusat dan mempunyai posisi yang baik untuk mengonseptualisasikan ketidaksetaraan yang terus ada dan muncul di abad kedua puluh satu. Dengan cara ini potensi emansipatoris dari teori sosial Hindia Barat yang “membumi” akan terus berlanjut. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada:
Scott Timcke <stimcke@gmail.com>
Shelene Gomes <sshelene.gomes@sta.uwi.edu>

› Sosiologi Sri Lanka

dalam Konteks Global dan Lokal

oleh **Siri Hettige**, Universitas Colombo, Sri Lanka dan anggota Komite Penelitian ISA tentang Sosiologi Pendidikan (RC04), Kemiskinan, Kesejahteraan Sosial dan Kebijakan Sosial (RC19), dan Sosiologi Pemuda (RC34)



Ceylon University College pada tahun 1921.
Kredit: Creative Commons.

Sebagaimana telah diketahui secara umum, banyak masyarakat non-barat berada di bawah dominasi kolonial barat mulai awal abad ke-16. Sri Lanka, yang sebelumnya dikenal sebagai Ceylon, sebuah pulau kecil di Samudera Hindia, berada di bawah dominasi tiga kekuasaan kolonial berturut-turut—yaitu Portugis, Belanda, dan Inggris—dari tahun 1505 hingga kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1948. Negara ini mengalami proses transformasi berskala luas di bawah kolonialisme, khususnya selama 150 tahun pemerintahan Inggris. Antara lain, yang paling relevan untuk pembahasan ini adalah perubahan lanskap

pendidikannya, dari sistem sekolah dasar yang didominasi oleh lembaga agama menjadi sistem pendidikan umum yang lebih beragam. Namun, tidak ada sistem pendidikan universitas modern yang diperkenalkan hampir sampai akhir pemerintahan kolonial, sehingga perlu bagi pemuda elit pribumi yang berkeinginan pendidikan tinggi untuk melakukan perjalanan ke luar negeri untuk pendidikan semacam itu. Jadi tidak ada peluang bagi penduduk asli yang sedang bergerak ke atas untuk memperoleh pendidikan universitas secara lokal dalam berbagai bidang termasuk sosiologi, sebuah bidang yang sudah diajarkan secara luas di banyak universitas di Eropa dan lainnya

› Perluasan pendidikan universitas

Karena pendidikan universitas sebagian besar merupakan perkembangan pascakolonial, pengajaran sosiologi harus menunggu hingga adanya pendirian universitas lokal pada tahun 1940-an. Dengan meningkatnya permintaan untuk pendidikan universitas setelahnya, beberapa universitas baru didirikan pada dekade berikutnya. Namun, pengajaran sosiologi tetap terbatas di Universitas Peradeniya hingga 1969, ketika departemen sosiologi kedua didirikan di Kolombo, setelah lebih dari dua dekade setelah kemerdekaan.

Hal yang signifikan ialah bahwa, setelah pendirian Universitas Peradeniya, sebuah departemen sosiologi di bawah ketua yang baru diangkat didirikan di sana pada awal 1950-an. Awalnya dijabat oleh sosiolog dari Amerika Serikat, Profesor Bryce Ryan. Karena bahasa pengantar adalah bahasa Inggris, maka dimungkinkan untuk menggunakan buku teks sosiologi yang tersedia dalam bahasa Inggris dan digunakan secara luas di negara-negara barat dan di tempat lain. Namun, situasinya mulai berubah dalam beberapa tahun berikutnya ketika perubahan sosial pascakolonial yang signifikan mengikuti. Sistem pemerintahan demokratis yang didirikan lebih dari satu dekade sebelum kemerdekaan menciptakan peluang bagi gerakan anti-kolonial untuk mengartikulasikan tuntutan dekolonisasi dan kebangkitan lembaga sosial dan budaya asli. Akibat dari perubahan bahasa pengantar dari bahasa Inggris ke bahasa asli pada tahun 1956, hanya delapan tahun setelah kemerdekaan, menggerakkan proses perubahan sosial dan budaya dengan konsekuensi yang luas. Eksodus terus-menerus dari banyak anggota komunitas yang telah *Anglicized* [mengadopsi budaya Inggris], termasuk elit perkotaan warga asli, mengakibatkan migrasi kelompok intelektual yang signifikan dari negara tersebut.

Konversi dua biara Buddha terkemuka di pinggiran kota Kolombo menjadi dua universitas nasional pada pertengahan 1950-an menyebabkan perluasan pendidikan universitas yang signifikan, di samping konsekuensi lainnya. Difasilitasi oleh perluasan sektor negara sejak 1950-an karena pembangunan yang dipimpin oleh negara, tren ini berlanjut dalam dekade berikutnya, dengan beberapa universitas lagi yang didirikan di berbagai bagian negara, menciptakan lebih banyak peluang untuk pendidikan tinggi dan mobilitas sosial ke atas di masyarakat pascakolonial yang ditandai dengan tingginya ketimpangan vertikal dan horisontal. Mengingat tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah, ekspansi pendidikan universitas yang stabil ini mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran lulusan universitas.

› Sosiologi yang menutup diri

Dengan berjalannya waktu, transisi dari bahasa Inggris ke bahasa asli menjadikan mahasiswa yang sebagian besar monolingual tidak mampu menggunakan buku teks dalam bahasa Inggris. Meskipun pengaturan kelembagaan tertentu kemudian dibuat untuk menerbitkan terjemahan buku-buku teks sosiologi utama ke dalam bahasa asli, sumber daya dan kendala lain menghalangi kelanjutan praktik ini. Dengan demikian, sebagian besar mahasiswa sebagian besar terbatas pada catatan perkuliahan dalam Bahasa-bahasa daerah. Dalam beberapa dekade berikutnya, sebagian besar mahasiswa menjadi semakin terasing dari buku teks sosiologi asli yang banyak digunakan di tempat lain. Namun, sebagian besar lulusan sosiologi mendapatkan pekerjaan sebagai beragam pejabat di lembaga-lembaga negara terlepas dari kualitas pendidikan mereka. Sementara beberapa akademisi terus menjaga kontak dengan universitas luar negeri melalui pendidikan pascasarjana dan pertukaran kunjungan, yang lain tetap terputus dari pertemuan akademis internasional seperti partisipasi dalam pertemuan akademis atau mempublikasikan hasil kerja mereka di jurnal akademis standar. Tren yang disebutkan di atas tetap bertahan hingga kini. Asosiasi Sosiologi Nasional yang didirikan pada 1980-an di bawah kepemimpinan Ralf Peiris, Profesor Sosiologi Ceylon pertama di universitas pertama tetap aktif tetapi hanya menarik sebagian kecil akademisi dari beberapa universitas lokal. Selain itu, sangat sedikit sosiolog Sri Lanka yang menjadi anggota Asosiasi Sosiologi Internasional (ISA). Bagian terbesar sosiolog tetap tidak terkait dengan ISA dan asosiasi sosiologi nasional bahkan di wilayahnya. Namun, mereka tetap aktif dalam mengajar, melakukan penelitian tentang isu-isu lokal dan berkontribusi pada jurnal terbitan lokal, sementara lulusan universitas lokal sering mendapatkan pekerjaan di pemerintahan.

Apa yang tampak dari hal di atas adalah bahwa, di Sri Lanka pascako-

lonial, ekonomi politik nasionalisme anti-kolonial telah memfasilitasi keberlanjutan kantong-kantong pengajaran dan penelitian dalam sosiologi yang untuk sebagian besar tidak bergantung pada komunitas akademik lain di tempat lain, baik itu di Utara Global ataupun di belahan Global Selatan lainnya, meskipun terjadi proses globalisasi pendidikan swasta yang telah memungkinkan banyak orang di luar sistem pendidikan publik untuk menemukan pendidikan dan peluang karir alternatif. Kelompok terakhir inilah, yang sering kali datang dari latar belakang yang lebih banyak sumberdaya, yang tetap terhubung dengan proses sirkulasi melalui sirkuit pendidikan swasta yang melampaui batas-batas negara. Namun, sebagian besar di antara mereka cenderung berada di bidang pendidikan STEM [sains, teknologi, teknik, matematika], tidak begitu banyak dalam pendidikan *liberal arts* [antardisiplin ilmu-ilmu dasar] termasuk sosiologi.

Perkembangan sosiologi Sri Lanka secara jelas dibentuk oleh perubahan selama dan setelah pemerintahan kolonial. Hal ini sesuai dengan wacana akademis seputar sosiologi pengetahuan yang dikontribusikan oleh ahli teori sosial klasik maupun sosial yang lebih baru, terutama Karl Marx (1844), Max Weber (1947), Max Scheler (1960), Wilhelm Dilthey (1958), Karl Mannheim (1936), Norbert Elias (1956), Robert Merton (1957) dan Peter Berger dan Thomas Luckmann (1966), antara lain. Proses produksi dan penyebaran pengetahuan telah dibentuk oleh konteks sosiokultural yang berkembang di negara ini sampai sekarang. Lemahnya hubungan antara sosiologi internasional dan sosiologi Sri Lanka di masa kini merupakan cerminan dari kondisi dalam mana sosiolog di Sri Lanka melaksanakan pekerjaan mereka dalam tatanan sosiokultural dan kelembagaan khas mereka. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada
Siri Hettige <hettigesiri@gmail.com>

› Sosiologi Sri Lanka:

Sejenak Melintasi Waktu

oleh **Subhangi M.K. Herath**, Universitas Colombo, Sri Lanka

Perkembangan sosiologi Sri Lanka jelas tidak mengikuti tradisi sosiologi yang jelas, tidak seperti yang dipraktikkan di Eropa atau Amerika. Ini adalah perpaduan tinggi antara sosiologi dan antropologi, dengan kecenderungan signifikan ke arah antropologi. Dua alasan untuk hal ini adalah jelas: Pertama, Sri Lanka adalah bekas koloni Inggris di mana pendidikan universitasnya didirikan oleh para pendidik Inggris, mengikuti model sistem universitas Inggris di mana antropologi adalah disiplin ilmu yang berkembang pesat dalam ilmu sosial. Yang lainnya adalah bahwa negara tersebut telah menjadi pusat perhatian bagi para misionaris dan pelancong, menawarkan keindahan, sejarah, dan sistem sosial yang unik; untuk setiap ilmuwan sosial yang memiliki mata antropologis, masyarakat dan budaya Sri Lanka menawarkan laboratorium yang kaya.

Walau demikian, pengajaran sosiologi sebagai mata kuliah di tingkat universitas, yang dimulai pada awal 1947 di Universitas Peradeniya (universitas pertama di Sri Lanka yang berasrama), dan kontribusi yang diberikan oleh beberapa sosiolog dan antropolog Inggris dan Eropa terkemuka pada pengajaran dan penelitian memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan sosiologi (dan/atau antropologi) Sri Lanka. Beberapa ilmuwan generasi pertama dan kedua yang terkenal masih aktif dan telah

memperkaya bidang ini secara substansial, menghasilkan karya sosiologis yang bernilai tinggi. Beberapa dari mereka terus bekerja sebagai antropolog arus utama; melintasi batas antara sosiologi dan antropologi tampaknya telah menjadi corak penting dari sosiologi Sri Lanka bahkan hingga hari ini.

› Evolusi “sosiologi Sri Lanka”

Banyak dari karya sosiologis yang telah muncul selama enam sampai tujuh dekade terakhir adalah dalam bentuk studi lokal baik yang terlibat dengan perdebatan teoretis sosiologi makro, atau beralih ke studi mikro, atau tetap berada dalam batas-batas “*middle-range theories*” [integrasi teori dengan penelitian empiris] jika saya boleh menggunakan terminologi yang diperkenalkan oleh Robert Merton (1968). Banyak dari sosiolog generasi awal atau kedua dengan sangat sadar mendasarkan karya mereka pada kerangka ilmu teori sosiologi di tingkat internasional yang ada dan terlibat dalam penerapan, pengujian, dan pertanyaan pada tingkat teoretis, memberikan kontribusi yang patut dicatat untuk “sosiologi Sri Lanka.” Kontribusi Edmund Leach (1961), yang bertugas di Departemen Sosiologi Universitas Peradeniya, pada debat yang sedang berlangsung tentang “dominasi supra struktural ekonomi,” atau karya Tissa Fernando (1972) tentang pemberontakan pemuda 1971 di Sri Lanka yang melihat pe-

ristiwa tersebut dalam kerangka karya Vilfredo Pareto tentang “transformasi elit”, atau kontribusi Laksiri Jayasuriya (2000) pada neoliberalisme dan kebijakan kesejahteraan, di antara banyak lainnya, termasuk dalam tradisi kerja teoretis yang serius dalam sosiologi Sri Lanka. Ketika memeriksa kontribusi yang dibuat oleh para sosiolog Sri Lanka generasi selanjutnya, tampaknya banyak perhatian telah tertuju pada perubahan fenomena sosial di Sri Lanka, seperti kasta dan kelas, hubungan agraria, sistem politik, hubungan gender, agama dan budaya, serta migrasi dan jaringan-jaringan keluarga. Pergeseran fokus yang jelas terhadap masalah-masalah sosial yang muncul dan berlaku yang berdampak serius pada individu, masyarakat, dan kelompok sosial yang berbeda dapat dilihat dalam beberapa tahun terakhir. Selama lima dekade terakhir, “sosiologi masalah-masalah sosial” ini tampaknya telah memantapkan dirinya sebagai “sosiologi Sri Lanka” baik di kalangan akademisi maupun pembaca umum.

› Tentang “sosiologi masalah-masalah sosial”

Banyak di antara karya yang termasuk dalam “sosiologi masalah-masalah sosial” ini tampaknya mengikuti tradisi sosiologis yang diperkenalkan selama awal sosiologi Amerika, misalnya, *Street Corner Society* (1943) karya W. F. Whyte, atau *The Gang* (1927) karya Frederic Thrasher, atau *The Polish Peasant in Europe*

“Selama lima dekade terakhir, sosiologi masalah-masalah sosial ini tampaknya telah memantapkan dirinya sebagai ‘sosiologi Sri Lanka’ baik di kalangan akademisi maupun pembaca umum”

and America (1918) karya Florian Znaniecki dan W. I. Thomas (1918), yang semuanya memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pengembangan wacana teoretis masalah-masalah sosial mikro berbasis lokal dibandingkan sosiologi teoretis Eropa atau sosiologi Amerika pertengahan abad ke-20 dengan landasan filosofis yang kuat. Sebagian besar karya sosiologis yang diterbitkan di Sri Lanka saat ini didasarkan pada data yang dikumpulkan melalui kerja lapangan yang ekstensif, baik di tingkat kualitatif maupun kuantitatif, dengan fokus pada berbagai masalah sosial yang telah muncul dalam masyarakat Sri Lanka saat ini; namun, meskipun tidak sepenuhnya tanpa berbasis teoretis, sering kali tidak memiliki ketelitian teoretis dan kekokohan konseptual yang diharapkan dari sebuah karya ilmiah. Situasi ini telah mengarah pada produksi literatur sosiologis yang sangat besar yang hampir mewakili gaya “sosiologi jurnalistik”. Meskipun demikian, perlu ditambahkan bahwa popularitas studi semacam itu di kalangan masyarakat umum, terutama karena mereka tidak melibatkan pembaca dalam perdebatan teoretis yang serius, tidak dapat diremehkan dalam menarik perhatian publik yang lebih luas untuk karya sosiologis.

Mayoritas universitas Sri Lanka saat ini terlibat dalam pengajaran sosiologi;

namun, variasi penting berlaku pada tingkat pengajaran serta fokus pada materi kuliah. Konsekuensi dari proses sosial yang berjalan termasuk perubahan 1956 tentang Kebijakan Bahasa Negara (yang menjadikan bahasa mayoritas penduduk, Sinhala, satu-satunya bahasa negara, dan tidak memberikan pengakuan kepada Tamil, bahasa penduduk minoritas, serta bahasa Inggris sebagai satu-satunya bahasa internasional yang digunakan oleh negara), *brain drain* [hilangnya sumber daya manusia] akut yang mengikutinya, dan perubahan bahasa pengantar dalam sistem sekolah dari bahasa Inggris ke bahasa-bahasa vernakular telah menciptakan generasi baru yang kehilangan kesempatan untuk akses pengetahuan global masih terlihat dalam produksi pengetahuan sosiologis. Walau demikian, mengingat perubahan sistemik dan struktural yang sangat besar yang dialami masyarakat dan berbagai strategi yang diadopsi oleh orang-orang dalam menghadapi kenyataan sehari-hari ini, keragaman yang muncul dalam kerangka ilmu karya sosiologis tentu saja memberikan inspirasi.

Pertanyaannya, bagaimanapun, adalah: “Dapatkah sebuah karya yang berkaitan dengan ‘sosiologi kehidupan sehari-hari’ dianggap se-

bagai ‘sosiologi’?” Max Weber dalam bukunya *Science as a Vocation* (1919) menulis, “Saat ini, di kalangan anak muda ada anggapan luas bahwa sains telah menjadi [...] perhitungan yang hanya melibatkan kecerdasan yang sejuk dan bukan hati dan jiwa seseorang.” Sosiologi tidak hanya tentang melihat, menafsirkan, dan berkomentar, tetapi tentang “ide” yang muncul atas dasar “kerja keras”. Kerja keras ini tentunya akan difasilitasi oleh ilmu yang didirikan oleh para pendahulu kita. Kurangnya ketelitian teoretis tersebut, yang juga merupakan konsekuensi dari faktor-faktor lain, termasuk kemampuan bahasa, ketersediaan sumber daya, dan komitmen terhadap pembelajaran yang mendalam dari suatu ilmu nyata dapat mengaburkan perbedaan antara sosiologi sehari-hari dan jurnalisme sehari-hari. Ini harus menjadi upaya bersama dari para sosiolog di Sri Lanka untuk menyelamatkan disiplin sosiologi dari keadaan biasa-biasa saja selama masih ada waktu. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Subhangi M.K. Herath <subhangi@soc.cmb.ac.lk>

› Merefleksikan Perdamaian, Konflik, dan Kekerasan

oleh **Kalinga Tudor Silva**, Universitas Peradeniya, Sri Lanka



Warga sipil Tamil yang tergusur mengungsi dari wilayah yang dikuasai LTTE ke wilayah yang dikuasai angkatan bersenjata Sri Lanka semasa tahap terakhir perang pada tahun 2009.

Sosiologi Sri Lanka bermula dari pendekatan etnografis dan historis untuk memahami sebuah masyarakat yang stabil dan pada umumnya damai yang dilakukan oleh para peneliti lokal dan internasional di tahun 1960-an. Studi-studi ini mencoba menguraikan prinsip-prinsip dasar yang membentuk institusi-institusi yang terus bertahan seperti kekerabatan, sistem penguasaan tanah, agama, dan kasta. Sebagian besar peneliti itu dibuat terkejut dan tidak memiliki kesiapan untuk bergulat dengan realitas yang baru muncul ketika pada dekade-dekade berikutnya mereka dihadapkan pada beragam bentuk konflik sosial yang penuh kekerasan. Esai ini akan mengkaji hakikat konflik kekerasan yang terjadi di Sri Lanka sejak 1970-an, bagaimana para peneliti mendekatinya dari berbagai sudut pandang yang berlainan, tantangan-tantangan yang dihadapi, dan apa pelajaran yang dapat kita ambil dari studi-studi itu untuk memfasilitasi perdamaian.

› Kekerasan yang akut dan kronis

Kekerasan yang meledak di Sri Lanka sejak 1970-an mengambil

banyak bentuk. Hal ini merentang dari pergolakan politik anti-negara oleh Janatha Vimukthi Peramuna (JVP), secara harfiah berarti Front Pembebasan Rakyat, suatu gerakan pemberontakan pemuda bergaya Marxis di Sri Lanka selatan yang memicu represi tanpa preseden oleh negara pada 1971 dan berulang pada 1987-1989; Macan Pembebasan Tamil Eelam (Liberation Tigers of Tamil Eelam; LTTE), sebuah gerakan separatis etno-nasionalis bersenjata di antara warga Tamil di Sri Lanka utara yang memicu perang berkepanjangan selama 1983-2009 yang menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius oleh kedua belah pihak; kerusuhan etnis brutal yang dilakukan oleh gerombolan etnis Sinhala terhadap warga sipil etnis Tamil pada Juli 1983; dan gelombang kekerasan yang diduga dilakukan oleh teroris Islamis dengan sasaran para wisatawan dan umat Kristen pada Minggu Paskah 21 April 2019. Seiring kian berakarnya kekerasan, maka ia mengambil bentuk-bentuk yang kronis dan akut di tangan para petugas penegak hukum maupun para lawannya. Kesemua konflik ini menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan nasional. Selain itu juga ada episode ajeg kekerasan pasca-pemilihan umum pada setiap pelaksanaan pemilihan

umum nasional sejak 1970-an, yang biasanya menysar pihak-pihak yang kalah. Dalam ungkapan Jonathan Spencer, “kekerasan di Sri Lanka sering merupakan intensifikasi atas politik normal ketimbang merupakan peralihan total dari politik sehari-hari.”

Kebanyakan kekerasan itu muncul dari dorongan identitas yang secara progresif dipicu oleh penalaran jalur tunggal yang dilabuhkan pada identitas monolitik, baik hal yang berupa etnis, agama, kelas, atau kasta. Konflik identitas ini menuntut analisis sosiologis bukan saja karena terdapat kontinuitas dengan pokok kajiannya di era terdahulu, melainkan juga karena konflik ini tidak memadai untuk dianalisis secara ekonomi dan politik semata seperti yang dikejar oleh disiplin-disiplin terkait. Politik nasionalis yang mengarahkan negara Sri Lanka pasca-kemerdekaan kian direbut oleh elite Sinhala-Budhis yang mengatasnamakan mayoritas etno-keagamaan sebesar lebih dari 70% populasi. Upaya-upaya mobilisasi tandingan yang dilakukan oleh minoritas Tamil dan Muslim menuntut pemahaman atas saling pengaruh yang dinamis antara identitas, kepentingan, dan mobilisasi kolektif dalam bingkai

pasca-kolonial dengan beragam tambahan etno-nasionalis.

› Menggerus kerja sosiologis

Perkembangan di atas juga menciptakan tantangan yang serius khususnya terhadap sosiologi dan antropologi. Sebagai misal, ideologi Sinhala-Budhis yang dominan berupaya untuk menindas setiap bentuk keterlibatan kritis yang tumbuh dari dalam. Buku *Buddhism Betrayed* (1992) karya S.J. Tambiah, misalnya, menunjukkan paradoks Budhisme, sebuah doktrin yang secara tegas anti-kekerasan tetapi dijadikan alat untuk memprovokasi kekerasan terhadap etnis Tamil. Buku ini dibredel di Sri Lanka dan sejumlah karya propaganda berbahasa Sinhala yang mengancam karya ini diproduksi oleh para sarjana nasionalis Sinhala yang tidak saja menyerang penulisnya, seorang antropolog Sri Lanka berlatar belakang Tamil Protestan yang diakui internasional, melainkan juga disiplin antropologi itu sendiri. Pola pikir semacam ini juga menjadi konteks bagi suatu generasi sosiolog Sri Lanka, termasuk Gananath Obeyesekere, H.L. Seneviratne, Kitsiri Malalgoda, Valentine Daniel, dan Chandra Jayawardena, untuk hijrah ke luar negeri dan melanjutkan penelitian kritis mereka mengenai Sri Lanka dari mancanegara. Hanya segelintir sosiolog, dipelopori oleh Newton Gunasinghe, yang memilih melanjutkan pertarungan dari dalam. Seringkali posisionalitas para peneliti berbenturan dengan nasionalisme hegemonik yang menyerang setiap bentuk kontestasi baik yang berasal dari dalam maupun luar. Begitu juga, LTTE dengan cara kekerasan juga bereaksi terhadap setiap pandangan yang berbeda dari para intelektual Tamil dengan mencap mereka sebagai pengkhianat perjuangan Tamil. Dengan demikian, dinamika konflik telah merusak kerja sosiologis itu sendiri, membuat analisis yang objektif dan berjarak menjadi musykil, jika tidak mustahil sama sekali.

Seiring dengan berlanjutnya perang, kekerasan menjadi kian mengakar, dengan bagian-bagian tertentu dari aparat keamanan, milisi sipil, gerombolan bersenjata, dan penyelundup narkoba saling beroperasi baik melalui kerja sama maupun konflik satu sama lain, tergantung pada konteksnya. Perang akhirnya disudahi pada 2009, namun kekerasan terus berlanjut dalam bentuk gelombang kebencian anti Muslim yang dihasut oleh para pendeta Budha militan sejak 2012 hingga 2020, serangan menghancurkan atas peringatan Minggu Paskah pada 21 April 2019 yang diduga dilakukan kelompok Islamis, dan serangan balasan pada 13 Mei yang menyasar warga Muslim tak bersalah di beberapa wilayah tertentu. Selain kekerasan fisik, juga terjadi perusakan harta benda, intimidasi, ancaman, paksaan, kampanye kebencian melalui media massa/elektronik, dan praktik diskriminatoris yang diajarkan oleh badan-badan negara dan warga sipil. Sebagaimana telah dinyatakan banyak peneliti, kultur impunitas telah secara berangsur-angsur dimapkan.

› Kerusakan yang diciptakan kebijakan berbasis mayoritas

Kebijakan negara menyangkut bahasa resmi merupakan suatu contoh kasus. Kebijakan Sinhala-saja, digencarkan oleh partai Mahajana Eksath Peramuna (Front Persatuan Rakyat) yang pro-Sinhala dan memenangkan pemilihan umum pada 1956 dengan dukungan luas rakyat, berupaya untuk mengatasi ketertinggalan rakyat kebanyakan *vis-à-vis* kelas elite berbahasa Inggris yang memiliki hak istimewa dan telah memerintah negeri sejak era kolonial dan sesudahnya. Kebijakan bahasa resmi secara nyata telah mengalienasi etnis Tamil dari negara Sri Lanka, juga membatasi kapasitas etnis ini untuk memasuki pekerjaan-pekerjaan di sektor pemerintahan yang sangat didambakan. Negara yang bias kelompok mayoritas

ini gagal untuk menyadarkan elite Sri Lanka bahwa kebijakan semacam itu niscaya akan menyingkirkan para penutur bahasa Tamil. Sosiologi sedang muncul sebagai satu bidang kajian di Sri Lanka pada masa itu dan sebagian besar penelitian mengenai kebijakan bahasa dilakukan oleh kalangan sarjana nasionalis Sinhala yang mendukung kebijakan resmi negara. Konsekuensi negatif dari kebijakan ini menjadi kenyataan setelah beberapa tahun kemudian dan pendekatan yang bersifat lebih ramah terhadap penggunaan Bahasa Tamil muncul dari dalam negara itu sendiri. Namun pada waktu itu kerusakan telah terlanjur terjadi.

Kebijakan negara di bidang pendidikan, kolonisasi dan pembangunan mengikuti pola yang sama sebagaimana halnya kebijakan bahasa resmi. Semua kebijakan ini nyata-nyata dirancang untuk menguntungkan mayoritas Sinhala dengan partai-partai politik Sinhala yang arus utama saling berlomba memberi tawaran tertinggi dalam memanjakan komunitas mayoritas. Dinamika struktural dan kultural sering bekerja secara serempak untuk memproduksi legitimasi bagi spiral kekerasan yang menenggelamkan negara pulau ini.

Dari sisi implikasi terhadap pembangunan perdamaian, semua bentuk intervensi yang bersifat *ad hoc* akan sulit untuk berhasil. Hal ini karena beberapa arsitektur kebijakan tertentu telah berkembang di Sri Lanka pascakemerdekaan dengan mekanisme yang sudah melekat untuk menyabot setiap bentuk gangguan terhadap bias yang sudah berakar urat. Sementara beberapa perubahan kecil dapat sesekali menghasilkan pergeseran katalis, namun kami berada dalam situasi di mana setiap konsesi terhadap minoritas akan dibatalkan. Inilah tantangan utama bagi sosiologi Sri Lanka di sini dan saat ini. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Kalinga Tudor Silva <kalingatudorsilva@gmail.com>

› Menganalisis Kekerasan: Pembentukan Negara Sri Lanka

oleh **Farzana Haniffa**, Universitas Colombo, Sri Lanka

Juli 1983 kini telah menjadi tanggal penting di Sri Lanka yang oleh banyak orang dilihat sebagai sinyal awal konflik etnik di sana. Ini dipandang sebagai titik permulaan rusaknya hubungan antara pemerintah selatan yang sebagian besar orang Sinhala dengan orang Tamil Sri Lanka, dan awal bagi migrasi keluar dan diaspora orang Tamil. Ini juga merupakan titik di kala, sebagaimana juga dibahas oleh Pradeep Jeganathan, disiplin antropologi mulai tertarik untuk memahami “kekerasan”.

Ada beberapa publikasi segera setelah kekerasan 1983 usai. Buku James Manor dalam tahun 1984 *Sri Lanka in Change and Crisis* (Sri Lanka dalam Perubahan dan Krisis) memuat banyak kontribusi sejumlah besar antropolog, sebagian dari mereka berada di Sri Lanka pada bulan Juli tersebut. Gananath Obeyesekere, Jonathan Spencer, Elizabeth Nissan dan Roderick Stirrat menyumbangkan esai-esai mini pada edisi tersebut, dalam mana kesemuanya memberikan poin penting. Stanley Tambiah mengikuti hanya dua tahun setelah itu, kemudian Bruce Kapferer dan, lama setelah itu, Valentine Daniel dan Pradeep Jeganathan.

› Latar Belakang Tahun 1983

Partai Perserikatan Nasional (UNP) telah berkuasa sejak tahun 1977 dan liberalisasi ekonomi telah diperkenalkan di negara ini sejak 1978. Otoriterisme Rezim UNP semakin nyata segera setelah

pemilihan umum tahun 1977 (ketika kekerasan anti-Tamil pasca pemilihan umum dibiarkan berlangsung terus selama hampir satu bulan). Tren ini meningkat dan memuncak selama setahun sebelum kerusuhan pada saat Referendum tahun 1982 yang memungkinkan pemerintah yang berkuasa—dipilih dua pertiga mayoritas—untuk tetap bisa berkuasa selama satu periode lagi tanpa pemilihan umum. Oposisi terhadap referendum ini adalah signifikan dan ditanggapi dengan keras oleh UNP, yang memobilisasi sejumlah besar anggota serikat pekerja, Jathika Sevaka Sangamaya (JSS). JSS sendiri dibentuk untuk menggerogoti basis dukungan partai kiri dalam gerakan serikat pekerja, dan ideologinya bukan sosialisme tetapi nasionalisme. Ancaman dan teror UNP terhadap siapa pun yang berseberangan, termasuk lembaga peradilan, didokumentasikan oleh Stanley Tambiah (1986) dan Gananath Obeyesekere (1984) sebagai latar belakang kekerasan tahun 1983.

› Analisis antropologi terhadap kekerasan

Tahun 1983 juga melahirkan serangkaian tulisan yang sedikit berbeda di seantero negeri. Jani De Silva mendokumentasikan cara melalui mana produksi pengetahuan setelah 1983 menghasilkan buku-buku penting *Ethnicity and Social Change in Sri Lanka* (Etnisitas dan Perubahan Sosial di Sri Lanka)(1984) dan *Facets of Ethnicity in Sri Lanka* (Aspek Etnisitas di Sri Lanka)(1987). Buku pertama berupaya untuk membongkar mitos mengenai keunggulan etnis

(Sinhala), dan buku kedua mengkritik mengenai nasionalisme baik Sinhala maupun Tamil dan sifat struktural yang memungkinkan keduanya. Kritik-kritik ilmu sosial tersebut adalah respon terhadap “kerusuhan”, dengan harapan mereka bisa mempengaruhi wacana dan kebijakan.

Para antropolog sepertinya juga ingin menemukan penjelasan “kultural” yang lebih substantif bagi skala dan kebrutalan kekerasan yang dijelaskan secara kurang memuaskan melalui penggambaran penciptaan kondisi politik dan ekonomi yang memungkinkan terjadinya peristiwa itu.

Para ilmuwan mencari berbagai cara untuk menjelaskan kemarahan dan kekerasan dari (sebagian besar) massa Sinhala yang oleh salah seorang antropolog digambarkan sebagai “orang-orang yang biasanya damai”. Karena itu kami memiliki analisis seperti analisis Bruce Kapferer dan juga Jonathan Spencer (meskipun Spencer tidak setuju dengan karakterisasi Kapferer). Usaha untuk melihat elemen dari kesadaran kolektif Sinhala memberikan kerangka penjelasan untuk melihat sifat kekerasan yang dilakukan di ruang yang diciptakan olehkses-kses politik UNP. Kapferer menggambarkan kekerasan sebagai kesetanan (*demonic*) dan berargumen bahwa satu penjelasan kekerasan ada pada ontologi khusus tentang kesadaran Sinhala yang serupa dengan yang muncul dalam pengusiran setan (*exorcism*) di dunia setan. Dalam analisis kompleks yang mempertahankan konteks dalam mana kekerasan terjadi, maupun antagonisme kelas yang dimobilisasi

untuk melakukan tindakan kekerasan, Kapferer menyamakan kekerasan itu sendiri sebagai pengusiran setan. Spencer melihat hal itu secara sedikit berbeda, yaitu sebagai perluasan dari cara melalui mana politik memungkinkan ditinggalkannya kesopansantunan luar biasa yang dituntut dalam kehidupan sosial sehari-hari orang Sinhala. Spencer selanjutnya berargumentasi bahwa penyerangan disebabkan oleh fakta bahwa Macan Pembebasan Tamil Eelam (LTTE) “menang” di Utara berarti bahwa mereka telah “keluar dari skrip” dari cerita-cerita yang disebutkan dalam babad puri *Mahavamsa*. *Mahavamsa* adalah teks dasar bagi kesadaran Sinhala mengenai orang Tamil sekaligus juga bagi penulisan sejarah Sinhala, yang secara konsisten menggambarkan para raja Sinhala sebagai penghancur para penyerbu “Tamil.”

Valentine Daniel melihat pendekatan Sinhala dan Tamil ke masa lalu sebagai hal yang penting untuk dapat memahami ganasnya kekerasan. Daniel berpendapat bahwa sebuah kondisi struktural untuk kekerasan mungkin ditemukan dalam ketidaksesuaian yang berasal dari perbedaan disposisi dua kelompok masyarakat terhadap

masa lalu. Daniel menyebut yang satu sebagai “Epistemik” dan yang lainnya “Ontik”. Daniel menyimpulkan dengan pencerahan yang kuat dan persuasif bahwa penolakan atau kegagalan memberi pengakuan pada cara pihak lain yang melekat pada dua cara orientasi diri, dan kecemasan dan “keraguan radikal” mengenai identitas diri sendiri yang disebabkan ketiadaan pengakuan tersebut, bisa dipahami sebagai pendorong kekerasan.

› Politik memelihara antagonisme

Baik Daniel maupun Kapferer dikritik karena kerangka “kulturalis” dan esensialis mereka, dan banyak yang menyerukan agar dilakukan analisis terpisah mengenai siapa saja pelakunya dan bagaimana mereka diorganisasi. Namun yang penting untuk dicatat adalah cara berpikir dan menulis mengenai 1983 itu sendiri adalah suatu cara untuk memahami politik Sri Lanka yang secara mendasar dipengaruhi oleh antagonisme antara nasionalisme Tamil dan Sinhala. Analisis semacam ini menghalangi pemahaman mengenai ciri-ciri struktural yang memerlukan kreasi

dan pemeliharaan hubungan agonistik dan diadik untuk tujuan politik.

Produktivitas jalur penelitian mengenai kekerasan ini telah tersisihkan oleh kekerasan karena perang yang jauh lebih dahsyat. Sebagai akibatnya, apa yang dilihat para antropolog ini – permusuhan yang dipelihara dengan menggunakan status dan makna permusuhan primordial – tidak didorong lebih jauh, mungkin menghalangi pemahaman yang lebih baik mengenai sistem politik yang mensyaratkan penekanan pada antagonisme. Hari ini kita akan memasuki hampir satu dekade dipeliharanya suatu bentuk antagonisme lain – yakni antara orang Sinhala dan orang Muslim – dan telah mengalami suatu serangan dengan skala yang mengerikan oleh orang-orang Islam yang militan. Kita saat ini tidak bisa memahami perkembangan situasi ini selain dengan menggunakan pendekatan terorisme internasional. Sudah waktunya kita melihat ulang produksi pengetahuan mengenai 1983 sebagai cara, mungkin, untuk belajar dari pengalaman tersebut dalam hal menumbuhkan permusuhan. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Farzana Haniffa <ffhaniffa@gmail.com>

› Batas yang Kabur: Antropologi dan Sosiologi di Sri Lanka

oleh **Premakumara de Silva**, Universitas Colombo, Sri Lanka, dan anggota Komite Penelitian ISA mengenai Sosiologi Agama (RC22)

Sri Lanka memiliki tradisi panjang dalam penelitian sosiologi dan antropologi, yang terbukti dari pekerjaan ekstensif yang dilakukan oleh sosiolog dan antropolog asing dan Sri Lanka mengenai aspek masyarakat dan budaya Sri Lanka. Kontribusi penting mereka terhadap tradisi ini terbukti dari survei bibliografi yang berguna dari Ian Goonetilleke (1979), dan penelitian lapangan yang diterbitkan oleh Liz Nissan (1987), Bruce Kapferer (1990), Michael Roberts (1997) Tudor Silva (1990, 2000), Susantha Goonatilake (2001), Sasanka Perera (2005, 2014), Siri Hettige (2010), dan Siri Gamage (2014). Namun, dalam esai singkat ini, saya memfokuskan pada saling keterkaitan antara sosiologi dan antropologi di Sri Lanka. Yang disoroti dalam esai ini adalah bidang-bidang tertentu di mana para antropolog dan sosiolog telah melakukan penelitian.

› Tumpang tindih antropologi/sosiologi

Sosiologi dan Antropologi sudah lebih dari 60 tahun diperkenalkan sebagai bidang studi di universitas Sri Lanka. Tidak diragukan lagi bahwa sosiologi adalah salah satu mata kuliah paling populer di kalangan mahasiswa saat ini. Ciri penting dari sosiologi Sri Lanka adalah bahwa perbedaan yang jelas antara antropologi dan sosiologi tidak lagi dipertahankan. Akademisi yang belajar

sosiologi dan antropologi di dalam negeri ataupun di luar negeri sering bekerja di departemen sosiologi di universitas Sri Lanka. Seperti banyak sosiolog lain di Sri Lanka, saya sendiri dididik dalam kedua tradisi tersebut. Ciri penting lainnya adalah bahwa mayoritas sosiolog dan antropolog Sri Lanka telah memusatkan upaya penelitian mereka di Sri Lanka dan hanya sedikit yang telah melakukan penelitian di tempat lain. Penelitian S.J. Tambiah di Thailand (Budhisme); Cahndra Jayawardena di Guinea dan Fiji (pekerja perkebunan); dan Arjun Gunaratne di Nepal (kekerabatan) adalah beberapa pengecualian penting. Sejauh menyangkut substansi subjek, sulit untuk memisahkannya, karena hampir semua departemen sosiologi di universitas Sri Lanka telah mengembangkan konten kuliah tingkat sarjana dan pascasarjana berupa percampuran kedua disiplin ilmu tersebut, seringkali mengabaikan batas-batas yang memisahkan sosiologi dan antropologi. Para mahasiswa akhirnya menerima ijazah mereka dengan label sosiologi. Namun beberapa orang berpendapat bahwa apa yang saat ini diajarkan dan diproduksi atas nama antropologi dan sosiologi tidak sebanding dengan standar internasional.

› Sebuah gambaran sejarah

Dari sudut pandang sejarah, minat antropologis dan sosiologi pada budaya dan masyarakat Sri Lanka mulai

tumbuh selama dua periode sejarah yang berbeda: antropologi muncul pada periode kolonial, sedangkan sosiologi berkembang pada periode pascakolonial. Sementara antropologi sangat terkait dengan pemerintahan kolonial, sosiologi awalnya berkembang di bawah arahan intervensi ilmiah Amerika, sebagian besar karena penunjukan Bryce Ryan sebagai profesor sosiologi pertama di niversitas Ceylon pada awal 1950-an. Asal muasal tradisi penelitian antropologi di Sri Lanka dapat ditelusuri paling tidak ke masa kolonial Inggris. Karya etnografi Seligman tentang komunitas aborigin Vadda pada tahun 1911 dapat dianggap sebagai awal dari tradisi ini. Selama Perang Dunia Pertama dan Kedua, Sri Lanka tertinggal dalam hal penelitian antropologi. Segera setelah kemerdekaan Sri Lanka, pada tahun 1949, pengajaran sosiologi sebagai mata pelajaran diperkenalkan dan pada tahun 1959 program gelar penuh pertama diberikan. Pada pertengahan 1950-an terdapat banyak teks etnografi/sosiologi bernilai tinggi yang dihasilkan oleh para ilmuwan Sri Lanka dan asing. Ini kemudian dilanjutkan dengan karya-karya karya sosiologi dan antropologi oleh ilmuwan seperti Bryce Ryan (1953), Ralph Peiris (1956), Edmond Leach (1960, 1961), Gananath Obeyesekere (1966), Nur Yalman (1967), Kitsiri Malalgoda (1976), H. L. Seneviratne (1978), dan Bruce Kapferer (1983). Banyak antropologi/sosiologi pasca-kemerdekaan Sri Lanka tidak secara

langsung membahas masalah-masalah “negara-bangsa” Sri Lanka yang baru muncul, tetapi lebih berfokus pada masalah-masalah seperti kasta, kekerabatan, kepemilikan tanah, dan agama populer.

Para antropolog “asing” yang melakukan sebagian besar penelitiannya di Sri Lanka kebanyakan berasal dari universitas-universitas Inggris, Amerika, dan Australia. Terdapat beberapa kontribusi luar biasa dari para antropolog asing bagi kajian budaya, masyarakat, dan politik Sri Lanka. Namun, karya antropologi mereka sangat dipengaruhi oleh karya dua antropolog paling terkemuka di Sri Lanka, Gananath Obeyesekere dan S.J. Tambiah; keduanya menjadi terkenal selama karir akademis mereka di universitas papan atas di Amerika Utara. Tradisi antropologi/sosiologi lokal terutama dibangun di atas karya para antropolog ini, meskipun banyak penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh para ilmuwan asing dan lokal serta oleh peneliti asal Sri Lanka yang berbasis di negara lain telah memberikan kontribusi yang signifikan untuk mengeksplorasi munculnya masalah sosial dan budaya Sri Lanka yang pada awalnya terabaikan.

› Kekhawatiran yang berubah

Sejak awal 1980-an, sosiologi/antropologi Sri Lanka telah mengalihkan perhatian pada studi kekerasan kelompok dalam masyarakat Sri Lanka – kekerasan intra-kemasyarakatan yang melibatkan komunitas etnis-agama maupun kelompok-kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat seperti pemuda yang terpinggirkan. Generasi sosiolog dan antropolog pascakemerdekaan yang memberikan kontribusi signifikan di bidang ini termasuk Newton Gunasinghe, Siri Hettige, dan Tudor Silva, yang baru saja kembali dari studi doktoralnya di universitas di luar negeri dan mulai menjajaki bidang penelitian baru seperti ketidaksetaraan di pedesaan Sri Lanka, identitas dan kekerasan pemuda, dan kesehatan masyarakat. Sangatlah signifikan bahwa karya para ilmuwan di atas dan para ilmuwan lain dalam beberapa tahun terakhir telah dipengaruhi oleh wawasan teoretis dan metodologis dari tradisi antropologi dan sosiologi mapan yang telah lama ada.

Upaya telah dilakukan dalam esai singkat ini untuk memberikan penjelasan tentang perkembangan antropologi dan sosiologi sebagai bidang studi, penelitian, dan pengajaran di universitas-universitas Sri Lanka, sejak berdirinya departemen sosiologi pertama pada tahun 1949 hingga saat ini. Saat ini, sebelas dari lima belas universitas di negara ini menawarkan setidaknya program sarjana di bidang ini. Koeksistensi tradisi antropologi dan sosiologi dalam pengajaran, penelitian, dan publikasi tampak beragam di berbagai sistem universitas. Yang patut diperhatikan adalah cukup besarnya keragaman di antara lembaga-lembaga akademik dalam hal kualitas pengajaran, penelitian, dan publikasi, serta relasi antara akademisi dengan tradisi antropologi dan sosiologi yang telah lama ada. Dengan latar belakang inilah pekerjaan akademisi dalam bidang-bidang ini kemungkinan besar menghadapi banyak tantangan di Sri Lanka dalam hal mempertahankan seperangkat standar bersama di bidang pengajaran, penelitian, dan diseminasi dalam suatu lingkungan lokal dan global yang kompleks dan dinamis. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Premakumara de Silva <prema@soc.cmb.ac.lk>

› Globalisasi dan Ketergantungan: Isu Sampah Plastik di Tiongkok

oleh **Pinar Temocin**, Universitas Hiroshima, Jepang



Sampah plastik di Filipina. Kredit: Adam Cohn/flickr.com. Hak tertentu dilindungi.

Globalisasi dapat dilihat sebagai sebuah proses integral dalam mana transformasi terjadi dalam ruang sosial, budaya, dan ekonomi dalam masyarakat. Hal itu berpengaruh terhadap kawasan maupun negara maju maupun berkembang, dari level mikro hingga makro. Globalisasi telah membawa perubahan-perubahan penting melalui berbagai tantangan terhadap kehidupan kita. Lingkungan pun telah terimbas olehnya karena bentuk-bentuk baru pada tata kelola ekonomi.

Perhatian pada berbagai kenyataan dunia di bawah globalisasi memungkinkan kita menjadi saksi atas

watak dominasi sesungguhnya. Konsep ketergantungan (*dependency*) sebagai bagian dari proses globalisasi (atau *globalized world order*) membuka tirai tentang sistem internasional yang merupakan hasil kompromi antara negara-negara “inti” yang secara ekonomi vital (yang disebut sebagai negara maju), dan negara-negara miskin “pinggiran” (yang disebut negara sedang berkembang). Dalam siklus ekologis kita lihat korelasi antara ketergantungan (*dependency*) dan eksploitasi sumber daya. Ini telah menghasilkan relasi yang tidak linear di mana negara-negara sedang berkembang seperti tergantung pada negara-negara maju dalam hal perdagangan sampah (dan bukan sebaliknya). Ini dapat dianggap sebagai konsekuensi dari globalisasi.

Globalisasi telah membantu Utara dan Selatan Global untuk lebih terkoneksi lewat meningkatnya ikatan-ikatan ekonomi. Namun, hubungan ini menjadi semakin kompleks dibandingkan sebelumnya jika dipertimbangkan adanya jalur ganda. Dalam pemahaman ini, perhatian lebih pada hirarki sampah (khususnya isu sampah plastik dalam lingkaran kemiskinan di Tiongkok) merupakan contoh ideal untuk memperlihatkan bagaimana ketidakseimbangan hubungan tersebut dalam kenyataan berfungsi.

› Isu sampah plastik Tiongkok

Perdagangan sampah plastik di Tiongkok (yang bagi sebagian orang dianggap sebagai krisis) merupakan salah satu ilustrasi terbaik tentang bagaimana ketergantungan beroperasi dalam sistem dunia yang baru. Dalam industri sampah global, Tiongkok merupakan importir dan pengolah sampah plastik terbesar dunia (sebagai tujuan utama daur ulang sampah), mencakup sebanyak 56% dari pasar global.

Kesalingketergantungan antarnegara dapat menyebabkan efek struktural yang problematis. Negara pengekspor sampah menyingkirkan konsekuensi dari “ketagihan sampah” melalui alternatif murah dan pendekatan-pendekatan yang fokus pada menghilangkan sampah dari pandangan, daripada daur ulang. Tidak lagi perlu dikatakan bahwa negara-negara ini mendapatkan keuntungan dari kondisi *status quo* sampah sambil menikmati kondisi lingkungan yang lebih baik. Negara-negara pengimpor sampah (seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, Indonesia, dan lainnya) menderita karena kondisi ancaman kesehatan, eksploitasi buruh, polusi lingkungan, dan lain sebagainya. Lebih buruk lagi, negara-negara pengimpor sampah ini sepertinya tidak mampu membuat peraturan yang tegas atau mekanisme kontrol untuk membatasi impor sampah karena menganggap telah memperoleh keuntungan ekonomi. Meskipun perdagangan sampah dapat dilihat sebagai peluang ekonomi untuk negara-negara sedang berkembang, di sana ada ketidakharmonisan antara peluang dan kenyataan beracun. Tiongkok, sebagai negara sedang berkembang, dapat dilihat sebagai seekor “*guinea pig*” (kelinci percobaan) dari disharmoni ini yang secara khusus berdampak pada lingkungannya sendiri dan kesehatan masyarakatnya melalui peningkatan keracunan (yang melanggar hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat, bersih dan aman).

Lebih jauh lagi, hal itu juga berdampak terhadap hak-hak para pekerja yang memisahkan sampah plastik dari negara-negara asing dalam kondisi kerja yang memprihatinkan.

Melalui ekspor sampah, warga di negara-negara maju dan negara industri (seperti AS, Jepang, Australia, dll.) menikmati lingkungan yang lebih bersih dan terlindung serta cara hidup yang lebih sehat, sementara para pekerja Tiongkok (yang berjuang dengan polusi plastik) dan anak-anak (yang tidak bersekolah karena bekerja di sektor daur ulang plastik) menderita sebagai bagian dari industri sampah. Aliran material yang sudah dibuang dari negara-negara maju ke negara-negara sedang berkembang untuk diproses tanpa terlihat (daripada membangun dan mengembangkan kebijakan industri daur ulang dalam negeri), akhir-akhir ini telah mengakibatkan fakta bahwa negara-negara yang dilanda kemiskinanlah yang menghadapi krisis sosial-lingkungan karena kepentingan diri-sendiri dan ekspor sampah negara-negara industri.

› Kesimpulan

Meskipun isu daur ulang sampah plastik Tiongkok seperti dibungkam atau ditutupi oleh pertumbuhan ekonomi negeri ini dalam tahun-tahun terakhir, dapat dikatakan bahwa ini dapat dianggap sebagai suatu isu globalisasi atau kesenjangan global di mana hegemoni berkesinambungan atas manajemen pemilahan dan daur ulang sampah dapat disaksikan. Alih-alih berkontribusi pada pembangunan dalam negara-negara yang mengimpor, perdagangan sampah global dengan ketimpangan dampaknya telah menciptakan sebuah “perang daur ulang” atau “perjuangan plastik” yang disebabkan oleh sampah dari negara-negara kaya di Tiongkok (dan negara-negara Asia Tenggara lainnya). Lebih jauh lagi, ini mencerminkan kemapanan realitas ekonomi dan sampah, dalam mana kontrol Utara Global terhadap negara-negara sedang berkembang telah mengakibatkan halangan yang tidak memperbolehkan negara-negara Selatan untuk mencapai kemajuan dalam haluannya sendiri menuju tatanan dunia yang lebih adil. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Pinar Temocin
<pnrtemocin@hotmail.com>